



Kajian Analisis Capaian

RPJMD

Provinsi Kepulauan Riau



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

— TAHUN 2020 —





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kajian Analisis Capaian

RPJMD

Provinsi Kepulauan Riau



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-5
D. Ruang Lingkup	I-6
E. Sistematika Dokumen Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	I-6
BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	II-1
A. Pendekatan Teknis dan Metodologi	II-1
B. Kerangka Pikir	II-11
C. Teknik Pengumpulan Data	II-16
D. Teknik Pengolahan Data	II-16
BAB III ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DAERAH	III-1
A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah	III-1
B. Analisis Belanja Daerah	III-12
C. Analisis Pembiayaan Daerah	III-18
BAB IV EVALUASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU SAMPAI TAHUN 2019	IV-1
A. Evaluasi Indikator Kinerja Tujuan	IV-1
B. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran	IV-9

BAB V EVALUASI KINERJA PROGRAM RPJMD	V-1
A. Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintahan.....	V-1
B. Permasalahan Masing-Masing Urusan Pemerintahan	V-123
 BAB VI PENUTUP	 VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Rekomendasi	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Menurut Permendagri 86 Tahun 2017.....	II-17
Tabel 2.2	Status Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD	II-18
Tabel 3.1	Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019.....	III-14
Tabel 3.2	Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2019.....	III-17
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019.....	III-22
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tujuan 1, Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2019	IV-2
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-2
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan Keterhubungan Antar Kabupaten/Kota Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-3
Tabel 4.4	Capaian Kinerja Tujuan 4, Cakupan Pelayanan Sanitasi (Air Limbah Perkotaan, Drainase, Persampahan) Sampai dengan Tahun 2019	IV-4
Tabel 4.5	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Sampai dengan Tahun 2019	IV-4
Tabel 4.6	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-5
Tabel 4.7	Capaian Kinerja Tujuan I, Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-6
Tabel 4.8	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Pariwisata dan Kemaritiman Sampai dengan Tahun 2019	IV-6
Tabel 4.9	Capaian Kinerja Tujuan I, Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-9

Tabel 4.10	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan Iklim Ekonomi yang Kondusif Sampai dengan Tahun 2019	IV-8
Tabel 4.11	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatkan Ekspor dan Produktivitas Industri Memanfaatkan Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2019	IV-8
Tabel 4.12	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Sampai dengan Tahun 2019	IV-9
Tabel 4.13	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Sampai dengan Tahun 2019	IV-9
Tabel 4.14	Capaian Kinerja Sasaran 1, Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-11
Tabel 4.15	Capaian Kinerja Sasaran 2, Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2019	IV-11
Tabel 4.16	Capaian Kinerja Sasaran 3, Meningkatnya Ketertiban dan Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-12
Tabel 4.17	Capaian Kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-13
Tabel 4.18	Capaian Kinerja Sasaran 5, Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi Sampai dengan Tahun 2019	IV-14
Tabel 4.19	Capaian Kinerja Sasaran 6, Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Sanitasi Sampai dengan Tahun 2019	IV-15
Tabel 4.20	Capaian Kinerja Sasaran 7, Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih Sampai dengan Tahun 2019	IV-15
Tabel 4.21	Capaian Kinerja Sasaran 8, Berkurangnya Kawasan Kumuh Sampai dengan Tahun 2019	IV-16
Tabel 4.22	Capaian Kinerja Sasaran 9, Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Sampai dengan Tahun 2019	IV-16
Tabel 4.23	Capaian Kinerja Sasaran 10, Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sampai dengan Tahun 2019	IV-17

Tabel 4.24	Capaian Kinerja Sasaran 11, Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Sampai dengan Tahun 2019	IV-18
Tabel 4.25	Capaian Kinerja Sasaran 12, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-19
Tabel 4.26	Capaian Kinerja Sasaran 13, Angka Kemiskinan Menurun Sampai dengan Tahun 2019	IV-20
Tabel 4.27	Capaian Kinerja Sasaran 14, Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sampai dengan Tahun 2019	IV-20
Tabel 4.28	Capaian Kinerja Sasaran 15, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan Sampai dengan Tahun 2019	IV-21
Tabel 4.29	Capaian Kinerja Sasaran 16, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sampai dengan Tahun 2019	IV-22
Tabel 4.30	Capaian Kinerja Sasaran 17, Meningkatnya Produksi Pertanian Sampai dengan Tahun 2019	IV-23
Tabel 4.31	Capaian Kinerja Sasaran 18, Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Sampai dengan Tahun 2019	IV-24
Tabel 4.32	Capaian Kinerja Sasaran 19, Meningkatnya Realisasi Investasi dan Daya Saing Koperasi dan UKM Sampai dengan Tahun 2019	IV-26
Tabel 4.33	Capaian Kinerja Sasaran 20, Meningkatnya Kuantitas Produksi Industri Pengolahan Berbasis Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2019	IV-27
Tabel 4.34	Capaian Kinerja Sasaran 21, Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Sampai dengan Tahun 2019	IV-28
Tabel 4.35	Capaian Kinerja Sasaran 22, Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan Sampai dengan Tahun 2019	IV-28
Tabel 4.36	Capaian Kinerja Sasaran 23, Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sampai dengan Tahun 2019	IV-29
Tabel 4.37	Capaian Kinerja Sasaran 24, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Serta	

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel Sampai Dengan Tahun 2019.....	IV-31
Tabel 5.1	Jumlah Indikator dan Capaian Berdasarkan Urusan	V-2
Tabel 5.2	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-5
Tabel 5.3	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-8
Tabel 5.4	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-14
Tabel 5.5	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukinan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-18
Tabel 5.6	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-22
Tabel 5.7	Capaian Kinerja Urusan Sosial dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-27
Tabel 5.8	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-31
Tabel 5.9	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-35
Tabel 5.10	Capaian Kinerja Urusan Pangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-37
Tabel 5.11	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-39
Tabel 5.12	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-43
Tabel 5.13	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-46

Tabel 5.14	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-48
Tabel 5.15	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-50
Tabel 5.16	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-53
Tabel 5.17	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-56
Tabel 5.18	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-58
Tabel 5.19	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-61
Tabel 5.20	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-63
Tabel 5.21	Capaian Kinerja Urusan Statistik dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-65
Tabel 5.22	Capaian Kinerja Urusan Persndian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-67
Tabel 5.23	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-69
Tabel 5.24	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-71
Tabel 5.25	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-73
Tabel 5.26	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-75
Tabel 5.27	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-80

Tabel 5.28	Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-82
Tabel 5.29	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir R RPJMD sampai Tahun 2019	V-85
Tabel 5.30	Capaian Kinerja Urusan Enenrgi dan Sumberdaya Mineral dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-87
Tabel 5.31	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-90
Tabel 5.32	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-93
Tabel 5.33	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-96
Tabel 5.34	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-98
Tabel 5.35	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-102
Tabel 5.36	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-106
Tabel 5.37	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-108
Tabel 5.38	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-110
Tabel 5.39	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-113
Tabel 5.40	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	II-5
Gambar 2.2	Pendekatan Analisis Input-Proses-Output	II-7
Gambar 2.3	Pendekatan Analisis Input-Output	II-7
Gambar 2.4	Model Evaluasi Program dan Kebijakan	II-8
Gambar 2.5	Kerangka Pikir Penyusunan Analisis capaian Kinerja Pembangunan / Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.....	II-14
Gambar 3.1	Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)	III-4
Gambar 3.2	Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-5
Gambar 3.3	Perbandingan dan Persentase Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)	III-6
Gambar 3.4	Perbandingan dan Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-7
Gambar 3.5	Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 (%)	III-8
Gambar 3.6	Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)	III-13
Gambar 3.7	Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-14

Gambar 3.8	Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)	III-15
Gambar 3.9	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 (%).	III-16
Gambar 3.10	Perbandingan dan Persentase Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)	III-19
Gambar 3.11	Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)	III-20
Gambar 3.12	Perbandingan dan Persentase Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)	III-21
Gambar 4.1	Tingkat Ketercapaian Indikator Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019	IV-1
Gambar 4.2	Tingkat Ketercapaian Indikator Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019	IV-10
Gambar 5.1	Tingkat Ketercapaian Indikator Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019 V-1	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah periode tersebut.

Pada tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke empat RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau, artinya hamper memasuki tahap terakhir dari periode RPJMD, oleh karena itu diperlukan **kegiatan evaluasi** atas pelaksanaan dari dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dilakukan terutama untuk melihat konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan

hasil rencana pembangunan Daerah, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan

Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan dalam pasal 29 menyebutkan bahwa pimpinan lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan diatas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan kajian Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah periode mendatang.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Kajian Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepri kurun waktu tahun 2017 s/d 2019.

Adapun tujuan penyusunan Analisis Capaian RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Mengetahui pencapaian target kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021, kurun waktu tahun 2017 s/d 2019
2. Mengetahui pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi, baik indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 kurun waktu tahun 2017 s/d 2019.
3. Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD 2016-2021 dalam rangka perbaikan kebijakan pembangunan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Pekerjaan penyusunan Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

1. Menyusun analisis pencapaian target kinerja pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam BAB III dokumen RPJMD kurun waktu tahun 2017 s/d 2019.
2. Menyusun analisis pencapaian target dan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja sasaran BAB V RPJMD 2016-2021 tahun 2017 s/d 2019.
3. Menyusun analisis pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja program Bab VII RPJMD 2016-2021 tahun 2017 s/d 2019.
4. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi RPJMD dalam rangka perbaikan kebijakan pembangunan.

E. Sistematika Dokumen Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Sistematika Laporan Akhir Penyusunan Analisis Capaian RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika laporan pekerjaan.

- BAB II Metode Pelaksanaan Evaluasi, berisi tentang landasan teori, kerangka pikir dan metode pelaksanaan evaluasi.
- BAB III Analisis Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah, berisi tentang evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dari tahun 2017 sampai tahun 2019.
- BAB IV Evaluasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019, berisi tentang evaluasi terhadap target kinerja indikator tujuan dan indikator sasaran RPJMD sampai tahun 2019.
- BAB V Evaluasi Kinerja Indikator Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019, memuat tentang evaluasi terhadap target kinerja indikator program RPJMD sampai tahun 2019 dan permasalahannya.
- BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Pendekatan Teknis dan Metodologi

1. Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis, dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. Dengan perkataan lain, evaluasi merupakan proses penilaian yang memanfaatkan informasi dari kegiatan pemantauan. Dalam beberapa referensi, istilah evaluasi seringkali sudah mencakup kegiatan pemantauan dan evaluasi, karena informasi dari kegiatan monitoring/ pemantauan menjadi input bagi pelaksanaan evaluasi.

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharso, 2005: 136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1982: 238). Istilah evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

1. Fokus Nilai

Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu, suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi Fakta – Nilai

Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Terkait dengan hal tersebut kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*Ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*Ex-ante*).

4. Dualitas Nilai

Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan), dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). (LAN, 2004: 237-238).

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat nilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang (Kosasih, 2004: 3).

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkupnya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi kedalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang

dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk beberapa periode/tahun sehingga memerlukan pengumpulan data time series untuk beberapa tahun yang dievaluasi (LAN, 2004: 240).

Menurut Seriven dalam purwanto dkk., evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan, caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu, evaluasi memberikan data yang relatif cepat (*shot term data*). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan (Purwanto dkk, 1999: 21).

Menurut Sondang P. Siagian, istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu “Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakekat dari penilaian itu adalah:

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? “*Korektifitas*” yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang

telah terjadi. Tetapi lebih penting lagi harus dikemukakan sebab-sebab mengapa penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan itu terjadi.

Jika telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan, tidak terulang. Dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat “performance” yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar atau inefisiensi yang semakin berkurang.

- c. Penilaian bersifat “*prescriptive*” (bersifat mengobati). Setelah ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul lagi, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.
- d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administratif dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian, 1970: 143-144).

Berdasarkan beberapa uraian diatas, **evaluasi adalah proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan**. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja dilakukan setelah tahapan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Kinerja. Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa yang akan datang. (Kosasih, 2004: 22).

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan yang menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan satuan organisasi atau kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang

di bebaskan kepadanya. Evaluasi Kinerja merupakan analisis dan intepretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya agar dikaitkan dengan sumber daya (input) yang berada dibawah wewenangnyanya seperti SDM, dana/keuangan, sarana-prasarana, metode kerja dan hal lain yang berkaitan. (Kosasih, 2004: 3).

Dalam perspektif SAKIP, evaluasi kinerja sebagai subsistem dari SAKIP dapat dilihat pada Gambar 2.1



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2004 : 63)

Gambar 2.1. Siklus Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Dengan memperhatikan konsep evaluasi, maka untuk melaksanakan evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan tanpa diketahui perencanaan kinerjanya dan realisasi kegiatannya. Evaluasi kinerja berfungsi pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Kedua, memberi masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Menurut Mayston (2003), cara evaluasi kinerja yang umum dilakukan oleh para pengambil keputusan, yang biasa dilakukan adalah menyelenggarakan *evaluation research*. Namun cara ini memerlukan daftar pertanyaan yang cukup serius, dan karenanya tidak flexibel, perlu waktu luas, namun seringkali hasilnya kurang relevan. *Qualitative evaluation* sebenarnya lebih diperlukan karena dapat menjelaskan secara flexibel. Prasyarat untuk hal ini adalah metodologinya harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya riset lanjutan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi terdahulu. Informal evaluation, juga sering dilakukan secara *casual, impressionistic, intuitive, dan subjective appraisal*. Pada akhirnya dilakukan suatu *formal evaluation*, yaitu suatu evaluasi yang terstruktur dengan memperhatikan ukuran-ukuran *inputs, outputs, outcomes, dan impacts* atau dampak dari hal yang diteliti.

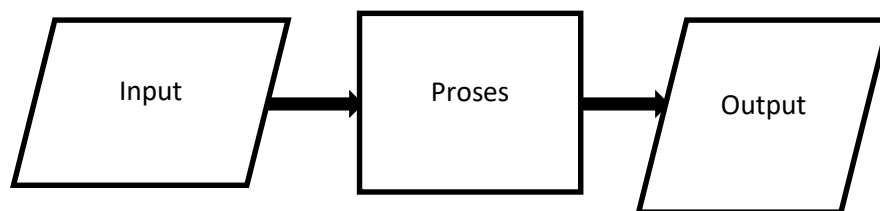
Selanjutnya dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi *kegiatan*, bisa juga dengan mengevaluasi kinerja *program*. Bisa juga evaluasi dilakukan secara menyeluruh sehingga akhirnya dapat disimpulkan kinerja organisasi. (Lembaga Administrasi Negara, 2004: 246).

1) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi terhadap kegiatan instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh tingkat pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan misi instansi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu adalah penting.

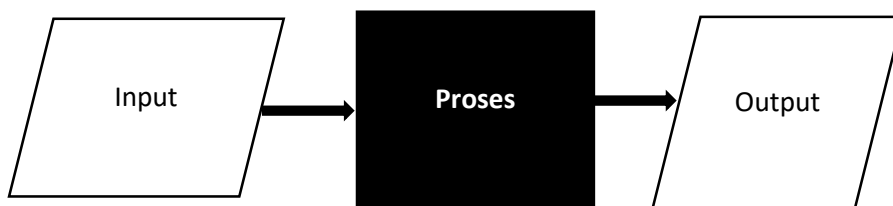
Kedalaman dari evaluasi kegiatan ditentukan oleh manajemen atau pimpinan unit organisasi. Peran penanggung jawab kegiatan dalam menentukan evaluasi terhadap kegiatan sangat penting. Jika penanggung jawab kegiatan merasa perlu atau sadar akan kewajibannya tentulah evaluasi terhadap kegiatan dilakukan. Jika evaluasi ditujukan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan tentulah diperlukan evaluasi yang mendalam.

Evaluasi kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: input-proses-output dan input-output. Berdasarkan Pendekatan Analisis Input-Proses-Output, baik input, proses maupun output diteliti dan dipelajari secara mendalam. Sementara itu pada Pendekatan Analisis Input-Output, hanya Input dan output saja yang diteliti dan dipelajari, sedangkan prosesnya merupakan “black-box” yang dibiarkan tidak diteliti dan dipelajari. Secara rinci skema pendekatan analisis input-proses-output terlihat pada Gambar 2.2, sedangkan pendekatan input dan output terlihat pada Gambar 2.3.



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2004: 248)

Gambar 2.2. Pendekatan Analisis Input-Proses-Output



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2004: 248)

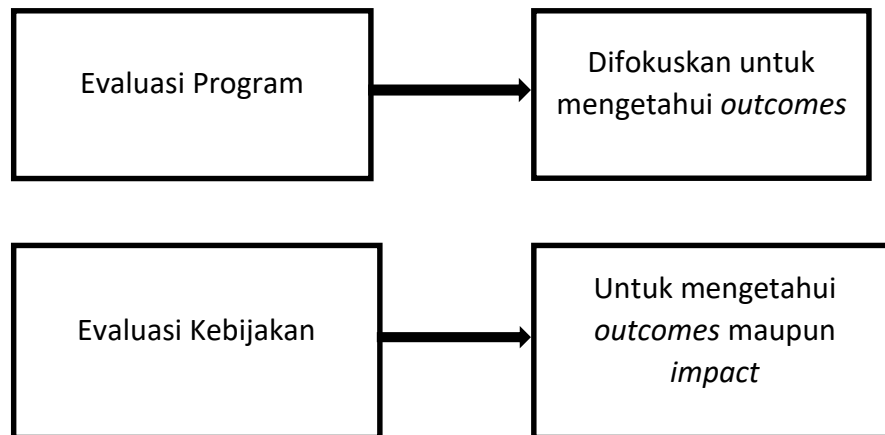
Gambar 2.3. Pendekatan Analisis Input-Output

Pendekatan pertama akan dapat memberikan rekomendasi atau *feed back* tentang berbagai hal baik peningkatan hasil (output) maupun prosesnya. Pendekatan yang kedua masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana caranya meningkatkan kinerja dengan memperbaiki proses pelayanan/produksi yang dilakukan. Bagi instansi pemerintah kegiatan evaluasi dengan pendekatan yang pertama dilakukan secara lebih sering dan teratur (per triwulan/semester) disesuaikan dengan pola monitoring kinerja secara reguler. Sedangkan pendekatan kedua dilakukan dalam waktu yang agak lama (setahun atau 2 tahun). Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan secara reguler sangat mengandalkan sistem

pengumpulan data internal yang digunakan dalam memantau (monitoring) kegiatan.

2) Evaluasi Kinerja Program

Evaluasi program cenderung dilakukan untuk mencari jawaban atau *outcomes* yang dihasilkan, sedangkan evaluasi kebijakan mungkin saja mulai *outcomes* hingga dampak (*impact*) yang terjadi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini:



Gambar 2.4. Model Evaluasi Program dan Kebijakan

Kata kinerja seringkali meliputi istilah-istilah seperti penyelesaian, pencapaian, realisasi ataupun pemenuhan. Sebagian besar dari istilah tersebut menunjukkan hal yang bersifat obyektif yaitu tercapainya suatu tujuan karena suatu tindakan publik, tetapi ada juga yang bersifat lebih subyektif yang menunjukkan tingkat kepuasan atas suatu tindakan. Umumnya, literatur-literatur ekonomi dan manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat obyektif, karena selain mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat juga kepuasan yang bersifat subyektif lebih sulit untuk diukur (Schiavo-Campo dan Sundaram, 2000).

Salah satu tahapan penting dalam evaluasi kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan dengan perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu atas suatu materi perencanaan yang ditunjukkan oleh suatu indikator. Menurut berbagai sumber, indikator adalah: Suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah

ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal, dan dapat merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif.

Mackay (2008) menjelaskan indikator kinerja (Performance indicators) sebagai ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Level indikator dapat saja sangat tinggi, yakni dalam arti mengukur kinerja pemerintah, atau dalam arti mengukur kegiatan dan keluarannya. Indikator berguna untuk menetapkan target kinerja, untuk menilai kemajuan pencapaian target tersebut, serta untuk membandingkan kinerja dari unit kerja/organisasi/kementerian/ lembaga yang berbeda.

Berdasarkan Bappenas (2004), ukuran kinerja merupakan suatu hirarki yang menurut kerangka logika, bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Bila dimulai dari level terbawah dengan urutan sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (Input). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (Output). Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome). Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator Dampak (Impacts). Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan asumsi yang telah digunakan.

Persyaratan indikator bisa bermacam-macam menurut berbagai sumber dan keperluannya. Di bawah ini disajikan dua konsep persyaratan indikator yang umum dipakai, diketahui dan harus diperhatikan. Menurut persyaratan SMART, penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

- a. *Simple* (sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya.

- b. *Measurable* (dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya.
- c. *Attributable* (bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan.
- d. *Reliable* (dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti.
- e. *Timely* (tepat waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

2. Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan Pasal 276 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup provinsi. Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- 3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam rencana semula. Bila pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan baik perlu

dijelaskan faktor faktor penentu keberhasilan (*Key Success Factors*) tersebut agar keberhasilan tersebut dapat pula dilaksanakan pada periode perencanaan berikutnya, akan tetapi bilamana pelaksanaan rencana tersebut tidak dapat dilakukan, perlu diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi agar pemecahannya dalam bentuk perubahan kebijakan akan dapat dilakukan pada waktu penyusunan rencana periode berikutnya.

Evaluasi hasil rencana pembangunan pada prinsipnya menilai keberhasilan kebijakan pembangunan daerah yang mencakup seluruh aspek pembangunan. Evaluasi kinerja hasil rencana pembangunan daerah dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- 1) Perbandingan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Perbandingan dengan standar, yaitu teknik evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan realisasi dari indikator pembangunan daerah yang tersedia dengan nilai rata rata pada tingkat Nasional.
- 3) Analisa trend perkembangan, yaitu dengan melihat trend perkembangan beberapa tahun dari beberapa indikator pembangunan daerah yang digunakan. Dalam hal ini, kinerja Pembangunan Daerah dikatakan berhasil apabila terdapat trend perkembangan yang bersifat positif dari masing masing indikator pembangunan Daerah secara signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.

B. Kerangka Pikir

Struktur perencanaan pembangunan secara berjangka meliputi perencanaan pembangunan daerah dengan jangka 20 tahun yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka 5 tahun atau yang disebut dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka 1 tahun atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu untuk kelembagaan Perangkat Daerah (PD), dalam rangka menjabarkan rencana pembangunan dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berjangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat penjabaran tahunan.

Durasi masa pemerintahan kepala daerah dalam masa jabatan adalah lima tahun. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, disusun dokumen RPJMD, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Kemudian pada tahun 2018 dilakukan reiew dan perubahan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021. Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 implementasi dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah memasuki tahap terakhir. Untuk memastikan apakah hasil pembangunan telah sesuai dengan pencapaian target akhir RPJMD, maka dilakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan tersebut. Dengan dilaksanakannya evaluasi dokumen RPJMD diharapkan dapat diketahui bagaimana kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama periode tersebut.

Kegiatan Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 termasuk pada kategori evaluasi hasil terhadap rencana pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan melalui RKPD dan APBD tahunan selama kurun waktu tahun 2017-2019. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target-target RPJMD pada

berbagai sektor pembangunan. Evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memetakan perkembangan capaian kinerja hasil RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2019. Evaluasi hasil RPJMD ini akan menjadi masukan dalam rangka penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Beberapa dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya memuat indikator yang akan diukur dalam evaluasi RPJMD.
- b. Dokumen statistik daerah yang diterbitkan oleh BPS dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Dokumen pelaporan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti LKjIP dan LKPJ Akhir Tahun 2017, LKPJ Akhir Tahun 2018, dan LKPJ Akhir Tahun 2019.

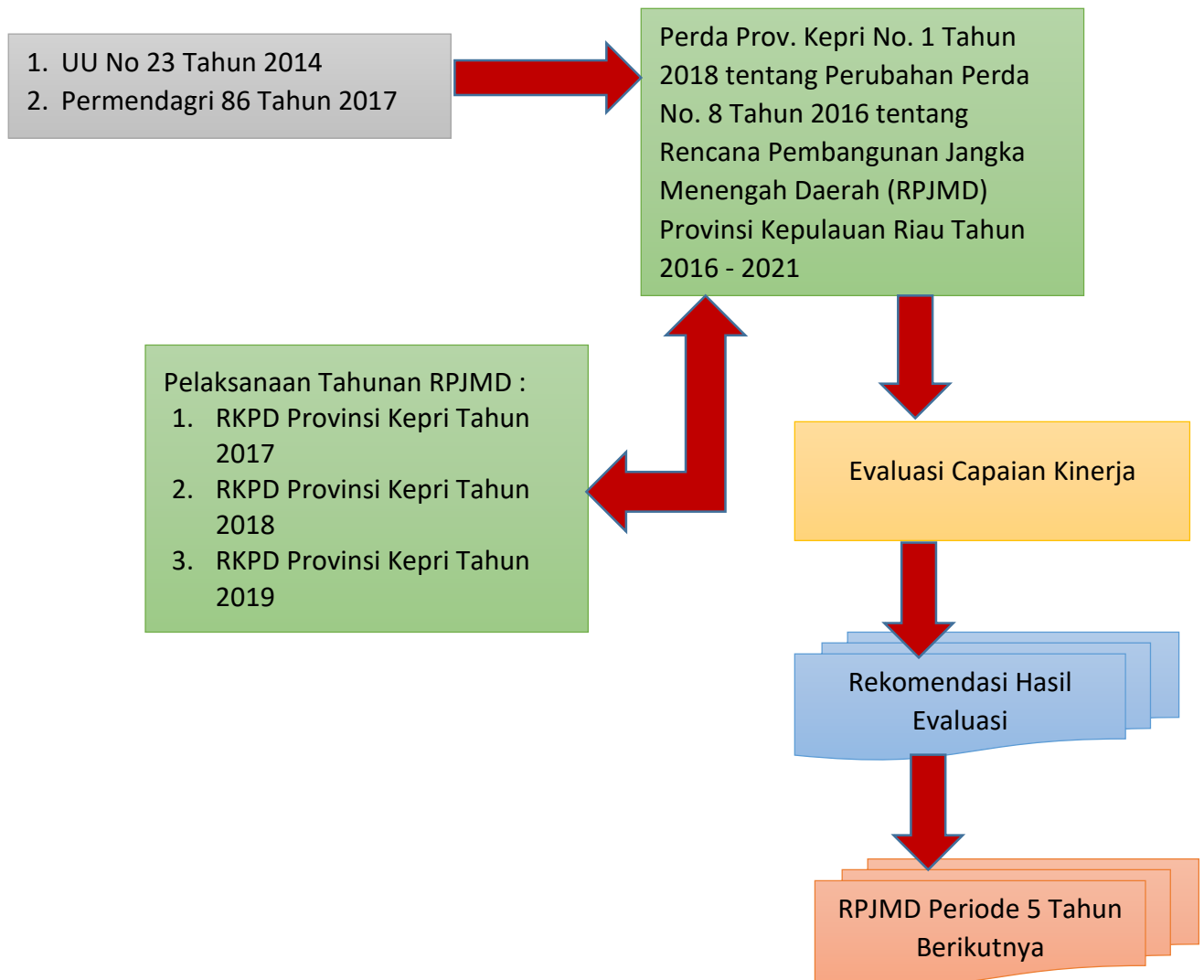
Substansi utama yang akan dibahas dalam evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau meliputi visi, tujuan dan sasaran RPJMD yang tergambarkan dari berbagai indikator kinerja pembangunan yang dapat diukur secara kuantitatif. Substansi evaluasi RPJMD dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

- a. Evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum pada Bab III RPJMD K Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dikelompokkan berdasarkan misi pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum pada Bab V RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja program sebagaimana tercantum pada bab VII RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Proses penyusunan Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan melalui tahapan utama berupa pengumpulan data capaian kinerja masing-masing substansi yang akan dievaluasi. Pengisian data dilakukan oleh perangkat daerah, dan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data pencapaian target RPJMD meliputi Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Daerah, dan Indikator Kinerja Program.

Analisis yang akan digunakan yaitu analisis trend capaian tahun 2017 s/d 2019, dan analisis perbandingan dengan target RPJMD. Tahap selanjutnya yaitu Identifikasi permasalahan dalam pencapaian Target RPJMD. Berikutnya dilakukan perumusan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJMD, dan terakhir adalah penyusunan laporan.

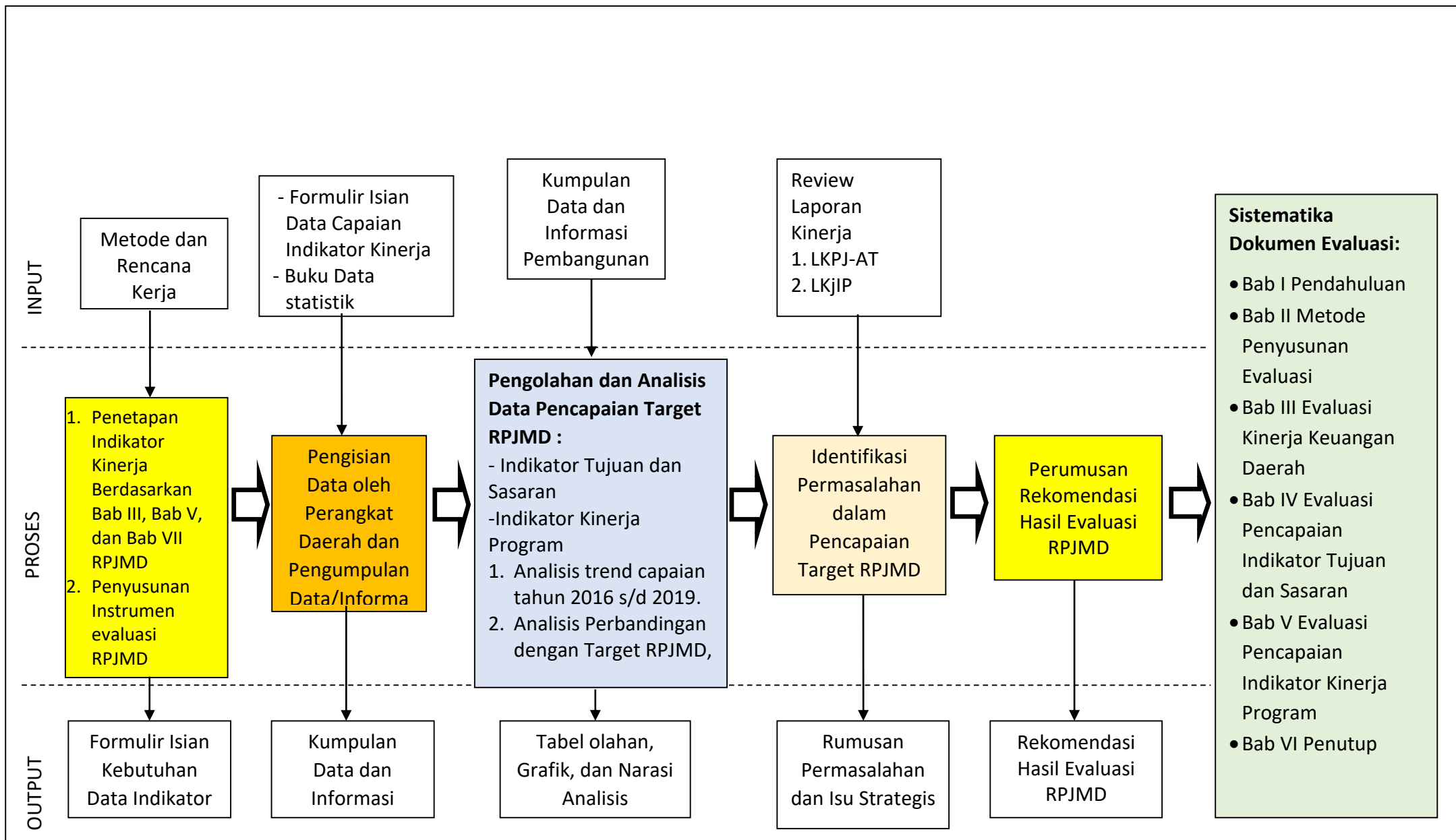
Kerangka Pikir substansi penyusunan Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.5.

Kerangka Pikir Penyusunan Analisis capaian Kinerja Pembangunan / Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Adapun secara proses, kerangka pikirnya adalah sebagai berikut:



C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan melalui pencatatan data dari Perangkat Daerah atau sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan.

b. Daftar isian

Berupa blangko isian data *performance* masing-masing indikator, disampaikan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan untuk diisi sesuai dengan data kondisi capaian dengan urutan tahun evaluasi yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

D. Teknik Pengolahan Data

Pada prinsipnya evaluasi terhadap Evaluasi capaian RPJMD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator RPJMD, yaitu sebagai berikut.

- a. **Indikator Konvers**, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik.

Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. **Indikator Invers**, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek.

Persentase capaian target untuk indikator negatif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penentuan status capaian target kinerja sesuai ketentuan peraturan Permendagri 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Menurut Permendagri 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Kelemahan kriteria penilaian kinerja menggunakan Permendagri 86 tahun 2017 yaitu sebagai berikut.

1. Penilaian capaian kinerja RPJMD tersebut hanya bisa digunakan untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahunan dengan target tahunan RPJMD, dan membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ke-5 RPJMD terhadap target akhir RPJMD, kurang tepat digunakan menilai capaian kinerja sampai dengan pertengahan periode RPJMD, atau capaian sampai dengan tahun ke-n RPJMD.
2. Gradasi nilai berdasarkan kriteria diatas dirasa kurang tepat dalam penilaian indikator kinerja. Berdasarkan kriteria diatas, capaian target sebesar $66\% \leq 75\%$

termasuk kategori sedang, $91\% \leq 100\%$ pada kategori sangat tinggi, dan $76\% \leq 90\%$ dikategorikan tinggi. Bisa saja terjadi capaian kinerja melebihi angka 100% karena melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Seharusnya capaian kinerja $< 100\%$ dikategorikan target tidak tercapai, dan $\geq 100\%$ capaian dikategorikan target tercapai, sebab ketidaktercapaian target kinerja tahunan RPJMD (RKPD) akan mempengaruhi pencapaian target akhir RPJMD.

Dengan mendasarkan pada kelemahan penilaian kinerja capaian RPJMD sesuai, maka tim evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau melakukan inovasi dalam penilaian status kinerja. Teknik Penilaian Status Capaian s/d tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD yang digunakan dalam evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Status Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019
Terhadap Target Akhir RPJMD

No	Kriteria Lengkap Penilaian Status Kinerja	Simbol	Keterangan
1	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2019 sebesar 100%		Target akhir RPJMD telah tercapai
2	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2019 sebesar 60% sampai dengan kurang dari 100%		Target akhir RPJMD akan tercapai
3	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2019 kurang dari 60%		Pencapaian Target akhir RPJMD perlu upaya keras

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

a. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan realisasi capaian kinerja s/d tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD, dan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target per tahun dalam RPJMD.

b. Analisis Trend

Dalam Evaluasi RPJMD ini, analisis trend digunakan untuk melihat perkembangan kinerja indikator dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019. Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan.

BAB III

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DAERAH

A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah. Pendapatan daerah mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari dana perimbangan disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun konservatif atau tidak terlalu progresif, yaitu berada di kisaran 5-8% tiap tahunnya. PAD diproyeksikan tumbuh, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah salah satunya melalui penggalan potensi retribusi daerah khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha pemanfaatan ruang laut (retribusi labuh jangkar kapal). Dana perimbangan diproyeksikan meningkat dipengaruhi oleh peningkatan DAU, dan DAK dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sementara itu Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat terutama berasal dari peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Propinsi dan Pemerintah; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Upaya yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melakukan pengelolaan

dan optimalisasi pendapatan daerah secara efektif dan efisien melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui :

1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui upaya antara lain:

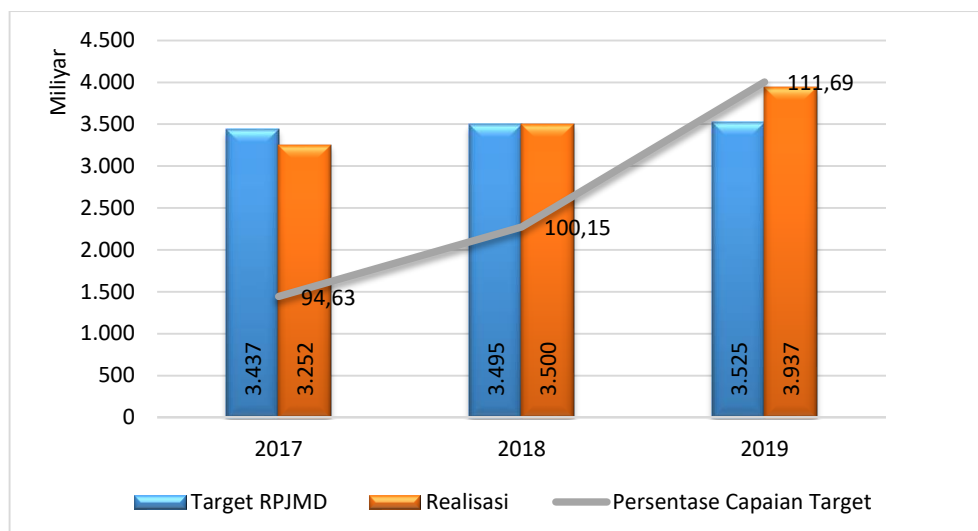
- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *Samsat Drive Thru* dan penyempurnaan sistem otomatisasi pembayaran pajak kendaraan melalui *Samsat Automatic teller Machine (SAM)*;
- 2) Penambahan kendaraan operasional Samsat keliling untuk wilayah Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun serta tambahan kendaraan operasional penagihan aktif oleh petugas BP2RD.
- 3) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah khususnya terhadap UPT-PPD ;
- 5) Pengembangan aplikasi *e-payment* samsat ;
- 6) Pengembangan sistem informasi online melalui media website dan media informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 7) Meningkatkan sinergi bersama-sama Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan membentuk sekretariat Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau dalam hal koordinasi kebijakan pelayanan samsat.

b. Ekstensifikasi Retribusi Daerah. Upaya ekstensifikasi retribusi daerah dilakukan dengan melalui pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah, sejak tahun 2018 mulai ditargetkan pendapatan retribusi jasa usaha dari sektor perhubungan laut khususnya layanan kepelabuhanan (labuh tambat).

c. Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah milik provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjungpinang dan Tanjung Uban kepada masyarakat.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak daerah.
 - e. Meningkatkan pengelolaan pendapatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
2. Kebijakan pendapatan dana perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dimana menghendaki pembagian DBH berdasarkan prinsip realisasi (*based on actual revenue*) dalam tahun anggaran berjalan.
 3. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), terjadi peningkatan yang signifikan. Pemerintah sejak tahun 2016 mengalokasikan DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan pengalokasiannya dilakukan melalui mekanisme *bottom-up*, yakni daerah menyampaikan usulan (*proposal based*) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasian DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat *top-down*, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengajukan usulan anggaran pembangunan yang dikoordinasi sinergi antara Dinas Badan Perencanaan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau diketahui telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi pendapatan daerah tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 3.252.237.500.367,-, sedangkan target RPJMD sebesar Rp.3.436.939.612.293,-. Dengan demikian maka persentase capaiannya sebesar 94,63%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 3.500.007.224.302,-, target RPJMD sebesar Rp. 3.494.771.742.620,-. Tingkat capaian target pada tahun 2018 sebesar 100,15%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp.3.936.963.268.345,- dari target RPJMD sebesar Rp3.524.822.111.112,- dengan persentase capaian sebesar 111,69%. Realisasi capaian target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.



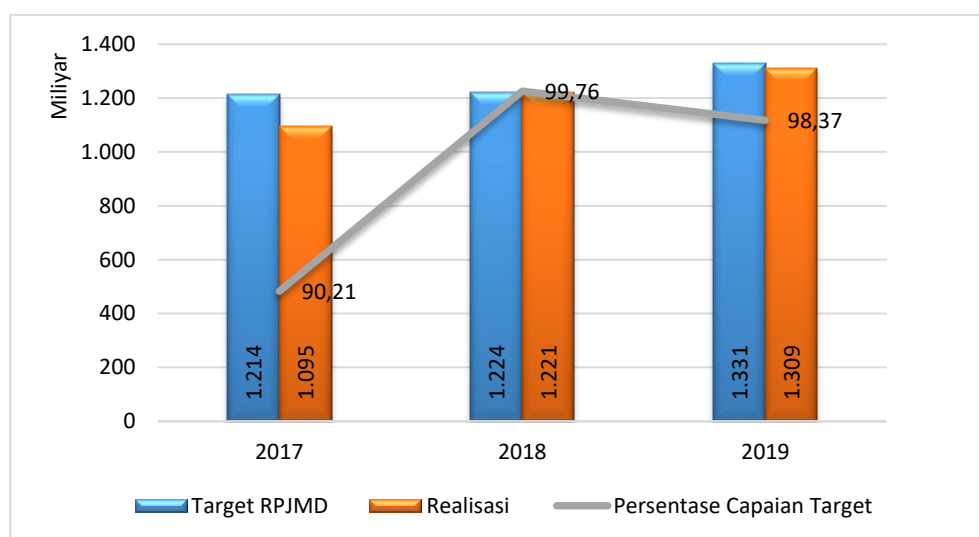
*) Realisasi 2019 unaudited

Gambar 3.1. Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang cukup baik. Dilihat dari persentase realiasi capaiannya terhadap target RPJMD dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terlihat terus mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2017 persentase capaian realiasi sebesar 94, 63% naik 5,52% pada tahun menjadi 100,15%. Selanjutnya pada tahun 2019 realiasi pendapatan mengalami kenaikan 11,54% menjadi 111,69%. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2019 realisasi pendapat telah melampaui target RPJMD.

Berbeda dengan perkembangan realisasi pendapatan daerah, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 hingga 2019 justru dibawah target RPJMD. Realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.094.788.614.305,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.213.610.561.052,- dengan realisasi capaian sebesar 90,21%. Selanjutnya realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp.1.220.768.246.945,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.223.732.043.960,- dengan persentase realisasi capaian 99,76%. Pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp.1.309.216.569.140,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.330.934.087.038,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 98,37%. Jika dilihat secara lebih dalam dari tahun 2017-2019 persentase realisasi capaian PAD terhadap target RPJMD masih belum mencapai 100%. Secara lebih rinci perkembangan

realisasi PAD Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.



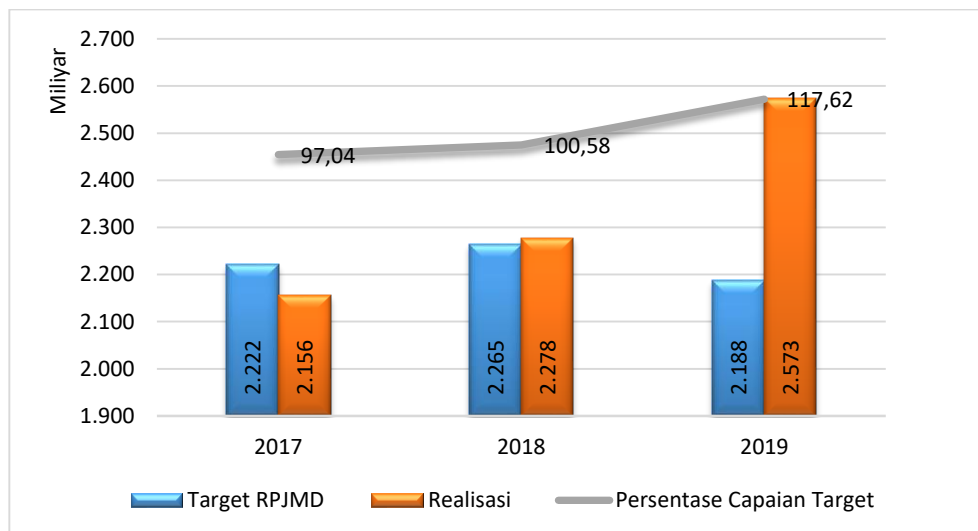
*) Realisasi 2019 unaudited

Gambar 3.2. Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Perkembangan realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target RPJMD terlihat mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2017 persentase realisasi PAD sebesar 90,21% meningkat sebesar 9,55% menjadi 99,76%. Selanjutnya pada tahun 2018 persentase realisasi PAD justru mengalami penurunan sebesar 1,39% menjadi 98,37%. Jika dilihat lebih dalam realisasi PAD terhadap target RPJMD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, melihat hal tersebut perlu adanya perhatian khusus pemerintah daerah untuk meningkatkan ketercapaian PAD terhadap target RPJMD.

Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami perkembangan fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 realisasi dana perimbangan sebesar Rp.2.156.268.926.062,- dari target RPJMD sebesar Rp. 2.222.149.091.241,- sehingga persentase capaian realisasi hanya sebesar 97,04%. Namun kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2018, realisasi dana perimbangan naik menjadi Rp2.278.002.977.357,- melampaui target RPJMD yang hanya sebesar Rp. 2.264.839.698.660,- persentase realisasi capaian sebesar 100,58%. Pada tahun 2019

realisasi capaian sebesar Rp.2.573.155.268.205,- melampau target RPJMD sebesar Rp2.187.676.024.074,- dengan persentase realisasi capaian 11762%.Perkembangan capaian realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.3 dibawah ini



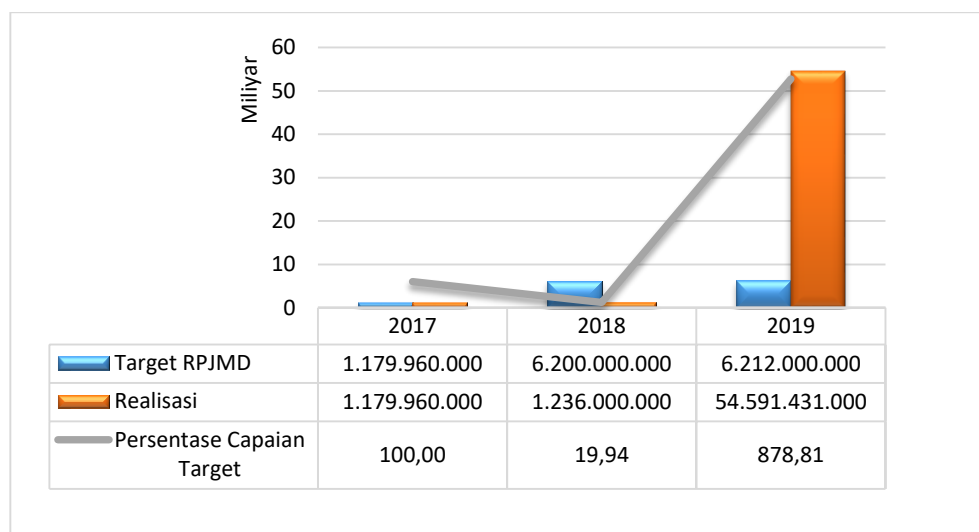
**) Realisasi 2019 unaudited*

Gambar 3.3. Perbandingan dan Persentase Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Selaras dengan realisasi Dana Perimbangan yang mengalami perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat persentase realisasi dana perimbangan sebesar 97,04% kemudian naik 3,54% menjadi 100,58%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase realisasi dana perimbangan meningkat lagi sebesar 17,04% menjadi 117,62%. Melihat data tersebut pada tahun 2018 dan 2019 realisasi dana perimbangan telah melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan.

Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2017-2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.1.179.960.000,- dari target RPJMD sebesar Rp1.179.960.000,- dengan persentase realisasi capaian 100%. Selanjutnya pada tahun 2017 lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan yang cukup drastis hanya sebesar Rp. 1.236.000.000,- dari target RPJMD Rp.6.200.000.000,- sehingga persentase realisasi capaian hanya sebesar 19,94%. Namun di tahun 2019 realisasinya meningkat menjadi Rp.54.591.431.000,- dari target RPJMD sebesar Rp. 6.212.000.000,- sehingga

realisasinya sebesar 878,81%. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Gambar 3.4 dibawah ini.



**) Realisasi 2019 unaudited*

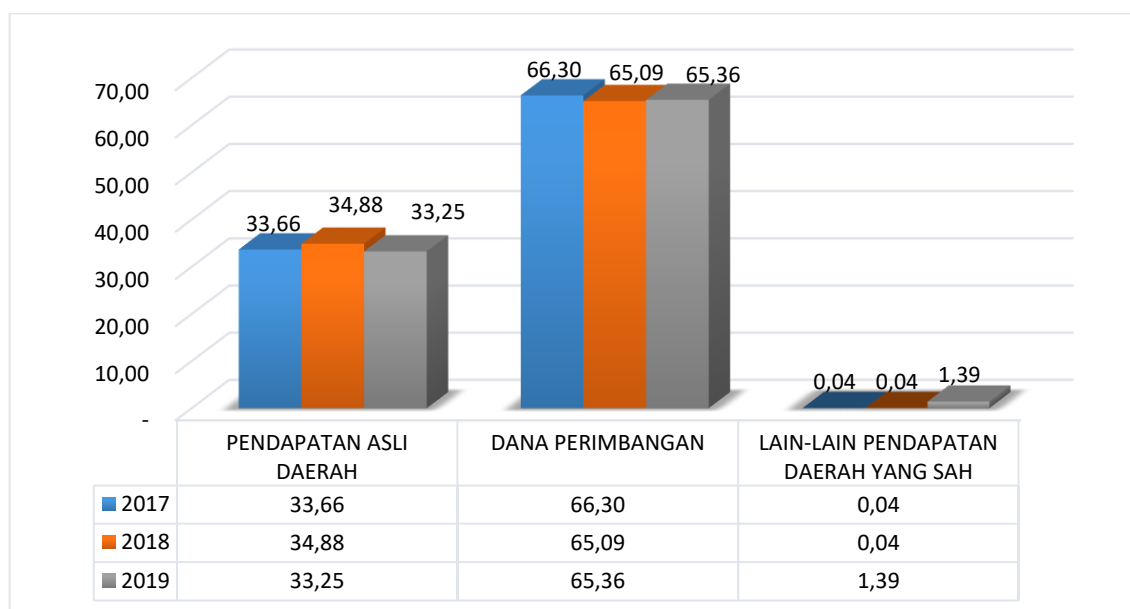
Gambar 3.4. Perbandingan dan Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Perkembangan persentase lain-lain pendapatan yang sah mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase capaian lain-lain pendapatan yang sah di provinsi Kepulauan Riau sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun pada tahun 2018 realisasi lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan drastis jauh dari target yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar 19,94%. Kemudian pada tahun 2019 realisasi lain-lain pendapatan yang sah naik drastis menjadi sebesar 878,81% sangat melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dilihat dari perkembangannya kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah masih di dominasi oleh dana perimbangan sejak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 kontribusi Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah sebesar 66,30% sedangkan kontribusi PAS hanya 33,66% dan kontribusi dana lain-lain yang sah sebesar 0,04%. Hal yang serupa juga dialami pada tahun 2018 dimana kontribusi dana perimbangan jauh lebih tinggi dari kontribusi PAD dan pendapatan lain-lain yang sah yakni sebanyak 65,09% sedangkan kontribusi PAD sebesar 34,88% dan kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,04%. Kondisi pada tahun 2019 juga sama dengan tahun sebelumnya dengan

kontribusi dana perimbangan sebesar 65,36% sedangkan kontribusi PAD 33,25% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,339%.

Jika dilihat lebih rinci perkembangan PAD Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2017-2019 mengalami perimbangan yang fluktuatif cenderung menurun dari 33,66% di tahun 2017 meningkat menjadi 34,88% di tahun 2018 dan turun menjadi 33,25% di tahun 2019. Kondisi tersebut menggambarkan belum optimalnya kemandirian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui kontribusi PAD. Masih perlu penggalan potensi PAD untuk mendorong peningkatan sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah yang lebih besar. Secara lebih rinci perkembangan kontribusi komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5. Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 (%)

Pencapaian target kinerja pendapatan daerah tahun 2017-2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019		% Capaian Target
		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi (<i>un-audited</i>)	
4	PENDAPATAN	3.436.939.612.293	3.252.237.500.367	100	3.494.771.742.620	.500.007.224.302	100	3.524.822.111.112	3.936.963.268.345	100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.213.610.561.052	1.094.788.614.305	33,66	1.223.732.043.960	1.220.768.246.945	34,88	1.330.934.087.038	1.309.216.569.140	33,25
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.010.684.761.682	980.678.289.919	83,28	1.063.247.043.960	1.099.143.753.068	90,04	1.137.274.337.038	1.185.272.421.309	90,53
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	63.160.000.000	3.186.407.550	5,20	73.405.000.000	13.542.397.410	1,11	100.359.250.000	7.173.968.960	0,55
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.107.652.171	3.107.652.171	0,26	3.150.000.000	3.095.498.858	0,25	3.307.500.000	2.840.763.340	0,07
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.658.147.199	107.816.264.665	11,26	83.930.000.000	104.986.597.609	8,60	89.993.000.000	113.929.415.531	8,70
4.2	DANA PERIMBANGAN	2.222.149.091.241	2.156.268.926.062	66,30	2.264.839.698.660	2.278.002.977.357	65,09	2.187.676.024.074	2.573.155.268.205	65,36
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	575.087.704.241	526.669.661.632	25,88	427.801.584.810	537.458.002.746	23,59	373.831.670.044	737.447.035.580	28,66
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.059.822.693.000	1.059.822.693.000	47,69	1.257.386.100.000	1.150.516.796.000	50,51	1.185.032.299.880	1.190.057.596.000	46,25
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	587.238.694.000	569.776.571.430	26,43	579.652.013.850	590.028.178.611	25,90	628.812.054.150	645.650.636.625	25,09
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.179.960.000	1.179.960.000	0,04	6.200.000.000	1.236.000.000	0,04	6.212.000.000	54.591.431.000	1,39
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.179.960.000	1.179.960.000	100	1.200.000.000	1.236.000.000	100	1.212.000.000	1.284.000.000	2,35
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	5.000.000.00	-	-	5.000.000.000	53.307.431.000	97,65

NO	URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019		% Capaian Target
		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi (<i>un-audited</i>)	
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain yakni:

- 1) Rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, sebagaimana terlihat dari realisasi denda pajak kendaraan yang cukup besar.
- 2) Rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak karena jauhnya lokasi pembayaran dengan tempat tinggal, khususnya masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Dengan pertimbangan biaya transportasi lebih besar dari pada jumlah pajak terutang, kebanyakan masyarakat enggan membayar pajak.
- 3) Keterbatasan pelayanan SAMSAT dalam menjangkau wilayah pulau-pulau kecil karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia, baik sumberdaya manusia dari BP2RD maupun dari Pihak Kepolisian dan Jasa Raharja.
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan retribusi daerah.
- 5) Belum terealisasinya pendapatan retribusi daerah dari sektor labuh tambat yang disebabkan masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan ketentuan–ketentuan terkait dengan mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi labuh tambat, baik dalam tataran teknis maupun administratif.
- 6) Manajemen BUMD belum optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi laba perusahaan terhadap PAD.

Selanjutnya upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah

- 1) Melakukan kajian secara komprehensif tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah agar data potensi dapat dihitung secara akurat.
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran pajak dengan menambah kantor samsat keliling, samsat bergerak (berkantor pada tiap-tiap kantor kecamatan), pembayaran dengan online system danmengupayakan kerjasama pembayaran pajak melalui perbankan.
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM personil pemungutan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perangkat daerah Penghasil dalam menggali penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 4) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka mengupayakan potensi retribusi baru.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat khususnya yang berkenaan dengan teknis setoran penerimaan Dana Perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Analisis Belanja Daerah

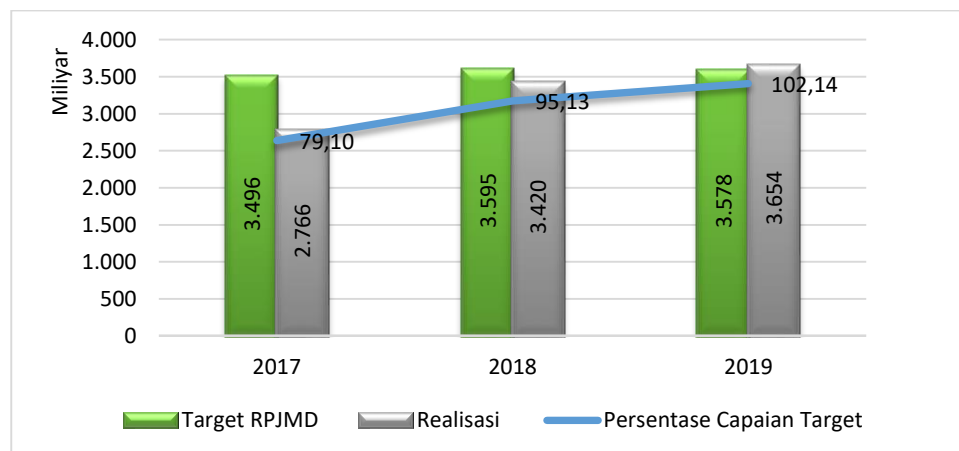
Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah juga dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung diutamakan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas utama seperti: Belanja Gaji Pegawai; Belanja Bunga; dan Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota. Selanjutnya dialokasikan belanja tidak langsung lainnya seperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung diprioritaskan untuk pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah, selanjutnya dialokasikan untuk pelaksanaan Program Prioritas ditingkat perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar, dan mendukung prioritas pembangunan nasional di Provinsi kepulauan Riau.

Realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2018 diketahui tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun pada tahun 2019 realisasi belanja melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi belanja daerah tahun 2017 tercatat hanya sebesar Rp.2.765.620.839.246,- dari target RPJMD sebesar Rp.3.496.355.277.049,- dengan persentase capaian sebesar 79,10%. Selain itu realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp.3.419.789.812.825,- juga tidak melampaui target RPJMD sebesar Rp. 3.594.771.742.620,- dengan persentase capaian sebesar 95,130%. Namun pada tahun 2019 **belanja** daerah provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 3.654.127.240.554,- justru melebihi target Belanja dalam RPJMD sebesar Rp. 3.577.558.809.948,- dengan persentase capaian sebesar 102,14%. Kinerja belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.

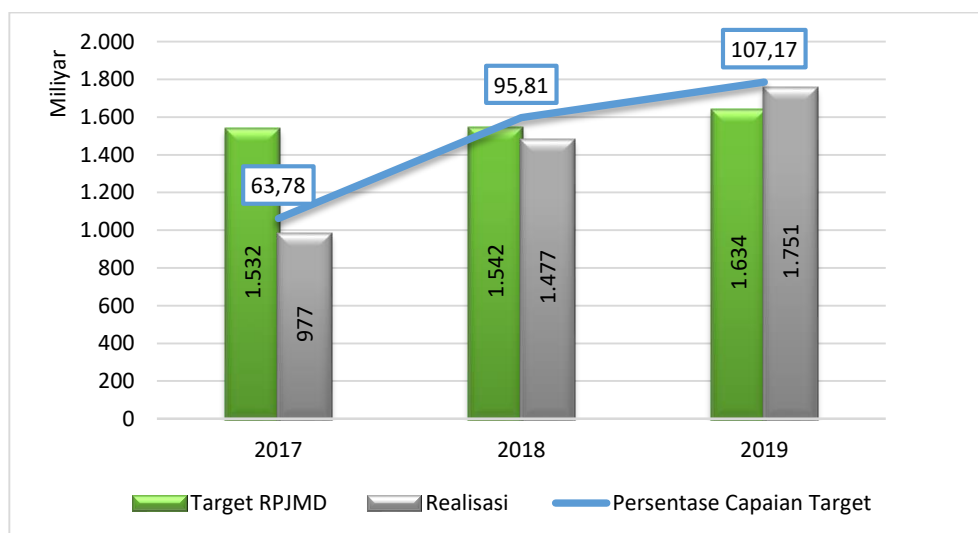


**) Realisasi 2019 unaudited*

Gambar 3.6. Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2017-2019 selaras dengan kondisi realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah diuraikan diatas. Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.976.923.642.903,- masih dibawah target RPJMD sebesar Rp.1.531.730.457.152,- dengan persentase realisasi sebesar

63,78%. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2018 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.1.476.940.711.850,- tidak melampaui target RPJMD sebesar Rp.1.541.500.483.956,- dengan persentase realisasi 95,81%. Namun pada tahun 2019 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.751.270.645.320,- melampaui target RPJMD sebesar Rp.1.634.140.542.086,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 107,71%. Kinerja belanja tidak langsung Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.

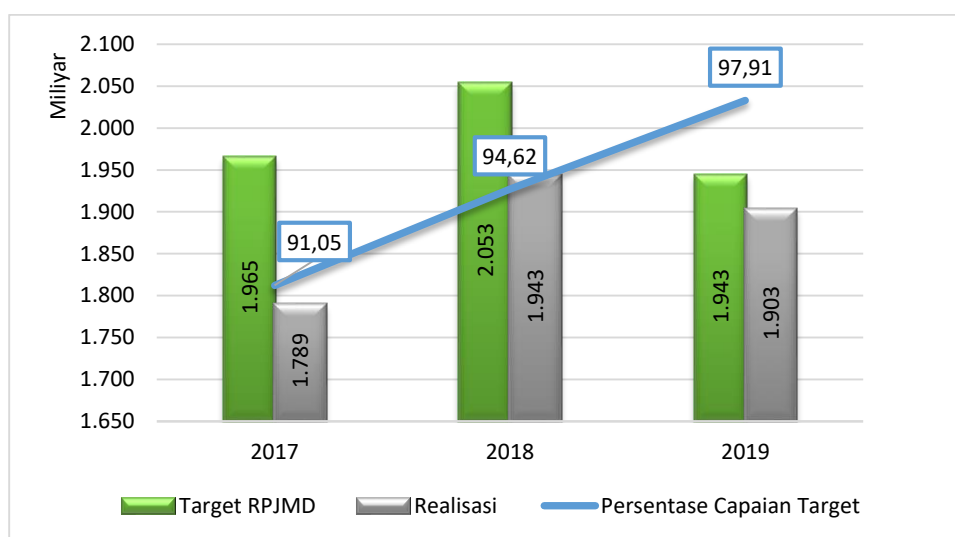


**) Realisasi 2019 unaudited*

Gambar 3.7. Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2019 menunjukkan tren yang positif karena tidak melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tercatat realisasi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.1.788.697.196.343,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.964.624.819.897,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 91,05%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi belanja langsung Prov. Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.942.849.100.975,- dari target RPJMD sebesar Rp.2.053.271.258.664,- dengan persentase realisasi sebesar 94,62%. Sedangkan tahun 2019 realisasi belanja langsung Prov. Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi Rp.1.902.856.595.234,- masih di bawah target RPJMD sebesar Rp. 1.943.418.267.862,-

dengan persentase realisasi sebesar 97,91%. Kinerja belanja langsung Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini.



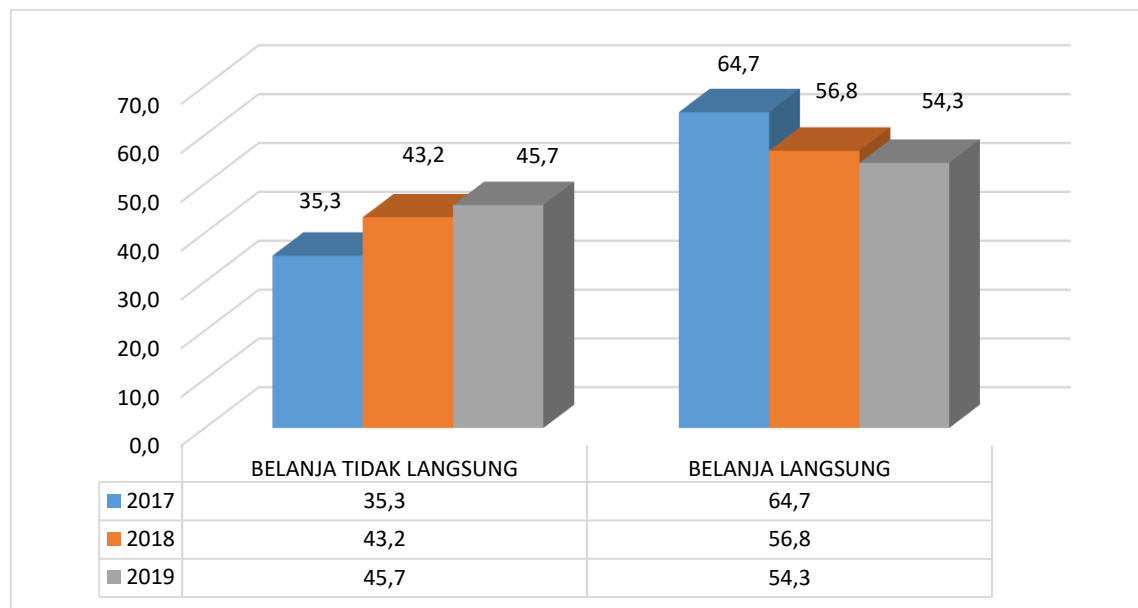
**) Realisasi 2019 unaudited*

Gambar 3.8. Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Dilihat dari perkembangannya persentase terbesar dalam Belanja Daerah sejak tahun 2017 sampaitahun 2019 di dominasi oleh belanja langsung. Tercatat pada tahun 2017 kontribusi belanja langsung dalam belnaja daerah sebesar 64,7% sedangkan belanja tidak langsung sebesar 35,4%. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2018 persentase belanja langsung sebesar 56,8% lebih besar dari persentase belanja langsung yang hanya sebesar 43,2%. Demikian pula pada tahun 2019 persentase belanja langsung sebesar 54,3% lebih besar dari belanja tidak langsung sebesar 45,7%.

Jika dilihat lebih rinci perkembangan belanja langsung dari tahun 2017-2019 justru mengalami penurunan, dari tahun 2017 sebesar 64,7% menjadi 54,3% di tahun 2019. Sebaliknya persentase belanja tidak langsung justru mengalami peningkatan dari 35,3% meningkat menjadi 45,7%. Peningkatan persentase belanja tidak langsung dari tahun ketahun cenderung menggambarkan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau semakin memprioritaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui komponen

pembiayaan belanja tidak langsung. Secara lebih rinci perkembangan proporsi komponen belanja daerah dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini.



Gambar 3.9. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 (%)

Pencapaian target kinerja belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019 (un-audited)		% Capaian Target
		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
5	BELANJA	3.496.355.277.049	2.765.620.839.246	79,10	3.594.771.742.620	3.419.789.812.825	95,13	3.577.558.809.948	3.654.127.240.554	102,14
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.531.730.457.152	976.923.642.903	63,78	1.541.500.483.956	1.476.940.711.850	95,81	1.634.140.542.086	1.751.270.645.320	107,17
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	624.083.062.586	597.535.331.194	95,75	643.452.493.660	655.515.795.402	101,87	684.378.517.502	871.016.049.456	127,27
5 . 1 . 2	Belanja Subsidi									
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	392.445.700.000	374.190.338.250	95,35	421.250.990.850	345.516.286.200	82,02	421.601.323.134	376.030.275.000	89,19
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	6.172.000.000	3.393.999.827	54,99	2.485.000.000	2.510.000.000	101,01	13.658.565.862	1.619.120.000	11,85
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	487.555.320.934	-	-	472.311.999.446	471.497.381.616	99,83	499.840.148.529	500.921.438.771	100,22
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	20.974.373.632	1.645.873.632	7,85	-	1.645.873.632	100,00	12.661.987.059	1.683.762.093	13,30
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	158.100.000	31,62	2.000.000.000	255.375.000	12,77	2.000.000.000	-	-
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.964.624.819.897	1.788.697.196.343	91,05	2.053.271.258.664	1.942.849.100.975	94,62	1.943.418.267.862	1.902.856.595.234	97,91
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	232.588.299.601	221.252.012.792	95,13	459.556.645.756	245.365.462.096	53,39	252.644.374.822	127.134.600.087	50,32
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.236.397.079	1.071.719.274.530	92,69	910.640.367.669	1.077.427.074.676	118,32	1.232.127.181.825	1.141.220.815.946	92,62
5 . 2 . 3	Belanja Modal	575.800.123.217	495.725.909.021	86,09	683.074.245.239	620.056.564.204	90,77	458.646.711.215	634.501.179.200	138,34
	SURPLUS / DEFISIT	(59.415.664.756)	20.261.283.172	(34,10)	(100.000.000.000)	80.217.411.477	(80,22)	(52.736.698.837)	282.836.027.791	(536,32)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Keterlambatan penetapan pejabat pelaksana kegiatan, sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
- b) Keterlambatan pelaksanaan lelang atau kegagalan lelang sehingga menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- c) Pemenuhan persyaratan administratif hibah dan bantuan sosial yang tidak lengkap.
- d) Adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh sub kontraktor, bukan langsung oleh pemenang lelang.
- e) Pembayaran kegiatan fisik kontraktual yang menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Mempertajam aspek perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang penting dan strategis tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi rasionalisasi anggaran.
- 2. Menganggarkan kembali kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- 3. Melakukan penetapan APBD-P lebih cepat, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
- 4. Meningkatkan proses pelelangan barang/jasa pada awal tahun, dan menerapkan disiplin anggaran.
- 5. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan.

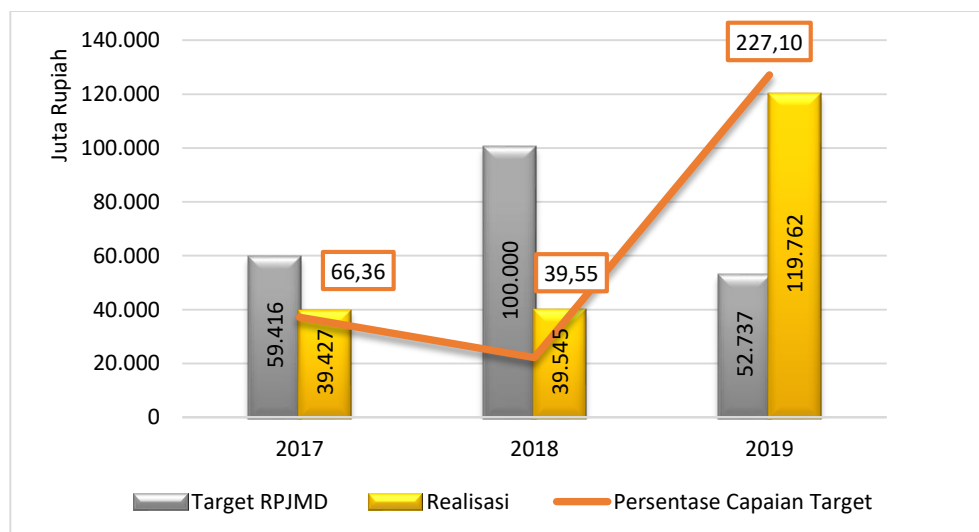
C. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Penyertaan Modal

Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan.

Dalam RPJMD, penerimaan pembiayaan direncanakan terutama berasal dari Pencairan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020. Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal dan memperkuat share permodalan pada BUMD.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2017 dalam RPJMD direncanakan sebesar Rp.59.415.664.756,- dengan realisasi sebesar Rp.39.427.248.919,- (66,36%). Selanjutnya pada tahun 2018 penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan dalam RPJMD sebesar Rp. 100.000.000.000,- namun hanya terealisasi Rp.39.545.040.828,- (39,55%). Namun pada tahun 2019 penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 119.762.452.305,- dari target RPJMD sebesar Rp. 52.736.698.837,- (227,10%). Secara lebih rinci realisasi target penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.10 dibawah ini.

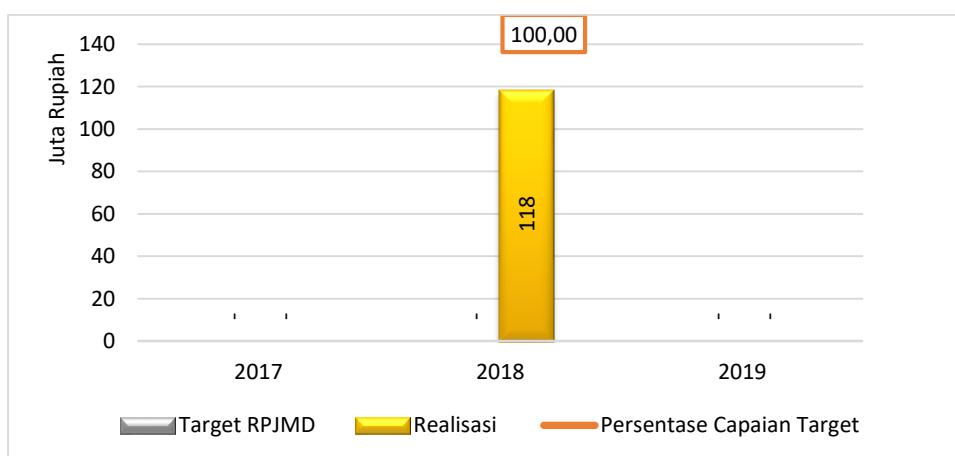


*) Realisasi 2019 unaudited

Gambar 3.10. Perbandingan dan Persentase Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan daerah di dalam RPJMD di targetkan memiliki realisasi Rp.0 dari tahun 2017-2019, namun berdasarkan data capaian pada tahun 2018 terdapat

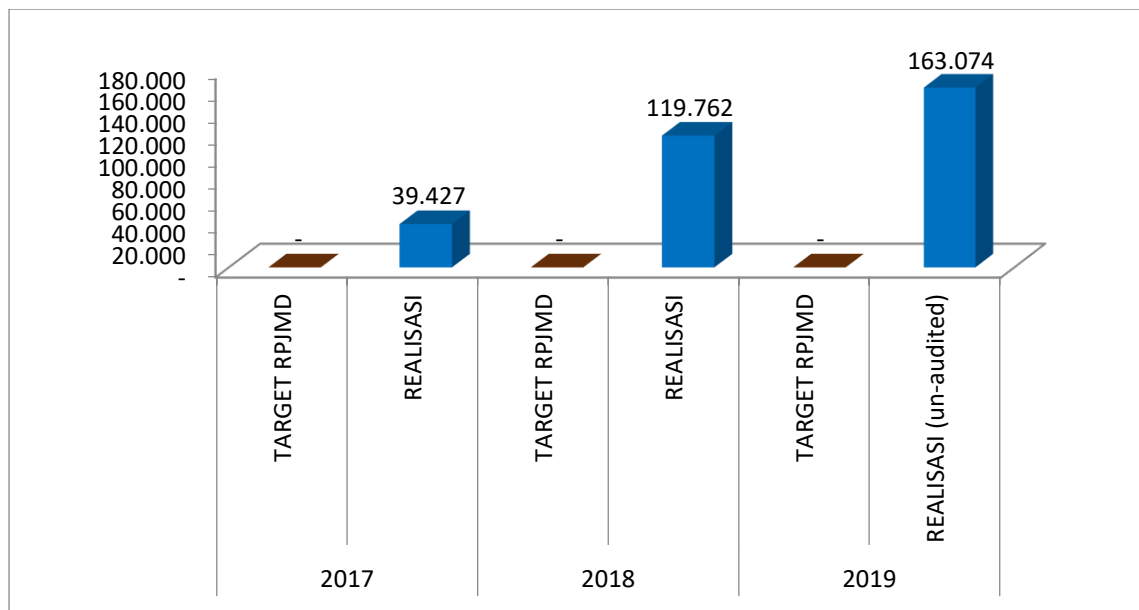
pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.117.791.909,- yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Secara lebih rinci perkembangan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini.



**) Realisasi 2019 unaudited*

Gambar 3.11. Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)

Pada tahun 2016 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) direncanakan mengalami kekuarangan sebesar Rp.118.831.329.512,- namun pada realisasinya justru pada tahun 2017 mengalami kelebihan sebesar Rp. 39.427.248.919,- Selanjutnya hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018 dimana silpa diperkirakan kurang Rp.200.000.000.000,- justru malah mengalami kelebihan sebesar Rp. 40.672.370.649,- pada tahun 2019 juga terjadi hal yang sama dimana di dalam RPJMD di targetkan silpa kurang sebesar Rp.105.473.397.674,- justru mengalami kelebihan sebesar Rp.163.073.575.486,- Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) karena ada penghematan anggaran, dan pelampauan pendapatan daerah. Perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.12 dibawah ini.



Gambar 3.12. Perbandingan dan Persentase Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)

Pencapaian target kinerja pembiayaan daerah tahun 2017-2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019 (<i>un-audited</i>)		% Capaian Target
		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.415.664.756	9.427.248.919	66,36	100.000.000.000	39.545.040.828	39,55	52.736.698.837	119.762.452.305	227,10
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.415.664.756	9.427.248.919	66,36	100.000.000.000	39.427.248.919	39,43	52.736.698.837	119.762.452.305	227,10
6 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	117.791.909	100,00	-	-	-
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	117.791.909	100,00	-	-	-
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	117.791.909	100,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	59.415.664.756	9.688.532.091	100,46	100.000.000.000	39.545.040.828	39,55	52.736.698.837	119.762.452.305	227,10
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	9.427.248.919	100,00	-	119.762.452.305	100,00	-	163.073.575.486	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

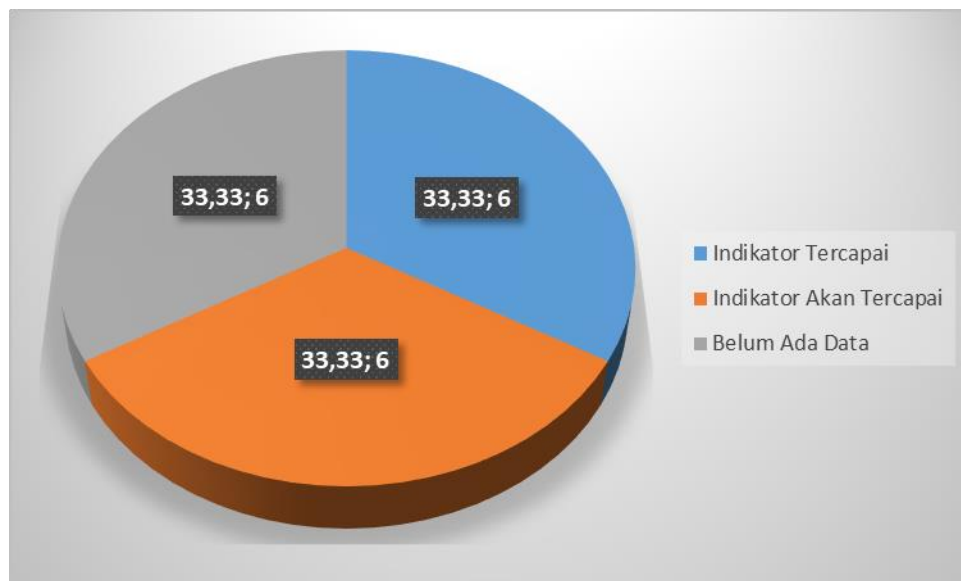
BAB IV

EVALUASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU SAMPAI TAHUN 2019

A. Evaluasi Indikator Kinerja Tujuan

Sampai tahun 2019, upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai target capaian indikator kinerja telah berjalan, dan sebagian tingkat capaiannya berada pada posisi akan tercapai. Terdapat 18 indikator dalam rumusan tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau (dengan catatan terdapat 1 indikator yang dijadikan tolok ukur 2 tujuan, yakni Pertumbuhan Ekonomi).

Dalam perumusan evaluasi RPJMD terhadap tujuan, kategori yang dipakai ada 3 yakni **telah tercapai**, **akan tercapai** dan **memerlukan upaya keras**. Untuk capaian indikator tujuan diketahui bahwa masing-masing 6 indikator masuk dalam kategori telah tercapai dan akan tercapai. Serta 6 indikator masih belum dapat diukur karena datanya belum tersedia.



Gambar 4.1. Tingkat Ketercapaian Indikator Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019

Secara rinci capaian masing-masing indikator tujuan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1, Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-Nilai Agama

Indikator dari tujuan ini adalah Tingkat Kelestarian Budaya Melayu dan Indeks kerukunan antar umat beragama, capaian kinerja indikator sampai tahun 2019 belum dapat diketahui karena belum tersedia data.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Tujuan 1, Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Tingkat Kelestarian Budaya Melayu (%)	11,16	NA	NA	NA	48,41	-	-
2. Indeks kerukunan antar umat beragama (%)	67,9	NA	NA	NA	70,00	-	-

2. Tujuan 2, Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat.

Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2019 realisasi kinerjanya belum dapat diketahui karena ketiadaan data.

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Indeks Demokrasi Indonesia (%)	72,84	NA	NA	NA	75,00	-	-

3. Meningkatkan Keterhubungan Antar Kabupaten/Kota

Tujuan ketiga, keberhasilannya dapat diukur dari ketercapaian indikator Tingkat Konektivitas antar kab/kota. Tingkat capaian indikator ini belum dapat diketahui hasilnya karena ada perbedaan satuan dari data yang ada. Indikator tingkat konektivitas antar kab/kota pada dokumen RPJMD memiliki satuan hitung persen (%), akan tetapi pada realisasinya memakai satuan panjang kilometer (km). Hal tersebut menjadikan tidak bisa dilakukan penghitungan atas tingkat ketercapaian targetnya.

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan Keterhubungan Antar Kabupaten/Kota
Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Tingkat Konektivitas antar kab/kota ((panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis) (%))	60,88	6,97	16,2	25,96 (km)	95	-	-

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Keberhasilan tujuan keempat diukur dari tercapainya target dari indikator Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan). Untuk indikator ini, tingkat realisasi tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2021 statusnya diperkirakan akan mampu mencapai target di akhir periode karena sampai tahun 2019 realisasinya sudah mencapai 69,43% dari target yang ditetapkan. Selain itu, setiap tahun capaian target ini juga mengalami tren yang meningkat.

Tabel 4.4
Capaian Kinerja Tujuan 4, Cakupan Pelayanan Sanitasi (Air Limbah Perkotaan, Drainase, Persampahan) Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) (%)	65,21	58,22	61,01	61,44	88,49	69,43	

5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia

Terdapat 2 indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan tujuan 5, yaitu Indeks Pendidikan dalam IPM dan Tingkat Penangguran Terbuka (TPT). Dari 2 indikator tersebut, 1 indikator (Tingkat Pengangguran Terbuka) sudah mampu mencapai target yang diharapkan, dengan tingkat capaian sebesar 101,71% dari target akhir RPJMD. Indikator ini mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun yang artinya TPT semakin menurun dan hal tersebut menunjukkan tren yang positif. Sedangkan untuk indikator Indeks Pendidikan dalam IP, masih belum bisa diketahui tingkat capaian dan trennya karena belum tersedia data. Secara rinci capaian masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Indeks Pendidikan dalam IPM (indeks)	0,67	NA	NA	NA	0,72	-	-
2. Tingkat pengangguran	7,69 (2016)	7,16	7,12	6,91	7,03	101,71	

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
Terbuka (TPT)(%)							

6. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini diperkirakan akan mampu mencapai target di akhir periode RPJMD karena trennya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan tingkat capaian target pada tahun 2019 sebesar 99,15%. Realisasi kinerja IPM sebesar 74,55 pada tahun 2019, sedangkan target di 2021 adalah 99,15.

Tabel 4.6
Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	73,99	74,23	74,55	NA	75,19	99,15	

7. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua alat ukur (indikator) untuk melihat keberhasilan dari pencapaian tujuan nomor 7. Tingkat realisasi kinerja untuk IPG pada tahun 2018 sebesar 92,97. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yang sebesar 94,75 maka hasilnya adalah 98,12%. Dengan demikian status kinerja indikator ini adalah akan mampu tercapai di akhir periode, karena jika dilihat trennya, capaian indikator ini juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk IDG, capaian sampai tahun 2019 realisasinya sudah mampu mencapai 105,88% dari target tahun 2021. Dengan demikian maka target RPJMD dari indikator ini sudah tercapai di

tahun 2018, tinggal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya kegiatan untuk menjaga supaya angka-angka IDG tetap meningkat setiap tahunnya.

Tabel 4.7
Capaian Kinerja Tujuan I, Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	93,20	92,96	92,97	NA	94,75	98,12	
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	60,79	66,96	66,18	NA	62,5	105,88	

8. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Pariwisata dan Kemaritiman

Indikator keberhasilan tujuan nomor 8 adalah Nilai Tukar Nelayan dan Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan. Pada tahun 2019, angkanya sudah berada di 117,42%. Adapun target akhir RPJMD pada tahun 2021 untuk Nilai Tukar Nelayan adalah 110,57%, artinya pada tahun 2019 target untuk indikator ini sudah mampu tercapai dengan tingkat capaian sebesar 106,19%. Tren Nilai Tukar Nelayan tiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk indikator persentase kenaikan kunjungan wisatawan belum dapat diketahui hasilnya karena belum tersedia data.

Tabel 4.8
Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Pariwisata dan Kemaritiman Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Nilai Tukar Nelayan (%)	109,36	110,7	115,26	117,42	110,57	106,19	
2. Persentase kenaikan	3,04	NA	NA	NA	23	-	-

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
kunjungan wisatawan (%)					(dari tahun 2016)		

9. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan nomor 9. Target tahun 2021 untuk NTP adalah 100%, dan pada tahun 2019 capaiannya sudah berada di angka 101,41%. Dari perbandingan tersebut maka target untuk indikator NTP sudah tercapai di tahun 2019 dengan tingkat realisasi sebesar 101,41%. Tren pencapaian indikator NTP juga meningkat meskipun kondisinya fluktuatif. Adapun untuk indikator Skor PPH, statusnya akan mampu dicapai di akhir periode RPJMD tahun 2021. Hal tersebut karena tingkat realisasi target pada tahun 2019 sudah mencapai 95,29%, dan trennya semakin meningkat.

Tabel 4.9

Capaian Kinerja Tujuan I, Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	98,16	97,98	97,02	101,41	100	101,41	
2. Skor pola pangan harapan (skor)	83,8	88,4	87	89,1	93,5	95,29	

10. Menciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif

Untuk mengukur kinerja tujuan nomor 10, perlu dilihat capaian kinerja dari indikator Pertumbuhan Ekonomil. Indikator ini statusnya sampai tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 adalah sudah tercapai, karena nilainya sudah 100%. Target akhir

periode RPJMD untuk indikator ini adalah sebesar 5±1%, dan di tahun 2019 sudah berada di angka 4,66%. Tren pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan positif.

Tabel 4.10
Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan Iklim Ekonomi yang Kondusif Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	2,01	4,56	4,66	5±1	100,00	

11. Meningkatkan Ekspor dan Produktivitas Industri Memanfaatkan Bahan Baku Lokal

Indikator untuk tujuan nomor 11, adalah sama dengan indikator tujuan nomor 10 yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Statusnya juga sudah mencapai target akhir RPJMD, dengan tren meningkat.

Tabel 4.11
Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatkan Ekspor dan Produktivitas Industri Memanfaatkan Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	2,01	4,56	4,66	5±1	100,00	

12. Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 statusnya adalah akan mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2021, karena tingkat realisasi targetnya di tahun 2019 adalah 95,27%. Pada tahun 2017 dan 2018 angka IKLH Provinsi Kepulauan Riau bahkan telah mampu di atas RPJMD tahun 2021, namun di tahun 2019 angkanya turun dan itu berdampak terhadap realisasi capaian terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 4.12
Capaian Kinerja Tujuan I, Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
2. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) (indeks)	66,97	70,19	70,34	66,5	69,8	95,27	

13. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi

Untuk mengetahui bagaimana kualitas reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Tahun 2018 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 64,18, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 75. Dengan demikian maka tingkat ketercapaian target untuk indikator ini sampai tahun 2019 adalah sebesar 85,57%, artinya dengan angkatersebut maka statusnya adalah akan mampu tercapai di akhir periode.

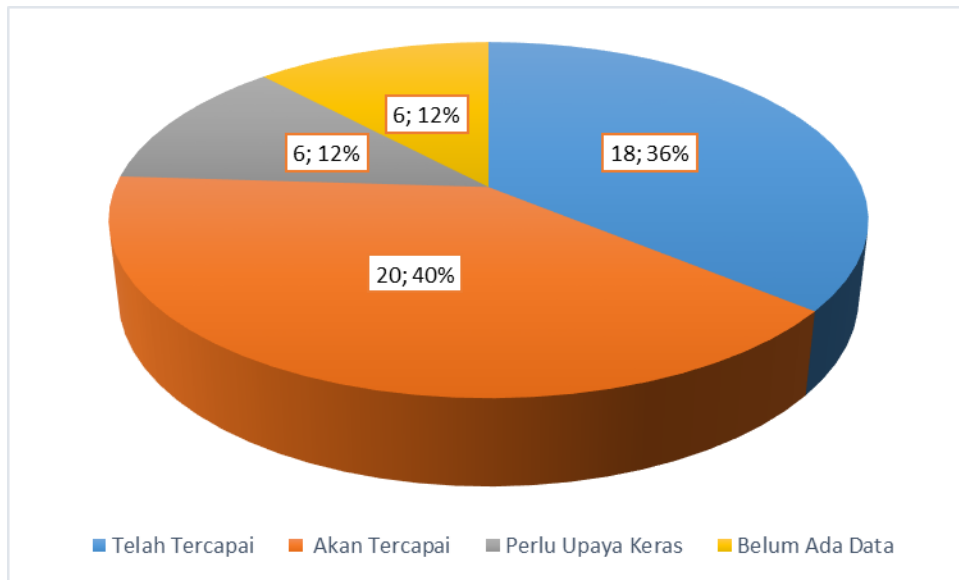
Tabel 4.13
Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Sampai dengan
Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi			Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
		2017	2018	2019			
1. Indeks Reformasi Birokrasi (angka)	41,15	64,18	64,18	NA	75	85,57	

B. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran

Terdapat 50 indikator sasaran yang masuk dalam 24 sasaran dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Dari 50 indikator tersebut, 20 indikator (40%) masuk dalam kategori akan mampu tercapai di akhir periode, kemudian 18 indikator (36%) telah mampu mencapai

target akhir RPJMD, dan masing-masing 6 indikator (12%) masuk kategori memerlukan upaya keras dan belum tersedia datanya.



Gambar 4.2. Tingkat Ketercapaian Indikator Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019

Rincian capaian masing-masing sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran 1; Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.

Sasaran ini memiliki 2 indikator, dimana sampai tahun 2019 terdapat 1 indikator yang diperkirakan mampu mencapai target tahun 2021 dan 1 indikator memerlukan upaya keras untuk pencapaian targetnya. Indikator yang diperkirakan mampu mencapai target adalah Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari, dimana trennya selalu meingkat dari tahun ke tahun. Selain itu, capaian kinerja tahun 2019 yang sebesar 22,03% membuat realisasinya terhadap target akhir tahun 2021 mencapai 98,44% karena target akhir RPJMD adalah sebesar 22,38%. Sedangkan indikator yang memerlukan upaya keras adalah Persentase bangunan yang berciri khas melayu. Meskipun trennya meningkat namun capaian kinerja tahun 2019 hanya 14,32%, sedangkan target akhir RPJMD adalah 70,75%, dengan kata lain tingkat relaisasinya hanya 20,24%.

Tabel 4.14
Capaian Kinerja Sasaran 1, Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase bangunan yang berciri khas melayu (%)	6,02	8,28	16,54	13,44	32,33	14,32	70,75	20,24	
2. Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari (%)	19,58	19,58	20,28	19,93	20,98	22,03	22,38	98,44	

2. Sasaran 2; Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama

Sasaran 2 memiliki 2 indikator, yaitu Persentase Mubaligh yang tersertifikasi dan Persentase santri yang menjadi hafiz. Melihat realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Persentase Mubaligh yang tersertifikasi statusnya masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target akhir karena baru mencapai 50%. Adapun untuk indikator terdapat 3 indikator yang berstatus telah mencapai target indikator tersebut meliputi indikator Persentase santri yang menjadi hafiz belum dapat diketahui hasilnya karena data masih belum tersedia.

Tabel 4.15
Capaian Kinerja Sasaran 2, Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase Mubaligh yang	N/A	N/A	25	25	50	50	100	50,00	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
tersertifikasi (%)									
2. Persentase santri yang menjadi hafiz (%)	20	N/A	40	N/A	60	N/A	100	-	-

3. Sasaran 3; Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat

Terdapat 2 indikator dalam sasaran ke-3 ini yakni Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dan Angka kriminalitas. Indikator Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur meskipun capaian per tahunnya sedikit mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD statusnya masih memerlukan upaya keras. Capaian tahun 2019 hanya 235 kasus, sedangkan target akhir RPJMD adalah 150 kasus, artinya tingkat realisasinya baru 43,33%. Adapun indikator angka kriminalitas belum bisa diketahui hasilnya karena belum tersedia data.

Tabel 4.16
Capaian Kinerja Sasaran 3, Meningkatnya Ketertiban dan Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur (kasus)	250	240	230	240	200	235	150	43,33	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2. Angka kriminalitas (kasus)	4.880	NA	4.875	NA	4.870	NA	4.860	-	-

4. Sasaran 4; Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik

Status indikator persentase jalan provinsi dengan kondisi baik pada tahun 2019 adalah akan mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2021. Tren jalan baik di Provinsi Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Capaian tahun 2019 adalah 73,64%, adapun target akhir RPJMD adalah 75%. Dengan demikian maka tingkat realisasinya sudah mencapai 98,19%.

Tabel 4.17

Capaian Kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	67,97	67,3	69,73	70,31	71,49	73,64	75	98,19	

5. Sasaran 5; Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi

Sasaran kelima RPJMD memiliki 4 indikator sasaran, yakni Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro); Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro); Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut; dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut.

3 dari 4 indikator sasaran ini statusnya akan mampu mencapai target akhir RPJMD, yaitu Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro); Persentase ketersediaan

Kapal Penyeberangan (roro);dan Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut. Sedangkan indikator Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut, statusnya masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.

Tabel 4.18
Capaian Kinerja Sasaran 5, Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi
Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) (%)	71,43	71,43	71,43	71,43	85,71	71,43	100	71,43	
2. Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)(%)	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	88,89	100	88,89	
3. Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut (%)	64,71	58,82	73,53	73,53	82,35	82,35	100	82,35	
4. Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut (%)	55,56	55,56	66,67	55,56	77,78	55,56	100	55,56	

6. Sasaran 6; Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi

Indikator Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan), tingkat realisasi tahun 2019 terhadap target RPJMD tahun 2021 statusnya diperkirakan akan mampu mencapai target di akhir periode karena sampai tahun 2019 realisasinya sudah mencapai 69,43% dari target yang ditetapkan. Selain itu tren capaian per tahunnya juga mengalami peningkatan.

Tabel 4.19
Capaian Kinerja Sasaran 6, Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Sanitasi Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) (%)	68,48	58,22	73,48	61,01	78,48	61,44	88,49	69,43	

7. Sasaran 7; Meningkatnya akses pelayanan air bersih

Sasaran nomor 7 diukur dengan indikator Persentase pelayanan akses air bersih yang aman. Status untuk indikator ini adalah akan mampu dicapai di akhir periode RPJMD, karena tingkat capaian di tahun 2019 sudah sebesar 92,47% dari total 100% target RPJMD di tahun 2021. Trennya juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019.

Tabel 4.20
Capaian Kinerja Sasaran 7, Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase pelayanan akses air bersih yang aman (%)	89,44	89,44	92,19	92,15	96,79	92,47	100	92,47	

8. Sasaran 8; Berkurangnya kawasan kumuh

Sasaran ke-8 diukur dengan indikator luasan kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Luas kawasan kumuh pada tahun 2019 masih seluas 476,85 Hektar, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 255,09 Hektar. Dari data tersebut maka tingkat capaian target akhir RPJMD sampai tahun 2019 baru 13,06%. Dengan demikian maka status untuk indikator ini adalah masih memerlukan upaya keras, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan target tersebut, meskipun jika dilihat dari data tahunan trennya selalu mengalami penurunan.

Tabel 4.21

Capaian Kinerja Sasaran 8, Berkurangnya Kawasan Kumuh Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Luas Kawasan Kumuh (Ha)	752,99	752,62	627,69	529,82	549,53	476,85	255,09	13,06	

9. Sasaran 9; Meningkatnya rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2019 trennya semakin baik karena meningkat. Status capaian tahun 2019 dibandingkan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah akan mampu tercapai dengan tingkat capaian sebesar 99,03% dari target 93,5% di tahun 2021.

Tabel 4.22

Capaian Kinerja Sasaran 9, Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Rasio Elektrifikasi (%)	89,15	91,44	90,5	91,5	91,5	92,59	93,5	99,03	

10. Sasaran 10; Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran 10 RPJMD meliputi 2 indikator sasaran, yakni Rata-rata Lama Sekolah dan Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B. Dilihat dari capaian tahun 2019 dan target akhir RPJMD, kedua indikator masuk dalam status akan mampu tercapai di akhir periode yakni tahun 2021. Angka Rata-rata Lama Sekolah tingkat ketercapaian target sampai tahun 2019 sebesar 93,70%, sedangkan indikator Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B memiliki tingkat ketercapaian 74,40%.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, sedangkan Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B justru mengalami tren yang menurun meskipun fluktuatif.

Tabel 4.23
Capaian Kinerja Sasaran 10, Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,83	9,69	9,99	9,79	10,15	9,81	10,47	93,70	
2. Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B (%)	76	72,81	78	74	80	62,5	84	74,40	

11. Sasaran 11; Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Keberhasilan sasaran 11 RPJMD dapat dilihat dari tingkat ketercapaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. kedua indikator tersebut berstatus akan mampu tercapai di akhir periode RPJMD, dengan tingkat ketercapaian pada tahun 2019 masing-masing adalah 95,52% dan 94,83%.

Tren penurunan dengan kondisi yang fluktuatif dialami oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yakni dari 66,41% di tahun 2017 menjadi 64,76% di tahun 2019.

Sedangkan tren meningkat dialami oleh indikator Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, yakni dari 48,8% di tahun 2017 menjadi 60,69% di tahun 2019.

Tabel 4.24
Capaian Kinerja Sasaran 11, Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,3	66,41	66,68	64,72	67,05	64,76	67,8	95,52	
2. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	56	48,8	58	60,5	60	60,69	64	94,83	

12. Sasaran 12; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran ke-12 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 3 indikator sasaran. Berdasarkan capaian tahun 2019 ketiga indikator sasaran tersebut telah mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2021. Ketiga indikator tersebut Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dengan persentase capaian sebesar 123,43%, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dengan tingkat capaian 156,67%, dan Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dengan persentase capaian sebesar 126,54%.

Tren capaian ketiga indikator tersebut dari tahun 2017 sampai 2019 juga mengalami tren yang membaik karena selalu menurun.

Tabel 4.25
Capaian Kinerja Sasaran 12, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	132	131	131	130	130	98	128	123,43	
2. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	34	18	33	15	32	13	30	156,67	
3. Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita) (%)	17,4	16,4	17,1	13	16,8	11,9	16,2	126,54	

13. Sasaran 13; Angka kemiskinan menurun

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami tren yang semakin membaik karena selalu menurun. Capaian tahun 2017 sebesar 6,13% dan tahun 2019 turun menjadi 5,8%. Capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 97,88% karena target akhir RPJMD adalah sebesar 5,68%. Dengan capaian tersebut maka status untuk indikator ini adalah akan tercapai di akhir periode RPJMD tahun 2021.

Tabel 4.26
Capaian Kinerja Sasaran 13, Angka Kemiskinan Menurun Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase penduduk miskin (%)	6,13	6,13	6,07	5,83	5,98	5,8	5,68	97,88	

14. Sasaran 14; Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran ke-14 memiliki 2 indikator sasaran yakni IPG dan IDG. Pada tahun 2018, capaian indikator IPG adalah 92,97, sedangkan target akhir RPJMD adalah 94,75. Dengan capaian tersebut maka IPG masuk dalam status akan mampu dicapai di akhir periode RPJMD dengan tingkat capaian sebesar 98,12. Adapun untuk indikator IDG, capaian tahun 2018 sebesar 66,18, sedangkan target akhir tahun 2021 adalah 62,5. Artinya dari data tersebut tingkat ketercapaian IDG tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 101,03% dan statusnya adalah sudah tercapai.

Tabel 4.27
Capaian Kinerja Sasaran 14, Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	93,75	92,96	94	92,97	94,25	NA	94,75	98,12	
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	61,5	66,96	61, 8	66,18	62	NA	62,5	101,03	

15. Sasaran 15; Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan

Sasaran 15 memiliki 3 buah indikator, yakni Jumlah Produksi Perikanan Tangkap; Jumlah produksi perikanan budidaya; dan Jumlah produk olahan Hasil perikanan. Indikator tersebut cukup mewakili profil Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah kepulauan.

Dari 3 indikator tersebut, 2 indikator yakni Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah produk olahan Hasil perikanan pada tahun 2019 sudah mampu mencapai target yang diberikan pada akhir periode RPJMD. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 309.287,15 ton, meningkat dari produksi tahun 2017 yang sebesar 304.038,71 ton. Dan capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 306.643 ton, maka tingkat realisasinya sebesar 100,92%. Produksi olahan hasil perikanan tahun 2019 sebesar 1.803,55 ton, menurun jika dibandingkan produksi tahun 2017 yang sebesar 1.902,48 ton. Meskipun demikian, jika disandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 1.331 ton, maka tingkat ketercapaiannya adalah 135,5%. Sedangkan 1 indikator berstatus akan mampu dicapai di akhir periode, yaitu jumlah produksi perikanan budidaya. Tingkat ketercapaiannya sebesar 97,3% dari target akhir. dijabarkan dalam 1 indikator sasaran yakni persentase rata-rata pertumbuhan investasi. Dilihat dari capaiannya tahun 2018 sebesar 129,68% indikator tersebut telah mampu mencapai target akhir RPJMD dengan persentase realisasi capaian sebesar 2.064,42%.

Tabel 4.28

Capaian Kinerja Sasaran 15, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	304.019	304.038,71	304.628	304.975,02	305.239	309.287,15	306.463	100,92	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	33.649	34.302	33.717	34.399, 86	33.785	33.003, 11	33.920	97,30	
3. Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	1.320	1.902,48	1.323	1.336,82	1.326	1.803,55	1.331	135,50	

16. Sasaran 16; Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Indikator dari sasaran ke 16 adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2,07 juta orang, meningkat menjadi 2,86 juta orang di tahun 2019. Artinya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara trennya semakin meningkat. Capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,5 juta orang, maka tingkat capaiannya adalah 114,59% dengan status telah tercapai target akhir RPJMDnya.

Tabel 4.29
Capaian Kinerja Sasaran 16, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	2,2	2,07	2,25	2,63	2,3	2,86	2,5	114,59	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Mancanegara (juta orang)									

17. Sasaran 17; Meningkatnya produksi pertanian

3 indikator dalam sasaran ke-17 (Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura, Jumlah Produksi Tanaman Palawija, dan Jumlah Produksi Padi) dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memiliki status sudah tercapai targetnya. Hal ini dapat diketahui dari capaian tahun 2019 yang sudah berada di atas target akhir tahun 2021 sehingga tingkat capaiannya berada di atas 100% semua.

Jika dilihat dari trennya, maka ada 2 indikator yang trennya semakin meningkat yakni jumlah produksi tanaman komoditas holtikultura dan jumlah produksi padi. Sedangkan untuk indikator jumlah produksi tanaman palawija trennya mengalami penurunan.

Tabel 4.30
Capaian Kinerja Sasaran 17, Meningkatnya Produksi Pertanian Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura (ton)	39.936	40.301	41.692	46.659	43.239	72.654,9	45.822	158,56	
2. Jumlah Produksi Tanaman Palawija (ton)	12.367	19.531,5	12.679	14.957	12.679	14.957	12.742	117,38	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3. Jumlah Produksi Padi (ton)	792	601	850	833	1.020	1167,8	1.020	114,49	

18. Sasaran 18; Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

Sasaran 18 terdiri dari 2 indikator sasaran yakni Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dilihat dari capaian realisasinya, kedua indikator tersebut sudah mampu mencapai target akhir RPJMD di tahun 2019. Tingkat capaian kedua indikator tersebut adalah 107,4% dan 106,66%.

Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen masih di bawah batas yakni 9,26%, sedangkan targetnya adalah <10%. Adapun skor PPH ketersediaan trennya meningkat dari 83,09 di tahun 2017 menjadi 99,19 di tahun 2019.

Tabel 4.31
Capaian Kinerja Sasaran 18, Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (%)	CV < 10	9,2	CV < 10	9,2	CV < 10	9,26	CV < 10	107,40	
2. Skor Pola Pangan Harapan	89	83,09	90	82,29	91	99,19	93	106,66	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
(PPH) ketersediaan (skor)									

19. Sasaran 19; Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM

Indikator sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ke-19 dalam RPJMD adalah jumlah nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing, Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi.

Jumlah nilai realisasi investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 20.450 Miliar Rupiah, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tahun 2019 mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 45.608 Miliar Rupiah, angka tersebut baru mencapai 44,84% dari target. Dengan demikian maka statusnya adalah memerlukan upaya keras dalam pencapaian targetnya. Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), juga mengalami tren yang meningkat. Dari sebesar 1.398 Miliar Rupiah di tahun 2017 menjadi 5.656 Miliar Rupiah di tahun 2019. Angka tahun 2019 ini telah mampu melampaui target akhir RPJMD tahun 2021 yang sebesar 3.993 Miliar Rupiah, atau dengan kata lain tingkat pencapaiannya sudah 141,65% dan sudah mampu mencapai target.

Indikator ketiga yakni Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern atau tersertifikasi, tingkat pencapaian target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 89,21%. Artinya masuk dalam status akan tercapai di akhir periode RPJMD.

Tabel 4.32
Capaian Kinerja Sasaran 19, Meningkatnya Realisasi Investasi dan Daya Saing Koperasi dan UKM Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Miliar)	7.300	13.823	7.500	11.138	7.700	20.450	45.608	44,84	
2. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Miliar)	500	1.398	600	4.385	700	5.656	3.993	141,65	
3. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi (%)	18,5	19,8	19,2	19,3	20,19	19,85	22,25	89,21	

20. Sasaran 20; Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal.

Sasaran ke-19 terdiri dari 2 indikator sasaran, dilihat dari capaiannya di tahun 2019 terdapat 1 indikator berstatus akan mampu mencapai target akhir RPJMD dan 1 indikator lainnya sudah mampu mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang akan mampu mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Jumlah industri berbahan baku lokal dengan

persentase capaian 89,50%. Meskipun beum mampu mencapai target, namun tren capaian untuk indikator ini menunjukkan hasil yang positif karena selalu meningkat.

Sedangkan indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD yakni nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal dengan realisasi capaian sebesar 175,94%. Tren pencapaian indikator ini fluktuatif dengan kondisi terakhir tahun 2019 mengalami penurunan.

Tabel 4.33
Capaian Kinerja Sasaran 20, Meningkatkan Kuantitas Produksi Industri Pengolahan Berbasis Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah industri berbahan baku local (unit)	1.720	1.750	1.850	1.850	1.969	1.969	2.200	89,50	
2. Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal (Juta US \$)	1.258,94	2.915,73	1.332,21	3.034,45	1.405,48	2.727,48	1.550,20	175,94	

21. Sasaran 21; Meningkatkan kinerja sektor perdagangan

Sasaran ini di dukung oleh 1 indikator sasaran, yakni Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaiannya sampai tahun 2019 adalah 9,07%. Capaian tahun 2019 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yang sebesar 8,52%, capaian tahun 2019 sudah berada di atas target yakni sebesar 106,46% dari target. Dengan demikian masuk dalam status telah tercapai target RPJMD.

Tabel 4.34
Capaian Kinerja Sasaran 21, Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,19	7	8,27	8,56	8,35	9,07	8,52	106,46	

22. Sasaran 22; Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan

Sasaran ke-21 memiliki 2 indikator, yakni Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dan Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan.

Indikator Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu pada tahun 2019 mencapai 100%. Dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian tersebut masuk dalam status telah tercapai, karena target akhir periode juga sebesar 100%.

Sedangkan indikator Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan belumdiketahui capaiannya karena belum tersedia data.

Tabel 4.35
Capaian Kinerja Sasaran 22, Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase waduk yang memiliki kualitas air	72,73	80	72,73	66,67	81,82	100	100	100,00	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
sesuai baku mutu (%)									
2. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan (%)	10,37	NA	10,52	NA	10,68	NA	10,99	-	-

23. Sasaran 23; Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Terdapat 5 indikator dalam sasaran ke-23 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Tiga indikator yakni Indeks Profesionalitas Pegawai; Nilai hasil evaluasi SAKIP; dan Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat dianalisa karena belum tersedianya data capaian.

Dua indikator lainnya yakni Nilai Keterbukaan informasi publik, dan Nilai e- government, tingkat capaiannya terhadap target akhir RPJMD berstatus akan dapat tercapai di akhir periode. Capaian masing-masing indikator tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 64,06% dan 96% dari target akhir. Capaian kedua indikator tersebut juga mengalami tren yang meningkat.

Tabel 4.36
Capaian Kinerja Sasaran 23, Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sampai dengan Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Indeks Profesionalitas Pegawai (nilai)	70	NA	72	NA	75	NA	80	-	-
2. Nilai hasil evaluasi SAKIP (kategori)	BB	NA	BB	NA	BB	NA	BB	-	-

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala)	B	NA	B	NA	B	NA	B	-	-
4. Nilai Keterbukaan informasi publik (skala)	62	13,03	63,5	53,87	65	43,24	67,5	64,06	
5. Nilai e-government (skala)	2,1	2,1	2,2	2,1	2,3	2,4	2,5	96,00	

24. Sasaran 24; Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan sasaran ini adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah; Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau; dan Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 telah mampu mencapai target akhir RPJMD karena capaiannya sudah di atas 100%. Sedangkan indikator Realisasi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mampu tercapai target akhir RPJMD pada tahun 2021 karena capaiannya sudah sebesar 80,23% dari target.

Tabel 4.37

Capaian Kinerja Sasaran 24, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel Sampai Dengan Tahun 2019

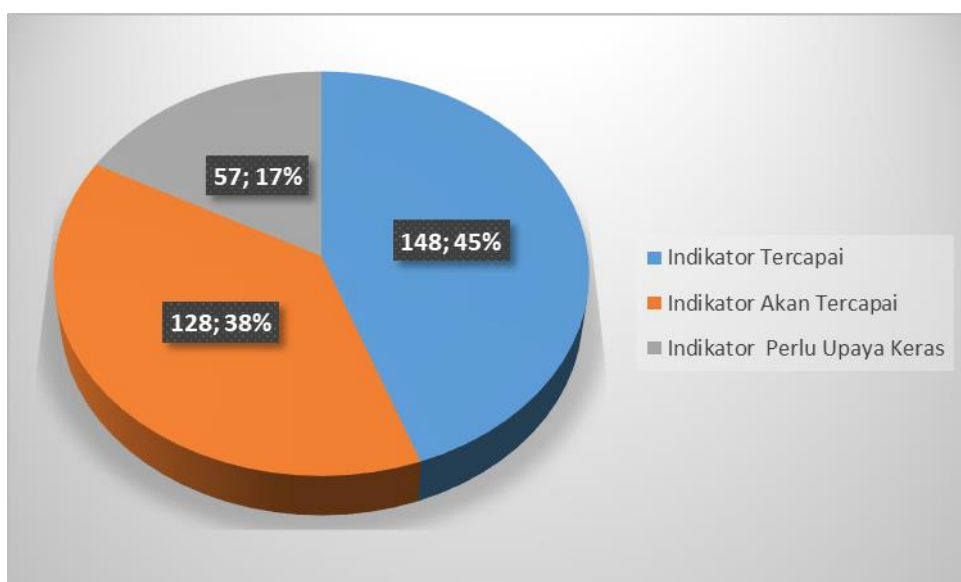
Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja						Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
	2017		2018		2019				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Trilyun Rupiah)	1.213	1.091	1.224	1.229	1.330	1.303	1.624	80,23	
2. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau (opimi)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	
3. Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (level)	3	3	3	6	3	3	3	100,00	

BAB V

EVALUASI KINERJA PROGRAM RPJMD

A. Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintahan

Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 memuat 336 indikator dari seluruh program di masing-masing urusan yang keseluruhannya dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Dari 336 indikator tersebut 148 (45%) di antaranya telah tercapai targetnya di tahun 2019, 128 indikator (38%) statusnya akan tercapai di akhir periode RPJMD, dan 57 (17%) indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target RPJMD.



Gambar 5.1. Tingkat Ketercapaian Indikator Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019

Rincian capaian masing-masing indikator dalam RPJMD tiap urusan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Jumlah Indikator dan Capaian Berdasarkan Urusan

Urusan	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator Perlu Upaya Keras
1. Pendidikan	14	5	8	1
2. Kesehatan	25	24	1	0
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	1	7	4

Urusan	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator Perlu Upaya Keras
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	0	5	1
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11	6	0	5
6. Sosial	18	4	10	4
7. Ketenaga Kerjaan	11	2	8	1
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	5	3	2	0
9. Pangan	6	4	2	0
10. Pertanahan	1	0	0	1
11. Lingkungan Hidup	9	2	7	0
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	0	0
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	2	0	2
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	1	0	1
15. Perhubungan	15	1	10	4
16. Komunikasi dan Informatika	3	1	2	
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5	5	0	0
18. Penanaman Modal	6	3	2	1
19. Kepemudaan dan Olahraga	6	1	0	5
20. Statistik	1	1	0	0
21. Persandian	1	1	0	0
22. Kebudayaan	5	1	2	2
23. Perpustakaan	3	0	3	0
24. Kearsipan	2	0	2	0
25. Kelautan dan Perikanan	10	6	2	2

Urusan	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator Perlu Upaya Keras
26. Pariwisata	7	3	4	0
27. Pertanian	12	6	3	3
28. Kehutanan	5	2	1	2
29. ESDM	9	0	7	2
30. Perdagangan	9	7	2	0
31. Perindustrian	10	1	8	1
32. Transmigrasi	2	0	1	1
33. Penunjang Perencanaan	12	8	4	0
34. Penunjang Penelitian dan Pengembangan	2	0	1	1
35. Penunjang Keuangan	13	6	6	1
36. Penunjang Kepegawaian dan Diklat	6	3	2	1
37. Penunjang Sekretariat DPRD	7	4	1	2
38. Penunjang Sekretariat Daerah	50	24	17	9
39. Penunjang Pengawasan	9	8	1	0
Jumlah	336	148	131	57
Persentase	100,00	44,05	38,99	16,96

Untuk melihat capaian masing-masing indikator program di tiap urusan digambarkan dalam uraian berikut ini.

A. Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan terdiri dari 4 program yang dijabarkan kedalam 14 indikator program yaitu : 1) Angka Rata-rata Lama Sekolah; 2) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK; 3) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB; 4) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK; 5) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK; 6) Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik; 7) Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik; 8) Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK; 9) Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK; 10) Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang

berkualifikasi S1/D4; 11) Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B; 12) Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi; 13) Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha 14) Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK

Realisasi pencapaian target indikator program urusan pendidikan sejak tahun 2017-2019 hampir semua indikator menunjukkan capaian realisasi meningkat yaitu sebanyak 13 indikator. Kenaikan terbesar terdapat pada indikator Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di perguruan tinggi yaitu meningkat menjadi sebesar 56,30% pada tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 43,00%. Hanya terdapat satu indikator yang realisas capaiannya menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu indikator Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B dengan tingkat realisasi capaian sebesar 62,5% pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 72,81%. Capaian pada tahun 2019 juga tidak mencapai target tahun 2019 yaitu sebesar 80%.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK dengan persentase realisasi capaian 102,36%; Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB dengan realisasi capaian 101,41%; Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik dengan realisasi capaian 107,69%; Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik dengan realisasi capaian 111,11% dan Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4 dengan realisasi capaian sebesar 100,11% . Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD sebanyak 8 indikator. Satu indikator yang perlu upaya keraas untuk mencapai target akhir RPJMD yaitu indikator jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK/SLB dengan capaian sebesar 69,81%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pendidikan Menengah dan Khusus										
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,83	9,99	10,15	9,69	9,79	9,81	10,47	93,70	
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	86,00	87,00	88,00	87,11	92,12	92,12	90,00	102,36	
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	68,00	69,00	70,00	70,12	72	72	71,00	101,41	
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	75,50	76,00	76,50	75,87	77,3	77,3	77,50	99,74	
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,46	0,44	0,42	0,44	0,42	0,41	0,38	92,11	
	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	87,00	87,50	88,00	85,1	92,1	95,84	89,00	107,69	
	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	85,00	86,00	88,00	70	94	100	90,00	111,11	
	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	90	50	50	112	60	43	308	13,96	
	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36	1:36	1:36	1:35	1:33	1:33	1:36	96,88	
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	90,00	93,00	94,00	90,15	95,99	96,11	96,00	100,11	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (2018-2021)/ Penggabungan dari 4 Program tahun 2017 yaitu: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Non Formal.										
	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	76,00	78,00	80,00	72,81	74	62,5	84,00	74,40	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan										
	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	30,00	40,00	50,00	35,42	43	56,3	60,00	93,83	
	Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	30,00	40,00	50,00	50	50	56,87	60,00	94,78	
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	54,00	54,20	54,40	53,87	50,59	52,31	54,60	95,81	

2. Kesehatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan terdiri dari 7 program yang dijabarkan kedalam 25 indikator program yaitu : 1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH; 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH; 3) Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita); 4) Cakupan Kabupaten/Kota Sehat; 5) Prevalensi HIV; 6) Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk; 7) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate); 8) Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk; 9) API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk; 10) Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; 11) Prevalensi tekanan darah tinggi; 12) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi; 13) Persentase Puskesmas terakreditasi; 14) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS; 15) Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS) ; 16) Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS) ; 17) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang; 18) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban; 19) Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; 20) Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang; 21) Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang; 22) Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa; 23) Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar; 24) Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan; 25) Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik.

Realisasi pencapaian target indikator program urusan Kesehatan sejak tahun 2017-2019 hampir semua indikator menunjukkan capaian realisasi peningkatan atau penurunan menuju ke arah yang lebih baik. Kenaikan terbesar terdapat pada indikator persentase Cakupan Kabupaten/Kota Sehat yaitu meningkat menjadi sebesar 100,00% pada tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 57,00%. Hanya terdapat satu indikator yang realisas capaiannya menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan tingkat realisasi capaian sebesar 87,9% pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 94,0%. Capaian pada tahun 2019 juga tidak mencapai target tahun 2019 yaitu sebesar 95,11%.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 24 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD sebanyak 1 indikator. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Kesehatan Masyarakat										
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	131	130	98	128	123,44	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	34	33	32	18	15	13	30	156,67	
	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	%	17,4	17,10	16,80	16,4	13	11,9	16,20	126,54	
	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	43	57,00	57,00	57	71	100	70,00	142,86	
2	Program pencegahan dan pengendalian penyakit										
	Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	100,00	
	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	155 (Rata-rata 2015-2016)	160	165	181	177	316	175	180,57	
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	80	81,00	82,00	88	81	87,7	84,00	104,40	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	100 (rata-rata 2015-2016)	97	94	38,2	56	91	88	103,41	
	API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,35	0,33	0,31	0,2	0,14	0,1	0,27	162,96	
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	91,00	92,00	94	91	87,9	94,00	93,51	
	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28.7 (rata-rata 2015-2016)	28,50	28,30	27	27,4	28,2	27,90	101,08	
3	Program pelayanan kesehatan										
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	42,80	42,80	57,14	71,4	100	100	71,40	140,06	
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	12,00	25,00	38,00	19,48	79,3	96,5	70,00	137,86	
	Persentase penduduk dengan kepemilikan	%	65,00	70,00	72,00	71,49	82,58	86,1	85,00	101,29	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Jaminan Kesehatan Nasional/KIS										
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	
4	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan										
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	78,00	78,00	80,00	78	80,42	80,6	80,00	100,75	
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	75,00	76,00	77,00	76,5	80	85,5	80,00	106,88	
5	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan										
	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	56,00	58,00	60,00	50	56,32	77	67,00	114,93	
	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3	%	58,00	60,00	63,00	58	73,68	73,7	70,00	105,29	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Dokter spesialis penunjang										
	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	63,00	65,00	67,00	70,2	84,04	85,7	70,00	122,43	
	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	20,00	45,00	65,00	26,7	53,33	93,3	90,00	103,67	
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan										
	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	78,00	81,00	82,00	88,5	93,1	92	87,00	105,75	
7	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya										
	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Riau dengan nilai kinerja minimal baik										

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 8 program dengan 12 indikator sebagai berikut : 1) Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, 2) Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk; 3) Jumlah titik rawan banjir; 4) Persentase jalan Provinsi berkondisi baik; 5) Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik; 6) Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis); 7) panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi; 8) Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI; 9) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi); 10) Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah; 11) persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya; dan 12) Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase tersediannya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem isigasi pertanian yang sudah ada menunjukkan peningkatan, dari 35,05% tahun 2017 meningkat menjadi 46,5% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 48,64%) menunjukkan status akan tercapai.
- 2) Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk menunjukkan peningkatan, dari 64,82% tahun 2017 meningkat menjadi 73,13%. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 76,10%) menunjukkan status akan tercapai.
- 3) Jumlah titik rawan banjir menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana tahun 2017 terdapat 28 lokasi banjir tahun 2019 menurun menjadi 22 lokasi banjir. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 15 lokasi banjir) menunjukkan status perlu upaya keras karena masih jauh dari target yang harus dicapai.
- 4) Persentase jalan Provinsi berkondisi baik menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana tahun 2017 sebesar 67,3% meningkat tahun 2019 menjadi 73,64%. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 75%) menunjukkan status akan tercapai.
- 5) Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik menunjukkan kondisi stagnan tahun 2017-2019 sebesar 80,11%. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 84,72%) menunjukkan status akan tercapai.
- 6) Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis) menunjukkan kondisi yang sangat baik dimana tahun 2017 tingkat konektivitas sepanjang 6,97 km meningkat menjadi 25,96 km. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 34,45%) menunjukkan status akan tercapai.

- 7) panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana terjadi peningkatan dari 25,47 km di tahun 2017 menjadi 45,8 km tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 58,78%) menunjukkan status akan tercapai.
- 8) Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI menunjukkan peningkatan tahun 2017 sebesar 30% meningkat menjadi 80%. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 9) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi) menunjukkan peningkatan dari 60 orang tahun 2017 menjadi 223 orang tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 760%) menunjukkan status perlu upaya keras pencapaiannya karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
- 10) Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah menunjukkan peningkatan dari 1,26% tahun 2017 meningkat menjadi 3,18 tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 0,05%) menunjukkan status tercapai.
- 11) Persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya menunjukkan peningkatan dari 14,28% tahun 2017 menjadi 57,14 % tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status perlu upaya keras pencapaiannya karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
- 12) Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda menunjukkan belum tersedia data.

Perkembangan capaian indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dari 12 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 1 indikator tercapai, 7 indikator akan tercapai 3 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator belum tersedia data. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air										
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	39,64	42,64	45,64	35,05	46,5	46,5	48,64	95,60	
	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	67,50	70,20	73,10	64,82	70,42	73,13	76,10	96,10	
	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	28,00	25,00	22,00	28	25	22	15,00	31,66	
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan										
	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	67,97	69,73	71,49	67,3	70,31	73,64	75,00	98,19	
	Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	79,88	81,24	82,3	80,11	80,11	80,11	84,72	94,56	
3	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan										
	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	6,97	16,19	24,99	6,97	16,2	25,96	34,45	75,36	
	panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	16,67	18,75	38,47	25,47	28,67	45,8	58,78	77,92	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
4	Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi										
	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	30,00	50,00	80,00	30	80	80	100,00	80,00	
5	Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi										
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	60	150	150	60	122	223	760	29,34	
6	Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi										
	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0,60	0,07	0,07	1,26	1,6	3,18	0,05	6290,69	
7	Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang										
	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	14,28	28,57	57,14	14,28	28,57	57,14	100,00	57,14	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	1	1	2	0	0	0	4	0,00	

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 4 program dan 6 indikator sebagai berikut : 1) Luas kawasan kumuh; 2) Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman; 3) Cakupan pelayanan Sanitasi Air Limbah; 4) Cakupan pelayanan Sanitasi Persampahan; 5) Cakupan pelayanan Sanitasi Drainase; dan 6) Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Luas kawasan kumuh menunjukkan kondisi yang cukup baik yaitu menurun dari 752,62ha menjadi 476,85 ha. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 255,09%) menunjukkan status perlu upaya keras karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
- 2) Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman menunjukkan peningkatan dari 89,44% tahun 2017 menjadi 92,47% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status tercapai.
- 3) Cakupan pelayanan Sanitasi Air Limbah menunjukkan peningkatan dari 86,41% tahun 2017 menjadi 87,06% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status tercapai.
- 4) Cakupan pelayanan Sanitasi Persampahan menunjukkan peningkatan dari 56% tahun 2017 menjadi 59,99% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 66%) menunjukkan status tercapai.
- 5) Cakupan pelayanan Sanitasi Drainase menunjukkan peningkatan dari 32,24% tahun 2017 menjadi 37,26% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 52,24%) menunjukkan status tercapai.
- 6) Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun menunjukkan peningkatan dari 15% tahun 2017 menjadi 20% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 25%) menunjukkan status tercapai.

Perkembangan capaian indikator pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dari 6 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 5 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukinan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan										
	Luas kawasan kumuh	ha	752,99	627,69	549,53	752,62	529,82	476,85	255,09	13,07	
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum										
	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	89,44	92,19	96,79	89,44	92,15	92,47	100,00	92,47	
3	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi										
	Cakupan pelayanan Sanitasi :										
	Air Limbah	%	85,45	89,09	92,72	86,41	86,62	87,06	100,00	87,06	
	Persampahan	%	56,00	59,00	61,00	56	59,93	59,99	66,00	90,89	
	Drainase	%	32,24	37,24	42,4	32,24	36,48	37,26	52,24	71,32	
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan										
	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	15,00	17,50	20,00	15	18	20	25,00	80,00	

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urusan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya didukung oleh 9 program dengan jumlah indikator yang menjadi target capaian sebanyak 11 indikator. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 11 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 6 indikator sudah dalam kategori tercapai dan 5 indikator termasuk kategori perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Kinerja Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM diukur dengan 2 indikator, yaitu Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri. Hasil evaluasi kinerja selama tahun 2017-2019 trennya membaik dengan kondisi menunjukkan penurunan setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2017 sebesar 240 kasus menjadi 235 kasus ditahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD, penurunan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan gubernur tidak mampu memenuhi target. Sampai dengan tahun 2019, penurunan pelanggaran ditargetkan sampai pada 200 kasus, sementara baru tercapai pada angka 235 kasus. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, kemungkinan terbesar akan sulit tercapai sehingga indikator Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur termasuk pada kategori upaya keras karena baru mencapai diangka 43,33%.

Sementara itu, indikator Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan kinerja yang meningkat, yaitu dari tahun 2017 sebanyak 16 orang menjadi 23 orang pada tahun 2019. Namun dari tren tersebut jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama tiga tahun terakhir, target pada tahun 2017, 2018 dan 2019 termasuk tidak ada yang memenuhi target. Target akhir RPJMD untuk Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri adalah sebanyak 51 orang, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini yang tercapai baru 45,10%. Dengan demikian, indikator Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah proses pencapaiannya masih termasuk pada Kategori Perlu Upaya Keras.

Untuk mendukung kondisi keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Riau, salah satu indikator yang menjadi ukuran adalah terwujudnya pelaksanaan demo yang aman. Satpol PP dengan dukungan dari berbagai elemen keamanan lainnya seperti kepolisian mampu mewujudkan kondusifitas di wilayah Provinsi Kepri yang terlihat dari kinerja yang setiap tahunnya mengalami perbaikan. Penjagaan terhadap pelaksanaan demo pada tahun 2017 tercapai 92% demo berjalan dengan aman, dan tahun berikutnya di 2018 dan 2019 pelaksanaan demo mampu dikondisikan sangat baik yaitu 100% berjalan aman.

Kinerja peningkatan kamanan dan kenyamanan lingkungan diukur dengan indikator Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan. Perkembangan indikator tersebut selama

tahun 2017-2019 setiap tahunnya membaik, yaitu meningkat dari tahun 2017 sebesar 41% menjadi 43% ditahun 2019. Selama tiga tahun tersebut, kenaikan setiap tahunnya hanya sebesar 1% dan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 70% ditahun 2019. Capaian kinerja Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dua tahun ke depan sebesar 80% masih termasuk pada kategori upaya keras karena tingkat capainnya sampai tiga tahun terakhir baru sebesar 53,75%.

Indikator Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan untuk dapat tercapai 80% ditahun 2021 minimal setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 18,5%. Jika melihat capaian kinerja selama tiga tahun terakhir yang setiap tahunnya hanya 1% maka sulit untuk mencapai indikator tersebut.

Kinerja penanggulangan kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau diukur dengan indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran. Sampai tahun ketiga RPJMD, kinerja indikator masih belum sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2017 kabupaten/kota yang memiliki peta rawan kebakaran sebesar 28,57%, tahun 2018 tidak ada kinerja dan tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 42,85%. Walaupun trennya meningkat, namun kinerja yang dihasilkan setiap tahunnya masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan kondisi target pada akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian untuk Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran masih termasuk pada upaya keras. Hal ini dapat dilihat dari target yang harus dicapai dalam 2 tahun terakhir sebesar 57,15%, atau setiap tahunnya sekitar 28,58%.

Upaya pencapaian indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran sampai pada 100% ditahun 2021 dapat dilakukan dengan catatan prestasi kenaikan ditahun 2019 ditingkatkan lagi kinerjanya, terutama dalam dari sisi koordinasi dengan kabupaten/kota, pengelolaan sumberdaya manusia maupun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan agenda melalui program pengembangan wawasan kebangsaan. Agenda pengembangan wawasan kebangsaan kinerjanya diukur dengan persentase konflik sosial tertangani. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019), konflik sosial yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau 100% dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian, target dalam RPJMD sudah termasuk kategori tercapai.

Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat kinerjanya diukur dengan 2 indikator, yaitu Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dan Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan. Secara umum, kedua indikator tersebut mampu tercapai dengan baik dengan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Jika melihat perkembangan dari

masing-masing indikator, target tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) pada PilwaKo adalah sebesar 65,50%, Pileg sebesar 73,50%, Pilpres sebesar 64,75% dan Pilgub sebesar 61,50%. Dari keempat penyelenggaraan pemilu tersebut, Pileg dan Pilpres tercapai partisipasi sebesar 82,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 73,50% untuk Pileg dan 64,75% untuk Pilpres. Sementara itu yang belum memenuhi target adalah PilwaKo dari yang ditargetkan sebesar 65,50%, tercapai sebesar 59%.

Pada indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan sudah jauh melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan maupun target akhir RPJMD. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian ditahun 2019 yang sudah mencapai 158,8%, padahal target akhir RPJMD ada diangka 94,74%.

Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis desa yang termasuk rawan bencana. Indikator yang digunakan yaitu persentase desa/kel tangguh bencana. Dilihat dari perkembangannya, cakupan desa/kelurahan tangguh bencana trennya meningkat (positif), di mana kinerja setiap tahunnya menunjukkan perbaikan, dari 1,2% ditahun 2017 menjadi 3,61% pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target tahunannya setiap tahun melampaui target, termasuk jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,64%.

Penanganan bencana di Provinsi Kepulauan berjalan dengan baik. Kejadian bencana kab/kota dapat tertangani dengan baik yang ditunjukkan dengan kinerja 100% tercapai setiap tahunnya. Dengan demikian, target akhir RPJMD 100% pun sudah tercapai, tahun-tahun berikutnya adalah mempertahankan capaian kinerja agar tetap 100%.

Pemulihan paska bencana di Provinsi Kepulauan Riau diukur dengan indikator jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019) sudah 5 desa yang menjadi sasaran pemulihan paska bencana, melebihi target yang ditetapkan di mana sampai dengan tahun 2019 adalah 4 desa. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 9 desa, sampai tahun ketiga ini kinerjanya baru mencapai 55,56% dan termasuk pada kategori upaya keras. Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan kemungkinan bisa mencapai target sesuai RPJMD, dengan catatan minimal setiap tahunnya konsisiten dapat memenuhi 2 desa terpulihkan seperti pada kinerja tahun 2018 dan 2019.

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum selama tahun 2017-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.6

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
A	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN										
1	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM										
	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	250	230	200	240	240	235	150	43,33	
	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	Orang	18	27	36	16	22	23	51	45,10	
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal										
	Persentase demo yang berjalan aman	%	92,00	93,00	94,00	92	100	100	100	100	
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										
	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	%	60,00	65,00	70,00	41	42	43	80,00	53,75	
4	Program Penanggulangan Kebakaran										
	Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	28,57	57,14	71,43	28,57	0	42,85	100,00	42,85	
B	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Program pengembangan wawasan kebangsaan										
(1)	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
2	Program pendidikan politik masyarakat										
(1)	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	0,00	Pilwako : 65,50	Pileg : 73,50; Pilpres : 64,75	0	59	Pileg : 82,00; Pilpres : 82,00	PilwaKo: 65,50; Pileg: 73,50; Pilpres: 64,75; Pilgub : 61,50	182,42	
(2)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Ormas	80,00	81,82	82,35	18	163,64	158,8	94,74	167,62	
C	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana										
	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	0,72	1,20	1,68	1,2	2,4	3,61	2,64	136,52	
2	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)										
	Persentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Pemulihan Pasca Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)										
	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	1	1	2	1	2	2	9	55,56	

6. Sosial

Kinerja urusan sosial pada penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau didukung 6 program dengan 18 indikator sebagai ukuran kinerja. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 18 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 4 indikator sudah dalam kategori tercapai, 10 indikator termasuk kategori akan tercapai, dan 4 indikator termasuk kategori perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada urusan sosial kerjanya diukur dengan 3 indikator, meliputi a) Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP), b) Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan c) Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya. Dari ketiga indikator tersebut, satu indikator memiliki capaian yang masih rendah, yaitu persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari target tahun 2019 sebesar 1% tercapai sebesar 0,81%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, tingkat capaiannya masih berada di angka 45,76%, termasuk pada perlu upaya keras dalam pencapaiannya. Jika melihat perkembangan dalam tiga tahun terakhir, persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2017 dan 2018 sudah dalam posisi on the track, selalu memenuhi target.

Sementara itu, dua indikator lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan masih ada dalam posisi akan tercapai dengan melihat kinerja sampai tahun 2019. Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2019 sebesar 0,39%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,16% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,47% kerjanya sudah mencapai 82,98%. Pada indikator persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya, pada tahun 2017-2018 perkembangan capaian kerjanya sudah sesuai target, namun pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 38,09% kerjanya menurun tidak sesuai yang ditargetkan sebesar 39,64%. Walaupun tidak mencapai target di tahun 2019, diprediksikan pada akhir RPJMD akan tercapai jika melihat target akhir yang ditetapkan sebesar 42,74%, secara keseluruhan capaian indikator tersebut sudah berada di angka 89,12%.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial berdasarkan RPJMD 2016-2021 ditetapkan dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil penilaian terhadap ke 6 indikator tersebut, terdapat 1 indikator dengan kinerja rendah, dan secara umum 5 indikator lainnya memiliki kinerja baik yang dimungkinkan pada akhir RPJMD akan tercapai. Indikator dengan tingkat capaian rendah adalah Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Dilihat dari tren capainya dari tahun 2017-2019, kinerja

setiap tahunnya tidak ada yang memenuhi target. Tahun 2019 saja, target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 78,37% sama dengan target yang ditetapkan diakhir RPMD, namun yang tercapai hanya sebesar 15,88%. Artinya dalam tiga tahun terakhir jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai 20,26%. Perlu upaya yang sangat keras untuk tercapai diakhir RPJMD karena masih menyisakan target sebesar 62,49% korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS).

Lima indikator lainnya walaupun saat ini jika dibandingkan dengan target RPJMD sudah dalam posisi on the track, namun masih perlu perhatian untuk 2 indikator yang capaiannya masih relatif kecil yaitu persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) dan persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih cukup jauh. Hal ini tidak terlepas dari kinerja tahunan kedua indikator tersebut yang mana rata-rata setiap tahunnya selama periode 2017-2019, untuk indikator persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) memiliki rata-rata target sebesar 1,52%, sedangkan rata-rata capainnya sebesar 1,06%. Untuk indikator persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi memiliki rata-rata target sebesar 7,3%, sedangkan rata-rata capaiannya sebesar 5,40%. Dengan demikian kedua indikator tersebut masih memiliki rata-rata capaian di bawah target.

Program perlindungan dan jaminan sosial ditetapkan dengan 2 indikator, pertama persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan kedua persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial. Pencapaian kedua indikator tersebut tergolong baik yang mana satu indikator sudah memenuhi target, baik dalam kinerja tahunan maupun terhadap target RPJMD. Indikator kedua dalam posisi akan tercapai pada akhir RPJMD yang mana saat ini ada diposisi 62,49%. Walaupun begitu, angka 62,49% perlu perhatian lagi dalam pencapaiannya karena hanya 2 angka di atas 60%. Selain itu melihat perkembangan capaiannya selama tahun 2017-2019, capaian tahun 2018 sebesar 39,37% dan tahun 2019 sebesar 37,71% tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 60,35%. Padahal target akhir RPJMD ditahun 2021 angkanya sama sebesar 60,35%.

Program pemberdayaan sosial memiliki 3 indikator, yaitu persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi, persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi dan persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial. Ketiga indikator tersebut memiliki capaian yang baik, di mana satu indikator sudah

mencapai target yang ditetapkan, sedangkan dua indikator diperkirakan akan tercapai pada akhir RPJMD.

Walaupun dua indikator diperkirakan akan tercapai, namun jika dilihat perkembangan capaian tahunannya masih memerlukan perhatian lagi. Pada indikator persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 68,45%, namun jika perkembangan kinerja tahunannya, selama tahun 2017-2019 target tahunannya tidak tercapai semua, tahun 2018 memiliki capaian kinerja sebesar 28,43%, sedangkan targetnya adalah sebesar 29,43%. Begitu juga dengan indikator

Upaya peningkatan dan pemerliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial diwujudkan melalui 2 indikator, yaitu jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan dan jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara. Target kedua indikator tersebut selama tiga tahun terakhir (2017-2019) tidak banyak perubahan. Penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan melalui pembangunan selama tiga tahun terakhir hanya tercapai 1 unit saja, padahal jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sarana yang dibangun adalah 3 unit. Jika target tersebut tidak menjadi prioritas utama untuk dua tahun ke depan, maka kemungkinan besar indikator tersebut tidak tercapai, termasuk indikator jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara karena unitnya belum tersedia. (Permasalahan)

Indikator yang ditetapkan sebagai ukuran pencapaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial, dan persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi. Kedua indikator tersebut dilihat dari perkembangannya cukup baik, setiap tahun memenuhi target yang ditetapkan, bahkan untuk indikator persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial mampu melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD kedua indikator tersebut sudah memenuhi target.

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada urusan sosial selama tahun 2017-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.7
Capaian Kinerja Urusan Sosial dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
A	Program Penanggulangan Kemiskinan										
1	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,61	0,61	1,00	0,61	0,61	0,81	1,77	45,76	
2	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,00	0,00	0,16	0	0	0,39	0,47	82,98	
3	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	51,53	38,09	39,64	51,53	38,09	38,09	42,74	89,12	
B	Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,23	0,25	0,28	0,24	0,27	0,29	0,33	87,88	
2	Persentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	4,91	5,96	7,94	4,91	6,03	7,02	10,89	64,46	
3	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	24,39	25,23	26,97	23,06	23,76	25,86	29,77	86,87	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
4	Persentase tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,30	1,54	1,75	1,3	1,42	1,57	2,17	72,35	
5	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	44,69	78,37	78,37	44,76	9,81	15,88	78,37	20,26	
6	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	42,70	49,19	57,30	38,92	43,78	49,73	73,51	67,65	
C	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
1	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	16,67	25,00	25,00	19,33	25	25,83	25,00	103,32	
2	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,36	60,35	60,35	30,36	39,37	37,71	60,35	62,49	
D	Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat	%	20,40	29,43	40,47	20,4	28,43	42,81	62,54	68,45	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas										
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas	%	8,12	32,49	47,72	8,12	32,49	49,24	78,17	62,99	
3	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
E	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial										
1	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	1,00	1,00	1,00	1	1	1	3,00	33,33	
2	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	1,00	1,00	3,00	1	1	1	3,00	33,33	
F	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya										
1	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	7,22	9,42	9,87	7,22	9,42	13,91	10,54	131,95	
2	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	50,00	50,00	50,00	50	50	50	50,00	100,00	

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja terdiri dari 4 program dan 11 indikator yakni indikator 1) Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; 2) Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; 3) Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja; 4) Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman; 5) Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan; 6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); 7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 8) Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 9) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3; 10) Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani; dan 11) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan.

Adapun perkembangan realisasi kinerja 11 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 5 indikator membaik yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman dari sebanyak 32 orang pada tahun 2017 menjadi sebanyak 40 orang pada tahun 2019, Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari sebesar 48,80% meningkat menjadi 60,69%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari sebesar 7,16% menjadi 6,91%, Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sebesar 70% menjadi 88,72% dan persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,4% meningkat menjadi sebesar 100%. Terdapat 4 indikator yang mengalami tren yang fluktuatif yaitu Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2017 sebesar 100% menurun menjadi 48,49% pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 79,79% pada tahun 2019, Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2017 sebesar 0% meningkat menjadi 52,30% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 40,53% pada tahun 2019, Persentase Perusahaan yang menerapkan SMK3 pada tahun 2017 sebesar 1,2% meningkat menjadi 12% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 2,74% pada tahun 2019 dan Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani pada tahun 2017 sebesar 62% meningkat menjadi sebesar 100% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 83,72% pada tahun 2019. Sedangkan indikator yang mengalami tren perkembangan yang kurang baik terdapat 2 indikator yaitu persentase lulusan BLK yang diterima kerja dari sebesar 75% menurun menjadi 70%, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari sebesar 66,41% menurun menjadi sebesar 64,76%.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 terdapat 2 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 8 indikator yang akan mencapai target akhir dan 1 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu pada Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman, Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja										
a	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	47,75	47,88	48,00	100	48,49	79,79	48,25	165,37	
b	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	42,74	42,88	43,00	0	52,3	40,53	43,25	93,71	
c	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	85,00	86,00	87,00	75	86,04	70	89,00	78,65	
d	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	16,00	16,00	16,00	32	20	40	80,00	50,00	
2	Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja										
a	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	56,00	58,00	60,00	48,8	60,5	60,69	64,00	94,83	
b	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,30	66,68	67,05	66,41	64,72	64,76	67,80	95,52	
c	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,16	7,02	6,88	7,16	7,12	6,91	6,60	95,30	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.										
a	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	75,00	80,00	85,00	70	89	88,72	95,00	93,39	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
b	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	1,50	2,00	2,50	1,2	12	2,74	3,50	78,29	
c	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	70,00	75,00	80,00	62	100	83,72	90,00	93,02	
4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
a	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	24,00	25,00	26,00	97,4	100	100	28,00	357,14	

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Riau didukung 4 program dengan 5 indikator kinerja yang menjadi target selama tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 5 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 2 indikator sudah dalam kategori tercapai, dan 2 indikator termasuk kategori akan tercapai diakhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penganggaran yang lebih responsif gender. Kondisi ini ditunjukkan dengan indikator yang digunakan adalah Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi. Target ARG dalam RPJMD diakhir RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 7%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi ARG selama tiga tahun terakhir, setiap tahun target ARG dalam APBD dapat tercapai bahkan mampu melampaui target. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing capaian tahunnya, pada tahun 2017 target ARG dalam APBD adalah sebesar 4,90% tercapai sebesar 6,40%, tahun 2018 target ARG dalam APBD sebesar 5,50% tercapai sebesar 6,4%, dan tahun 2019 target ARG dalam APBD sebesar 6% tercapai jauh lebih besar yaitu sebesar 9,32%. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 7%, maka kondisi saat ini ditahun 2019 capainnya berada di 160,57% jauh melampau target yang ditetapkan.

Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 27,7 per 100.000 Perempuan pada tahun 2017 menurun menjadi 30,52 per 100.000 Perempuan ditahun 2019. Kinerja penurunan angka kekerasan dan TPPO menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam tiga tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, pencapaian sampai tahun 2019 saat ini sudah tercapai melebihi target yaitu 92,87 per 100.000 Perempuan. Jika mampu dipertahankan kinerjanya, dipastikan sampai tahun 2021 penurunan angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dapat tercapai.

Upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak di Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan melalui indikator persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kabupaten/kota dengan status KLA pratama meningkat setiap tahunnya sesuai target yang ditetapkan. Puncaknya pada tahun 2019 kabupaten/kota dengan minimal pratama sudah tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan diakhir RPJMD. Sementara itu, angka kekerasan terhadap anak pun menunjukkan kinerja yang baik, kondisi tersebut dilihat dari rasio kekerasan terhadap anak dengan tren menurun dari tahun 2017 sebesar 3,4 per 10.000 anak menurun menjadi 3,09 per 10.000 anak ditahun 2019. Penurunan

angka kekerasan terhadap anak dilihat dari sisi target tahunan setiap tahunnya sudah tercapai, bahkan ditahun 2018 penurunannya lebih rendah lagi sampai 2,56 per 10.000 anak. Terhadap target akhir RPJMD sebesar 3,66 per 10.000 anak dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 3,09 per 10.000 anak sudah terlampaui.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas keluarga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengembangan kapasitas kaum perempuan pada keluarga miskin. Target tersebut ditetapkan melalui indikator persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill. Sampai dengan tahun 2019, perempuan dari keluarga miskin yang mendapatkan peningkatan kapasitas sudah mencapai 1,16%, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 sebesar 0,76%. Upaya peningkatan kapasitas terhadap perempuan dari keluarga miskin jika dilihat berdasarkan target tahunan dalam RPJMD menunjukkan kinerja yang baik dengan kondisi tercapai setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan. Tren capaian yang membaik berdampak pada target pencapaian diakhir RPJMD, di mana pada tahun 2021 perempuan dari keluarga miskin yang mendapatkan peningkatan kapasitas ditargetkan sebesar 1,48%, maka diprdiksikan akan tercapai.

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2017-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.9
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
A	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
1	Persentase Anggaran Rensponsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,90	5,50	6,00	6,4	9,32	11,24	7,00	160,57	
B	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,16	32,6	31,49	27,7	28,08	30,52	28,49	92,87	
C	Program Perlindungan Anak										
1	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	42,86	42,86	57,14	57	71,43	100	85,71	116,67	
2	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	4,08	3,94	3,80	3,4	2,56	3,09	3,66	115,57	
D	Program Kualitas Keluarga										
1	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	0,76	1,00	1,16	0,76	1,13	1,16	1,48	78,38	

3. Pangan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pangan terdiri dari 5 program yang dijabarkan kedalam 6 indikator program yang meliputi 1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan; 2) Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen ; 3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi; 4) Angka Rawan Pangan; 5) Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dan 6) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2019 terdapat 3 indikator yang mengalami tren perkembangan meningkat yakni indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan yang meningkat setiap tahunnya dari 83,09 skor di tahun 2017 meningkat menjadi 91,00 skor di tahun 2019; indikator Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman mengalami peningkatan dari 76% di tahun 2017 menjadi 94% di tahun 2019; dan indikator Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya yang memiliki realisasi pada tahun 2017 sebesar 31% menjadi 37,28% di tahun 2019. Indikator yang mengalami perkembangan yang cenderung stagnan adalah indikator Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen sebesar 9,2% di tahun 2017 menjadi 9,26% di tahun 2019. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat 88,4 skor di tahun 2017 menurun menjadi 87 skor di tahun 2018 namun selanjutnya meningkat menjadi 89,1 skor di tahun 2019. Disisi lain Indikator Angka Rawan Pangan mengalami peningkatan dari 10,07% di tahun 2017 menjadi 11,32% di tahun 2019, namun peningkatan pada indikator angka rawan pangan justru menggambarkan capaian yang kurang baik, karena menggambarkan peningkatan wilayah yang rawan pangan.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 4 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dengan persentase realisasi capaian 106,66%; indikator Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan realisasi capaian 107,33%; indikator Angka Rawan Pangan dengan realisasi capaian 133,14%; dan indikator Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dengan realisasi capaian 117,50%. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD terdiri dari 2 indikator yakni indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan realisasi capaian 99,00% dan indikator Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya dengan realisasi capaian 93,20 %. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.10
Capaian Kinerja Urusan Pangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan										
a	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	89,00	90,00	91,00	83,09	82,29	99,19	93,00	106,66	
b	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	CV < 10	CV < 10	9,2	9,2	9,26	CV < 10	107,33	
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan										
a	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	86,00	87,00	88,00	88,4	87	89,1	90,00	99,00	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan										
a	Angka Rawan Pangan	%	17,45	17,32	17,19	10,07	10,07	11,32	16,93	133,14	
4	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan										
a	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	80,00	80,00	80,00	76	82,61	94	80,00	117,50	
5	Program Pengembangan SDM dan Penyuluh pertanian										
a	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	32,73	34,55	36,36	31	34,55	37,28	40,00	93,20	

4. Pertanahan

Urusan Bidang Pertanahan memiliki 1 program yakni Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Dilihat dari perkembangan tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dari 100% di tahun 2017 menjadi sebesar 0% di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.11

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah										
	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100	100	0	100,00	0,00	

5. Lingkungan Hidup

Pencapaian urusan lingkungan hidup didukung dengan 3 program dengan jumlah indikator yang menjadi target pencapaian sebanyak 9 indikator. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 9 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 2 indikator sudah dalam kategori tercapai dan sebanyak 7 indikator termasuk kategori akan tercapai diakhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD 2016-2021 ditetapkan dengan 6 indikator, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu, persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu, persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah b3 sesuai standar, persentase kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu, dan persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi adipura.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2017-2019. Tahun 2018, kondisi IKLH mencapai sebesar 70,34 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 70,19. Pada tahun 2019, tercatat sebesar 66,50 menunjukkan penurunan sebesar 3,84 point. Jika dibandingkan dengan target tahunannya, kondisi tahun 2017 dan 2018 capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai target bahkan melampaui, sedangkan capaian tahun 2019 tidak memenuhi target. Pencapaian IKLH pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 69,80, maka posisi pencapaian indikator IKLH saat ini berada diangka 95,27% termasuk kategori diprediksi akan tercapai pada akhir RPJMD.

Ketersediaan air waduk berdasarkan kualitas mutu bakunya ditunjukkan dengan indikator persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu. Kondisi waduk dengan kualitas air sesuai mutu baku di Provinsi Kepulauan Riau perkembangannya cukup memuaskan. Dari tahun 2017 sebesar 80%, mencapai kondisi terbaik pada tahun 2019 menjadi 100%. Kondisi tersebut sesuai dengan harapan yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan sejak RPJMD ditetapkan, bahwa 100% kondisi waduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kualitas air sesuai mutu baku. Sementara untuk kualitas air dengan sesuai mutu baku sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 7,43%. Target selama tahun 2017-2018 berhasil dipenuhi dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan 100%, maka saat ini pencapaiannya berada pada posisi 7,43% masuk pada kategori akan tercapai pada akhir RPJMD nanti.

Pengawasan terhadap pelaku usaha/industri dalam bentuk pengelolaan limbah sesuai standar ditetapkan dengan indikator persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar. Dalam tiga tahun terakhir, perkembangan capaian pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar yang ditargetkan setiap tahunnya sebesar 20,60%, secara umum

pencapaiannya masih sesuai dengan target, hanya ditahun 2019 yang tidak sesuai target dengan capaian sebesar 20,30% dan nilai kekurangannya realtif kecil. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD saat ini berada diangka 61,5%, termasuk pada kategori akan tercapai, dengan syarat konsisten kinerjanya seperti tiga tahun sebelumnya, maka target ditahun 2020 sebesar 18,50% dan tahun 2021 sebesar 19,70% akan tercapai.

Dari sisi kualitas udara, target dalam RPJMD 2016-2021 ditetapkan melalui indikator persentase kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu. Perkembangan kabupaten/kota dengan kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu jika dilihat dari tahun 2017 sebesar 78,6% meningkat menjadi 85,71%. Namun jika melihat tahun terakhir justeru mengalami penurunan karena ditahun 2018 sudah mencapai 95,47%.Walapun dalam tiga tahun terakhir setiap tahun capaiannya tidak selalu membaik, namun masih memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang harus tercapai 100%, maka posisi saat ini (2019) berada di angka 85,71% pada proses pencapaian dan termasuk pada kategori akan tercapai.

Sebagai upaya meningkatkan kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mentargetkan semua kabupaten/kota memenuhi standar nominasi Adipura. Perkembangan kabupaten/kota yang memenuhi standar adipura di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan ditahun 2019 sebesar 85,71% dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 sebesar 71,43%. Upaya pemenuhan standar nominasi adipura pada setiap kabupaten/kota dilihat dari sisi target pada tahun 2017 dan 2019 tercapai sesuai target, hanya tahun 2018 tidak memenuhi target. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang diharapkan pada tahun 2021 terpenuhi 100%, kondisi sampai tahun 2019 ini berada pada kategori akan tercapai.

Dalam rangka mendukung terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program pengelolaan lingkungan disekolah untuk menerapkan pola berbudaya green school. Sebagai tolok ukur, pemerintah menetapkan indikator jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional. Sampai dengan tahun 2019, jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata total sebanyak 115 sekolah. Jumlah tersebut dicapai dari tahun 2017 sebanyak 25 sekolah, tahun 2018 sebanyak 51 sekolah dan tahun 2019 sebanyak 39 sekolah. Setiap tahun, target sekolah mendapatkan penghargaan Adiwiyata sudah sesuai target, bahkan melampaui. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 154 sekolah, saat ini pencapaiannya sudah berada di angka 74,68% dan termasuk kategori akan tercapai.

Dalam rangka mendukung konservasi sumberdaya alam, terutama diwilayah pantai, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki target melakukan rehabilitasi terhadap kawasan mangrove. Luasan hutan mangrove yang sudah direhabilitasi

selama tahun 2017-2019 adalah seluas 11 Ha, dan jika ditambah dengan luasan sebelumnya yang sudah direhabilitasi sebanyak 6 Ha, maka saat ini total luasan mangrove yang sudah direhabilitasi mencapai 17 Ha. Rehabilitasi kawasan hutan mangrove secara target setiap tahunnya terpenuhi dengan baik, dan saat ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD seluas 28 Ha, maka diprediksikan kinerja meningkatkan luasan kawasan mangrove yang direhabilitasi akan tercapai.

Data merupakan sumber utama untuk melakukan analisis dan dasar dalam pengambilan kebijakan. Untuk mendukung kebutuhan data pada urusan lingkungan hidup, setiap tahun melakukan dokumentasi atau perekaman terhadap data yang dihasilkan oleh masing-masing unit pemangku kepentingan. Melalui pendataan yang baik, maka saat ini **ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah** berkaitan dengan informasi lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan sudah tersedia,

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2017-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.12

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
A	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,70	68,10	68,90	70,19	70,34	66,5	69,80	95,27	
2	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	72,73	72,73	81,82	80	66,67	100	100,00	100,00	
3	Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	57,14	57,14	71,43	57,14	57,14	71,43	100,00	71,43	
4	Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	20,60	20,60	20,60	20,6	20,6	20,3	100,00	61,5	
5	Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	57,14	71,43	85,71	78,6	95,47	85,71	100,00	85,71	
6	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	71,43	85,71	85,71	71,43	71,43	85,71	100,00	85,71	
B	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
1	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	23	26	30	25	51	39	154	74,68	
2	Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	ha	2	3	4	2	5	4	28	60,71	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan catatn sipil terdiri dari 1 program yang dijabarkan kedalam 2 indikator program yang meliputi indikator Rasio penduduk ber-KTP dan indikator Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran. Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2017 hingga 2019 kedua indikator tersebut mengalami tren perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Indikator Rasio penduduk ber-KTP memiliki capaian sebesar 90,7% di tahun 2017 naik menjadi 98,05% di tahun 2019. Selanjutnya indikator rasio nak (0-18 tahun) berakte kelahiran memiliki realisasi 83,19% di tahun 2017 meningkat menjadi 88,91% di tahun 2019.

Selain itu dilihat dari realisasi tersebut kedua indikator tersebut telah mencapai target akhir RPJMD, di mana indikator Rasio penduduk ber-KTP telah mencapai target akhir sebesar 98% dengan persentase realisasi sebesar 100,5%. Sedangkan indikator Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran telah melampaui target sebesar 82% dengan persentase realisasi sebesar 108,43%. Secara lebih rinci perkembangan indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.13
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan										
	Rasio penduduk ber-KTP	%	90,00	92,00	95,00	90,7	95,02	98,05	98,00	100,05	
	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	76,00	77,00	79,00	83,19	86,63	88,91	82,00	108,43	

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 4 program dan 4 indikator kinerja program yang meliputi indikator 1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif; 2) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif; 3) Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat; dan 4) Jumlah Desa Cepat Berkembang. Dilihat dari realisasi tahun 2017 hingga 2019 terdapat 3 indikator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif meningkat dari 40% di tahun 2017 menjadi 64,48% di tahun 2019. Indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif juga mengalami peningkatan dari 35 unit BUMDesa yang aktif di tahun 2017 menjadi 108 unit BUMDesa yang aktif di tahun 2019. Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang naik dari 15 desa di tahun 2017 menjadi 30 desa di tahun 2019. Sedangkan indikator Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat mengalami perkembangan fluktuatif cenderung stagnan dari 16,67 % di tahun 2017 naik menjadi 33,33% di tahun 2018 kemudian turun menjadi 16,67% di tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 2 indikator berstatus telah mencapai target dan 2 indikator lainnya berstatus belum mencapai target. Indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD yakni Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif dengan persentase realisasi 109,94%, dan Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif dengan persentase realisasi 196,36%. Sedangkan indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yakni Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat dengan persentase realisasi hanya 50,02%, dan indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dengan persentase realisasi hanya 53,57%. Secara lebih rinci perkembangan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.14

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017 s/d 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	40,22	44,23	48,64	40	46,63	64,48	58,65	109,94	
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan										
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	35,00	40,00	45,00	35	80	108	55,00	196,36	
3	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna										
	Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	16,67	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	33,33	50,02	
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (2017)										
	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	15	22	30	15	28	30	56	53,57	

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 1 program dan 2 indikator kinerja program yang meliputi indikator Pembentukan Kampung KB dan indikator Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR). Dilihat dari capainya sejak tahun 2017 hingga 2019 indikator pembentukan kampung KB meningkat dari 0 di tahun 2017 menjadi 1 kampung di tahun 2018 dan 2019. Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR) juga mengalami peningkatan dari 46,73% menjadi 78,6% di tahun 2019.

Selanjutnya jika dilihat dari target akhir RPJMD indikator Pembentukan Kampung KB dengan realisasi 1 kampung di tahun 2018 dan 1 kampung di tahun 2019 masih belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 4 kampung, sehingga realisasinya hanya 50%. Indikator Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR) berstatus telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase realisasi 154,94%. Secara lebih rinci perkembangan indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.15
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Keluarga berencana										
	Pembentukan Kampung KB	Angka	NA	1	1	NA	1	1	4	25,00	
	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	%	46,73	47,73	48,73	46,73	79,81	78,6	50,73	154,94	

9. Perhubungan

Urusan perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 7 program dan 15 indikator sebagai berikut : 1) Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro); 2) Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro); 3) Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis; 4) Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik; 5) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6) Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas; 7) Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis; 8) Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis; 9) Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara; 10) Persentase ketersediaan Bandar Udara; 11) Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut; 12) Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut; 13) Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis; 14) Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik; dan 15) Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) menunjukkan kondisi stagnan sebesar 71,43% tahun 2017 - 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100 %) menunjukkan status akan tercapai.
- 2) Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro) menunjukkan peningkatan dari 77,78% tahun 2017 menjadi 88,89% tahun 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 3) Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis menunjukkan peningkatan dari 53,85% tahun 2017 menjadi 76,92% tahun 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 4) Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 72,73% tahun 2017 menjadi 90,91% tahun 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 5) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan peningkatan dari 67,27% tahun 2017 menjadi 75,5% tahun 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 6) Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas menunjukkan peningkatan dari 7,67% tahun 2017 menjadi 9,67% tahun 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 46,05%) menunjukkan status perlu upaya keras karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
- 7) Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis menunjukkan peningkatan dari 42,86% tahun 2017 menjadi 71,43% tahun 2019. Jika indikator tersebut

diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.

- 8) Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis menunjukkan peningkatan dari 75% tahun 2017 menjadi 91,67% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100 %) menunjukkan status akan tercapai.
- 9) Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara belum tersedia data
- 10) Persentase ketersediaan Bandar Udara menunjukkan peningkatan dari 77,78 tahun 2017 menjadi 88,89 tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100 %) menunjukkan status akan tercapai.
- 11) Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut menunjukkan peningkatan dari 58,82% menjadi 82,35%. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 12) Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut menunjukkan kondisi stagnan sebesar 55,56 dari tahun 2017-2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status perlu upaya keras.
- 13) Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis menunjukkan kondisi stagnan sebesar 55,56 dari tahun 2017-2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status perlu upaya keras.
- 14) Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 75 % tahun 2017 menjadi 91,67% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 15) Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan menunjukkan peningkatan dari 0% tahun 2017 menjadi 143,8% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 40%) menunjukkan status tercapai.

Perkembangan capaian indikator pada urusan perhubungan, dari 15 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 1 indikator tercapai, 11 indikator akan tercapai, 2 indikator perlu upaya keras, dan 1 indikator tidak tersedia data. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat										
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	71,43	71,43	85,71	71,43	71,43	71,43	100,00	71,43	
	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77,78	77,78	88,89	77,78	77,78	88,89	100,00	88,89	
	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	53,85	76,92	76,92	53,85	53,85	76,92	100,00	76,92	
	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	72,73	81,82	90,91	72,73	72,73	90,91	100,00	90,91	
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas										
	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	67,20	74,86	83,27	67,27	70,88	75,5	100,00	75,50	
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	7,67	10,17	14,33	7,67	9,67	9,67	21,00	46,05	
	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	42,86	57,14	71,43	42,86	71,43	71,43	100,00	71,43	
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara										

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	75,00	83,33	91,67	75	91,67	91,67	100,00	91,67	
	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	NA	25,00	50,00	NA	0	0	100,00	0,00	
	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	66,67	77,78	88,89	77,78	88,89	88,89	100,00	88,89	
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut										
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	64,71	73,53	82,35	58,82	73,53	82,35	100,00	82,35	
6	Program Pembangunan Transportasi Laut										
	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	55,56	66,67	77,78	55,56	55,56	55,56	100,00	55,56	
	Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	55,56	66,67	77,78	55,56	55,56	55,56	100,00	55,56	
	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	83,33	83,33	91,67	75	83,33	91,67	100,00	91,67	
7	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah										
	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	350 Juta	10,00	20,00	0	216	143,8	40,00	359,50	

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 2 program dan 3 indikator sebagai berikut : 1) Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri; 2) Nilai e-government Provinsi Kepri; dan 3) Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan komunikasi dan informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri menunjukkan peningkatan dari skala 13,03 tahun 2017 menjadi 43,24 tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 67,50%) menunjukkan status akan tercapai.
- 2) Nilai e-government Provinsi Kepri menunjukkan peningkatan dari skala 2,1 tahun 2017 menjadi 2,4 tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 2,50) menunjukkan status akan tercapai.
- 3) Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan menunjukkan peningkatan dari 25% tahun 2017 menjadi 68,08% tahun 2019. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 67,50%) menunjukkan status tercapai.

Perkembangan capaian indikator pada urusan komunikasi dan informatika, dari 3 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 1 indikator tercapai, dan 2 indikator akan tercapai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.17

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik										
	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	62,00	63,50	65,00	13,03	53,87	43,24	67,50	64,06	
2	Program e-government										
	Nilai e-government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,10	2,20	2,30	2,1	2,1	2,4	2,50	96,00	
	Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan	%	25,00	35,00	45,00	25	25	68,08	60,00	113,47	

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui 3 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 5 indikator program yaitu: (1) Persentase Koperasi Aktif; (2) Persentase KSP/USP sehat; (3) Pertumbuhan koperasi; (4) Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif; dan (5) Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2019, terdapat 3 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Persentase KSP/USP sehat meningkat dari sebesar 8,4% menjadi 38,19%; Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif meningkat dari sebesar 0,33% menjadi 0,55%; dan Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi meningkat dari sebesar 19,8% menjadi 19,85%. Sementara itu indikator yang capaiannya cenderung menurun yaitu Persentase Koperasi Aktif dari sebesar 51,8% menjadi 39,93%; dan pertumbuhan koperasi dari sebesar 3,3% menjadi 2,72%.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 5 indikator program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebanyak 4 indikator program berstatus akan tercapai karena memiliki persentase capaian target antara 60 hingga <100%. Sedangkan 1 indikator masih berstatus memerlukan upaya keras untuk mencapainya, yaitu Pertumbuhan koperasi. Namun demikian apabila dibandingkan target tahun 2019, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target tahun 2019 yaitu Persentase Koperasi Aktif, dan Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi. Penyebab belum tercapainya target persentase koperasi aktif yaitu masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan dan melaporkan hasil RAT, dan sampai saat ini Diskopukm Provinsi Kepri masih menunggu Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait pembubaran koperasi. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja koperasi aktif maka perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Pengurus Koperasi tentang pelaksanaan RAT. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi belum mencapai target tahun 2019 disebabkan rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang manfaat sertifikasi produk, dan proses pengurusan sertifikasi yang masih menjadi beban bagi Pelaku Usaha, baik dari segi biaya maupun proses pengurusannya. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja maka perlu dilakukan sosialisasi dan fasilitasi pelaku UKM agar dapat membuat sertifikasi untuk produknya.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.18

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
	Persentase Koperasi Aktif	%	51,20	53,30	55,80	51,8	54,95	39,93	62,10	64,30	
	Persentase KSP/USP sehat	%	15,30	23,00	30,60	8,4	36,11	38,19	45,90	83,20	
	Pertumbuhan koperasi	%	1,00	1,50	2,00	3,3	5,1	2,72	10,00	27,2	
2	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan										
	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,27	0,34	0,48	0,33	0,41	0,55	0,75	72,97	
3	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi										
	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	18,5	19,2	20,19	19,8	19,3	19,85	22,25	89,21	

12. Penanaman Modal Daerah

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di bidang penanaman modal terdiri dari 3 program yang dijabarkan ke dalam 6 indikator program yang meliputi : 1) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA); 2) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN); 3) Jumlah Investor Dalam Negeri; 4) Jumlah Investor Luar Negeri; 5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP); dan 6) Persentase Pelayanan Sesuai SOP.

Dilihat dari capaian realisasi dari tahun 2017-2019 kinerja urusan penanaman modal terdapat 2 indikator dengan trend meningkat setiap tahunnya yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN) pada tahun 2017 sebesar Rp1.398 M meningkat menjadi Rp 3.500M pada tahun 2019, dan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) sebesar 76,61 pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 82,34 pada tahun 2019. Indikator yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat ada 3 indikator yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) pada tahun 2017 mempunyai realisasi capaian sebesar Rp 13.823 M selanjutnya menurun di tahun 2018 sebesar Rp 11.138 M dan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 20.450 M, indikator Jumlah Investor Dalam Negeri realisasi pada tahun 2017 sebesar 291 investor kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 173 investor dan kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 4.365 investor, indikator Jumlah Investor Luar Negeri realisasi pada tahun 2017 sebesar 203 investor pada tahun 2018 menurun menjadi 120 investor dan selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 493 investor. Satu indikator lagi yang di targetkan dalam RPJM mengalami capaian per tahun menurun yaitu Persentase Pelayanan Sesuai SOP, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi capainnya sebesar 100% namun pada tahun 2019 menurun menjadi 92,88%.

Selanjutnya dilihat dari capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat dari 6 indikator yang di targetkan pada RPJM terdapat 3 indikator telah tercapai, 2 indikator masih akan tercapai dan 1 indikator masih perlu upaya keras. Indikator yang masih perlu upaya keras yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA). Dilihat pada indikator ini target akhir RPJM sebesar Rp 38.500 M, sampai dengan tahun 2019 baru terealisasi sebesar Rp 20.450 M, dengan persentase capaian 50,12%. Namun jika di lihat dari capaian per tahun, indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) telah melampaui target tahunan. Total nilai investasi PMA pada tahun 2019 sebesar Rp 20.450 M. Angka ini diperoleh dari realisasi investasi kabupaten kota se- Provinsi Kepri dengan nilai terbesar di sumbang dari Batam sebesar Rp 11.261 M. Adapun negara asal investasi di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Singapura, kemudian disusul Cina, Jepang, Hongkong, Nederland, dan negara-negara lainnya. Dengan sektor usaha yang medominasi adalah jasa, manufaktur, pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Sementara itu, 2 indikator yang masih berstatus akan tercapai yaitu indikator jumlah investor luar negreri dengan persentase capaian 94,81% dan indikator Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) dengan persentase capaian sebesar 91,49%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya Koordinasi antar OPD Teknis terkait waktu Pelayanan Perizinan, walaupun komponen ini masuk dalam kuadran pertahankan, namun didapati atribut ini kerap kali menjadi unsur pelayanan yang dipersepsikan kurang puas oleh pengguna layanan. Capaian kinerja urusan penanaman modal Provinsi Kepri Tahun 2017 -2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.19

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.300	7.500	7.700	13.823	11.138	20.450	38.500	53,12	
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	500	600	700	1.398	4.385	5.656	3.500	161,60	
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	135	140	145	291	173	4.365	725	602,07	
	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	100	102	104	203	120	493	520	94,81	
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan										
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	81,00	84,00	86,00	76,61	77,2	82,34	90,00	91,49	
	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80,00	81,00	82,00	100	100	92,88	84,00	110,57	

13. Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 5 program dan 6 indikator, adapun perkembangan realisasi kinerja 6 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 4 indikator yang mengalami tren perkembangan meningkat yaitu indikator jumlah pemuda yang berwirausaha dari sebanyak 22 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2019, indikator jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional dari sebesar 21 penghargaan pada tahun 2017 meningkat menjadi 35 penghargaan pada tahun 2019, indikator persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat dari sebanyak 76% pada tahun 2017 meningkat menjadi 104,76% pada tahun 2019, dan indikator jumlah kader pemuda anti narkoba dari sebanyak 34 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2019. Kemudian ada 2 indikator yang mengalami tren penurunan yaitu jumlah pemuda pelopor dari sebanyak 2.287 orang pada tahun 2017 menurun menjadi 988 orang pada tahun 2019 dan indikator jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat dari sebanyak 16 event pada tahun 2017 menurun menjadi 14 event pada tahun 2019.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat dengan persentase realisasi capaian 104,76%. Sedangkan indikator yang berstatus jauh dari target akhir RPJMD terdiri dari 5 indikator yakni indikator jumlah pemuda pelopor dengan realisasi capaian 30,17%, indikator jumlah pemuda yang berwirausaha dengan realisasi capaian 40,00%, indikator jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional dengan realisasi capaian 47,30%, indikator jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat dengan realisasi capaian 24,14 dan indikator jumlah kader pemuda anti narkoba dengan realisasi capaian 20,00%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.20

Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan										
	Jumlah pemuda pelopor	Orang	700	25	800	2.287	557	988	3275	30,17	
2	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda										
	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Orang	20	25	30	22	25	60	150	40,00	
3	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga										
	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional	Penghargaan	15	5	17	21	17	35	74	47,30	
	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	10	0	14	16	17	14	58	24,14	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga										
	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	%	28,57	33,33	61,90	76	90,48	104,76	100	104,76	
5	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba										
	Jumlah kader pemuda anti narkoba	Orang	50	55	60	34	55	60	300	20,00	

14. Statistik

Urusan bidang statistik memiliki 1 program yakni program pengembangan data/informasi statistik sektoral dengan 1 indikator yakni indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepri. Dilihat dari perkembangan dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tidak ada data di tahun 2017 menjadi 25% di tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 99,67% di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD indikator bidang statistik tersebut berstatus telah mencapai target akhir RPJMD dengan realisasi capaian sebesar 284,77%. Secara lebih rinci capaian urusan bidang statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.21

Capaian Kinerja Urusan Statistik dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral										
a	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepri	%	0	20,00	25,00	NA	25	99,67	35,00	284,77	

15. Persandian

Urusan Persandian terdiri dari 1 program dan 1 indikator, perkembangan realisasi kinerja indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu mengalami tren perkembangan meningkat dari sebanyak 2,5% pada tahun 2017 meningkat menjadi 100% pada tahun 2019.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.22

Capaian Kinerja Urusan Persndian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi										
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	10	20,00	30,00	2,5	20	100	50,00	200,00	

16. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 5 indikator, adapun perkembangan realisasi kinerja 5 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 5 indikator mengalami tren perkembangan meningkat yaitu indikator persentase bangunan yang berciri khas melayu dari sebanyak 8,28% pada tahun 2017 meningkat menjadi 14,32% pada tahun 2019, indikator persentase nilai adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi dari sebesar 10,2% pada tahun 2017 meningkat menjadi 40,46%, indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari dari sebanyak 19,58% pada tahun 2017 meningkat menjadi 22,03% pada tahun 2019, indikator persentase organisasi budaya berkategori maju dari sebanyak 14,49% pada tahun 2017 meningkat menjadi 94,2% pada tahun 2019 dan indikator persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local dari sebanyak 6,49% pada tahun 2017 meningkat menjadi 66,02% pada tahun 2019.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator persentase organisasi budaya berkategori maju dengan persentase realisasi capaian 130,00%. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD terdiri dari 2 indikator yakni indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari dengan realisasi capaian 98,45% dan indikator persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local dengan realisasi capaian 91,66%. Kemudian masih ada 2 indikator yang berstatus masih jauh dari target akhir RPJMD yaitu persentase bangunan yang berciri khas melayu dengan realisasi capaian 20,24% dan indikator persentase nilai adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi dengan realisasi capaian 56,26%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.23

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan Nilai Budaya										
	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02	16,54	32,33	8,28	13,44	14,32	70,75	20,24	
	Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	8,87	16,48	32,78	10,2	19,98	40,46	71,91	56,26	
2	Program pengelolaan kekayaan budaya										
	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	19,58	20,28	20,98	19,58	19,93	22,03	22,38	98,45	
3	Program pengelolaan keragaman budaya										
	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	14,49	28,99	43,48	14,49	37,68	94,2	72,46	130,00	
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	6,49	21,06	35,62	6,49	13,29	66,02	72,03	91,66	

17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki 2 program utama yang dijabarkan kedalam 3 indikator yakni 1) indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan; 2) indikator Persentase Peningkatan Bahan Pustaka; dan 3) indikator IKM Pelayanan Perpustakaan. Dari ketiga indikator dilihat dari tren capaiannya ke-3 indikator telah memiliki trend capaian yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017-2019. Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan memiliki capaian 27,65 % pengunjung di tahun 2017 meningkat menjadi 28,64% di tahun 2019, namun jika dibandingkan dengan target akhir capaian pada tahun 2019 belum mampu mencapai target akhir akhir RPJMD sebesar 32,91% . hal yang sama juga terjadi pada indikator persentase peningkatn bahan pustaka yang pada tahun 2017 memiliki realisasi sebesar 41,32% di tahun 2017 menjadi 52,96% di tahun 2019, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga belum mencapai target akhir RPJMD persentase realisasinya hanya sebesar 74,14%.

Indikator IKM pelayanan perpustakaan juga memiliki realisasi capaian sebesar 81,94% di tahun 2017 meningkat menjadi 84,6% di tahun 2019, namun juga belum mampu mencapai target akhir RPJMD dengan persentase realisasi sebesar 94%. Secara lebih rinci capaian indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.24

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
a	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	pengunjung	21,84	25,00	26,58	27,65	28	28,64	32,91	87,02	
b	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka	Judul	35,66	44,60	53,55	41,32	45,88	52,96	71,43	74,14	
2	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan										
a	IKM Pelayanan Perpustakaan	Poin	82	84	86	81,94	84,35	84,6	90	94,00	

18. Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki 2 program dan 2 indikator yakni indikator Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dan indikator Persentase perangkat daerah provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Indikator Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dilihat dari capaiannya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,72% menjadi 1,7% di tahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,62% capaian indikator tersebut berstatus belum mampu mencapai target akhir karena persentase realisasinya sebesar 64,89%.

Hal yang serupa terjadi pada indikator Persentase perangkat daerah provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku yang memiliki realisasi capaian dari tahun 2017 sebesar 63,83% meningkat menjadi 85,11% di tahun 2019, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD persentase realisasi capaiannya hanya sebesar 85,11%. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.25

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengelolaan dan Pengolahan Kearsipan										
a	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	%	0,70	1,18	1,66	0,72	1,21	1,7	2,62	64,89	
2	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kearsipan										
a	Persentase perangkat daerah provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	57,45	68,09	82,98	63,83	74,47	85,11	100,00	85,11	

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 7 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 10 indikator program yaitu: (1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap; (2) Nilai Tukar Nelayan (NTN); (3) Jumlah produksi perikanan budidaya; (4) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); (5) Jumlah produk olahan Hasil perikanan; (6) Nilai Ekspor Hasil Perikanan; (7) Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III; (8) Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; (9) Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan; (10) Persentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2019, terdapat 6 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari sebesar 304.038,71 ton menjadi 309.287,15 ton; Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari sebesar 110,7% menjadi 117,42%; Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dari sebesar 107,23% menjadi 126,77%; Nilai Ekspor Hasil Perikanan dari sebesar 27.371.747 US \$ menjadi 33.994.231 US \$; Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan dari sebesar 89% menjadi 100%; dan Persentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh dari 10,42% menjadi 13,3%. Terdapat 2 indikator yang capaiannya menurun dari tahun 2017-2019 yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya dari sebesar 34.302 ton menjadi 33.003,11 ton; dan Jumlah produk olahan hasil perikanan dari sebesar 1.902,48 ton menjadi 1.803,55 ton.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 10 indikator program urusan kelautan dan perikanan, sebanyak 6 indikator memiliki status kinerja telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator akan mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 2 indikator kinerja perlu upaya keras. Indikator kinerja yang perlu upaya keras yaitu Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III; dan Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Indikator Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III capaiannya masih rendah karena Dari 4 kawasan Konservasi Perairan yang ditargetkan terdapat 1 (satu) kawasan (Kabupaten Bintan) telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan akan ditetapkan menjadi KKPD Kabupaten Bintan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan 3 Kawasan dalam Proses penyelesaian. Indikator Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan capaiannya masih rendah karena Dokumen Peraturan Perundangan (RZWP3k) saat ini dalam tahap Draft Dokumen final yang akan disampaikan ke KKP untuk Tanggapan dan Saran.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.26

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	304.019,32	304.628,57	305.239,05	304.038,71	304.975,02	309.287,15	306.463,67	100,92	
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	109,60	109,84	110,08	110,7	115,26	117,42	110,57	106,20	
2	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya										
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.649,95	33.717,38	33.784,95	34.302	34.399,86	33.003,11	33.920,50	97,30	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	107,52	107,75	107,99	107,23	108,2	126,77	108,47	116,88	
3	Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan										
	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.902,48	1.336,82	1.803,55	1.331,54	135,45	
4	Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan										
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.773.	31.779.	31.786.	27.371.747	70.168.692	33.994.231,20	31.798.767	106,90	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
			340	695	051						
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	2	3	4	1	1	1	4	25,00	
	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/ Peraturan	1 (dok. pendukung RZWP3K)	1 (Perda RZWP3K)	1 (Pergub Rencana pengelolaan wp3K)	1 (dok. pendukung RZWP3K)	-	-	4 Produk peraturan perundang-undangan tentang WP3K	25,00	
6	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										
	% kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan	%	100,00	100,00	100,00	89	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	perikanan yang diselesaikan										
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan										
	Persentase kelompok (KUB,Poklahsar , Pokdakan) yang dibina disuluh	%	10,42	11,77	13,13	10,42	12	13,3	18,19	73,14	

2. Pariwisata

Urusan pilihan bidang pariwisata terdiri dari 5 program yang dijabarkan kedalam 7 indikator yaitu 1) Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau; 2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB; 3) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau; 4) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau; 5) Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau; 6) Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau dan 7) Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif.

Dilihat dari realisasi capaian dari tahun 2017 – 2019 terdapat 5 indikator yang mengalami peningkatan realisasi capaian di tiap tahunnya yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,2% meningkat menjadi 2,46 % pada tahun 2019, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,30 juta orang menjadi 2,86 juta orang pada tahun 2019, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,89 meningkat sebesar 4,227 juta orang pada tahun 2019, Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau dari tahun 2018 sebesar Rp 14.299 M meningkat menjadi Rp 19.625 M pada tahun 2019; dan Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,73% meningkat menjadi 24,21% pada tahun 2019. Indikator yang mengalami penurunan ada 2 yaitu Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,09 hari menurun menjadi 1,96 hari pada tahun 2019; dan Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 52,66% menurun menjadi 50,87% pada tahun 2019.

Selanjutnya dilihat dari perbandingan capaian tahun 2019 dengan target RPJMD sudah cukup baik, yaitu terdapat 3 indikator yang telah tercapai dan masih ada 4 indikator yang masih on the track untuk mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih akan tercapai diantaranya yaitu Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau dan Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif. Indikator rata-rata lama tinggal jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 89,09%, dengan status akan tercapai. Hal ini disebabkan kurangnya objek-objek wisata baru di Kepulauan Riau dan jadwal kepastian penyelenggaraan even yang masih sering berubah, sehingga untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan ke depannya akan memberikan kepastian jadwal pelaksanaan event, karena sebagian besar wisatawan telah merencanakan jauh-jauh hari untuk menghabiskan waktu liburannya. Sedangkan indikator Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2019 persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 97,83%. Hal ini disebabkan karena wisatawan (terutama Wisnus) lebih memilih untuk tinggal di rumah teman/ saudaranya, sesuai dengan hasil penelitian (passenger exit survey) yang menyebutkan bahwa wisatawan nusantara yang datang ke Kepulauan Riau 83,17 % menginap di rumah teman/ saudara, komersil lainnya 2.62 % dan hanya 11,80 % yang menginap di hotel. Untuk meningkatkan

tingkat hunian wisatawan, diharapkan program hot deals pemerintah pusat bisa diarahkan untuk membantu memberikan diskon besar-besaran kepada pengelola hotel (subsidi), sehingga wisatawan akan memiliki banyak pilihan untuk menginap di hotel.

Secara lebih rinci, capaian kinerja program urusan pariwisata bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.27

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	2,00	2,05	2,10	2,09	1,87	1,96	2,20	89,09	
2	Program Pengembangan Industri Pariwisata										
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,35	2,4	2,45	2,2	2,32	2,46	2,55	96,47	
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,20	2,25	2,30	2,07	2,6356	2,8648	2,50	114,59	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,51	1,54	1,57	2,89	3,547	4,227	1,63	259,33	
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	NA	11.654	13.409	NA	14.299	19.625	16.809	116,75	
4	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata										
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	50,00	50,50	51,00	52,66	53,75	50,87	52,00	97,83	
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif										
	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	%	1,00	10,00	20,00	2,73	13,3	24,21	40,00	60,53	

3. Pertanian

Urusan Pertanian terdiri dari 5 program dan 12 indikator yakni 1) Nilai Tukar Petani (NTP); 2) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; 3) Jumlah Produksi Padi (ton); 4) Jumlah Produksi Tanaman Palawija; 5) Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura; 6) Jumlah produksi Tanaman Perkebunan; 7) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar; 8) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil; 9) Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat; 10) Persentase Peningkatan Populasi Ternak; 11) Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna; dan 12) Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

Adapun perkembangan realisasi kinerja 12 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 8 indikator trennya membaik yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2017 sebesar 97,98% meningkat menjadi sebesar 101,41%, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari sebesar 1,16% pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,2%, Jumlah produksi padi meningkat dari sebesar 601 ton menjadi 1.167,80 ton, Jumlah produksi tanaman komoditas hortikultura meningkat dari sebesar 40.301 ton menjadi 72.654,90 ton, Persentase angka prevalensi penyakit hewan kecil menurun dari sebesar 0,0035% menurun menjadi 0,002%, Persentase Peningkatan populasi ternak dari 4,67% menjadi sebesar 5,32%, Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna dari sebesar 3% meningkat menjadi sebesar 5,28% dan Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dari sebesar 4,53% menjadi 6,85%. Terdapat 3 indikator yang mengalami tren yang fluktuatif yaitu Jumlah produksi tanaman palawija pada tahun 2017 sebesar 19.531,5 ton menurun menjadi 14.957 ton pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 19.482,46 ton pada tahun 2019, Persentase angka prevalensi penyakit hewan besar sebesar 0,04% pada tahun 2017 menurun menjadi 0,032% pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 0,04 % pada tahun 2019, Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan sehat sebesar 78,84% pada tahun 2017 menjadi 85,71% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi sebesar 57,31% pada tahun 2019. Sedangkan indikator yang mengalami tren perkembangan yang Kurang baik terdapat 1 indikator yaitu jumlah produksi tanaman perkebunan dari sebesar 47.930 ton menurun menjadi 33.946,80 ton pada tahun 2019.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 terdapat 6 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 3 indikator yang akan mencapai target akhir dan 3 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu 1) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar; 2) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil; dan 3) Persentase Peningkatan Populasi Ternak, Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.28
Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program peningkatan kesejahteraan Petani										
a	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	97,50	98,00	98,70	97,98	97,02	101,41	100,00	101,41	
b	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,16	1,18	1,21	1,16	1,2	1,2	1,28	93,75	
2	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan										
a	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	792	850	1.020	601	833	1.167,80	1.020	114,49	
b	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.367	12.679	12.679	19.531,5	14.957	19.482,46	12.742	152,90	
c	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	39.936	41.692	43.239	40.301	46.659	72.654,90	45.822	158,56	
d	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	31.338	31.590	31.796	47.930	47.930	33.946,80	32.480	104,52	
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak										
a	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,035	0,030	0,025	0,04	0,032	0,04	0,015	37,50	
b	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,003	0,003	0,002	0,0035	0,003	0,002	0,001	50,00	
c	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	54,90	55,40	56,20	78,84	85,71	57,31	58,50	97,97	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
a	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	6,00	5,00	5,00	4,67	5,05	5,32	26,00	20,46	
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan										
a	Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	4,44	5,00	5,28	3	5	5,28	6,11	86,40	
b	Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	4,54	4,63	4,63	4,53	4,63	6,85	4,73	144,83	

4. Kehutanan

Urusan Kehutanan terdiri dari 1 program dan 5 indikator yakni 1) Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau; 2) Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB; 3) Luas lahan kritis terehabilitasi; 4) Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan 5) Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Adapun perkembangan realisasi kinerja 5 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 4 indikator trennya membaik yaitu Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau dari sebesar 66,66% pada tahun 2017 meningkat menjadi 100% pada tahun 2019, Luas lahan kritis terehabilitasi pada tahun 2017 seluas 243 ha menjadi seluas 400 ha pada tahun 2019, Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 20,6% meningkat menjadi 100% pada tahun 2019, dan Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pada tahun 2017 sebesar 75% meningkat menjadi sebesar 85% pada tahun 2019. Terdapat 1 indikator yang mengalami tren yang fluktuatif yaitu Presentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada tahun 2017 sebesar 0,01% meningkat menjadi sebesar 0,33% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 0,01% pada tahun 2019.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 terdapat 2 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 1 indikator yang akan mencapai target akhir dan 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB dan Luas lahan kritis terehabilitasi, Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.29
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir R RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan										
a	Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	%	50,00	83,30	100,00	66,66	100	100	100,00	100,00	
b	Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,03	0,03	0,01	0,33	0,01	0,05	20,00	
c	Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	243	220	225	243	386	400	1.661	24,08	
d	Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	-	50,00	66,67	20,6	20,6	100	100,00	100,00	
e	Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	75,00	80,00	85,00	75	18,75	85	95,00	89,47	

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) memiliki 5 program yang dijabarkan dalam 9 indikator yakni Indikator 1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan; 2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah; 3) Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP; 4) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku; 5) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah; 6) Rasio Elektrifikasi; 7) Rasio Desa /Kelurahan Berlistrik; 8) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan; dan 9) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed).

Dari 9 indikator tersebut jika dilihat perkembangan setiap tahunnya terdapat 6 indikator yang memiliki tren capaian meningkat setiap tahunnya yakni 1) indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan mengalami peningkatan dari 20% di tahun 2017 menjadi 33,33% di tahun 2019; 2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah dengan capaian 0 di tahun 2017 menjadi 3 kab/kota di tahun 2018 dan 2019; 3) indikator Rasio Elektrifikasi 91,44 % di tahun 2017 meningkat menjadi 92,59% di tahun 2019; 4) indikator Rasio Desa /Kelurahan Berlistrik juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 78,61% meningkat menjadi 89,9% di tahun 2019; 5) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan mengalami peningkatan dari 21,58% di tahun 2017 menjadi 70,79% di tahun 2019; dan 6) indikator Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) meningkat dari 0,0006% di tahun 2017 menjadi 0,0007% di tahun 2019.

Selanjutnya terdapat 2 indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat yakni indikator Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP dan indikator Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Indikator yang mengalami penurunan yakni indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah yang mengalami penurunan dari 1,91% pada tahun 2017 menjadi 1,35% pada tahun 2019.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 7 indikator program berstatus akan mencapai target RPJMD, dan 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan dengan persentase realisasi hanya 33,33% dan indikator Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah dengan persentase realisasi hanya 42,86%. Secara lebih rinci capaian indikator program RPJMD urusan ESDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.30

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah										
a	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	20,00	35,00	50,00	20	23	33,33	100,00	33,33	
b	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	-	3,00	4,00	-	3	3	7,00	42,86	
2	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara										
a	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	70,00	75,00	80,00	70	100	90	95,00	94,74	
b	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	70,00	75,00	80,00	70	85,71	90	95,00	94,74	
c	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	1,00	1,20	1,40	1,91	1,28	1,35	1,50	90,00	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan										
a	Rasio Elektrifikasi	%	89,15	90,50	91,50	91,44	91,5	92,59	93,50	99,03	
b	Rasio Desa /Kelurahan Berlistrik	%	81,50	88,50	95,45	78,61	85,1	89,9	100,00	89,90	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
4	Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan										
a	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	20,00	45,00	64,00	21,58	32,1	70,79	100,00	70,79	
5	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi										
a	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0006	0,0007	0,0008	0,0006	0,0007	0,0007	0,0010	70,00	

6. Perdagangan

Urusan pilihan bidang perdagangan memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 9 indikator, 1) yaitu Fluktuasi Harga Bahan Pokok; 2) Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk; 3) Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); 4) Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK); 5) Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri; 6) Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau; 7) Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA; 8) Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor; dan 9) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Dilihat dari realisasi capaian tahun 2017-2019, ada 2 indikator yang realisasi capaiannya meningkat setiap tahun yaitu indikator Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk realisasi capaian tahun 2017 sebesar 83% meningkat menjadi 163% pada tahun 2019 dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB realisasi capaiannya tahun 2017 sebesar 7% meningkat menjadi 9,07% pada tahun 2019. Terdapat 2 indikator yang realisasi capaiannya menurun tiap tahunnya yaitu Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) realisasi capaian tahun 2017 sebesar 37 % menurun menjadi 25% pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena masih adanya jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan pemerintah provinsi Kepri meningkatkan pengawasan peredaran barang yang tidak memenuhi standar; indikator Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan dari realisasi capaian tahun 2017 sebesar Rp 8.654.142 menjadi Rp 7.793.311 pada tahun 2019.

Selanjutnya jika dilihat dari perbandingan RPJMD dengan capaian tahun 2019, urusan perdagangan memiliki masih ada 2 indikator yang akan tercapai dan 7 indikator yang telah tercapai. Kedua indikator yang akan tercapai yaitu Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase capaian sebesar 77,93% dan Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor dengan persentase capaian sebesar 92 %. Indikator Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau masih akan tercapai disebabkan karena rendahnya permintaan global, dampak dari perang dagang antara Amerika dan China. Untuk menghindari terjadinya penurunan, maka diharapkan untuk meningkatkan koordinasi, pengembangan jaringan kerjasama dalam peningkatan ekspor non Migas yang menjadi produk potensial dan unggulan di Kepulauan Riau. Indikator kedua yang masih akan tercapai yaitu Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor. Secara lebih rinci kinerja program urusan perdagangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.31

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2018-2021) / Penggabungan 2 Program Tahun 2017: Program Peningkatan Perdagangan dan Industri Dalam dan Luar Negeri; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri										
	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	persen	< 10%	< 10%	< 10%	7,5	2,54	8,33	< 10%	111,67	
	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	83,00	84,00	89,00	83	84	163	100,00	163,00	
2	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan										
	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	37,00	34,00	31,00	37	34	25	25,00	100,00	
	Pesentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor										
	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.258,94	1.332,21	1.405,48	2.915,73	3.034,45	2.727,48	1.550,2	175,94	
	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.557.950	8.657.950	9.100.000	8.654.142	8.489.050	7.793.311	10.000.000	77,93	
	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	8.985	9.765	10.000	27.721	28.725	28.418	11.250	252,60	
	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	23	23	23	23	23	23	25	92,00	
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	0,08	0,08	8,35	7	8,56	9,07	8,52	106,46	

7. Perindustrian

Urusan pilihan bidang perindustrian terdiri dari 5 program dengan dijabarkan dalam 10 indikator yaitu 1) Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang; 2) Jumlah Industri Besar; 3) Jumlah kawasan industri; 4) Jumlah Kelompok Klaster Industri; 5) Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB; 6) Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas; 7) Jumlah industri kecil dan Menengah; 8) Jumlah industri berbahan baku lokal; 9) Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal; dan 10) Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri.

Dilihat dari realisasi capaian tahun 2017-2019 dari ke 10 indikator, ada 7 indikator yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya yaitu Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang realisasi capaian tahun 2017 sebesar 6 sentra meningkat menjadi 8 sentra pada tahun 2019; Jumlah industri kecil dan Menengah realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2.000 unit meningkat menjadi 2.400 unit pada tahun 2019; Jumlah industri berbahan baku lokal realisasi capaian tahun 2017 sebesar 1.750 unit meningkat menjadi 1.969 unit pada tahun 2019, Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal realisasi capaian tahun 2017 sebesar 11,6 % meningkat menjadi 12,1% pada tahun 2019.

Sedangkan dilihat dari perbandingan antara realisasi capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD, maka ke 10 indikator tersebut hanya 1 indikator yang telah mencapai target sampai dengan tahun 2019, 8 indikator akan tercapai dan ada 1 indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaian target RPJMD. Indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya jika di bandingkan target RPJM yaitu Jumlah Kelompok Klaster Industri dengan persentase capaian 16,67%. Hal ini disebabkan karena permintaan terhadap produk industri berkurang sehingga tidak mendirikan perusahaan baru. Untuk meningkatkan kelompok kluster industri di Provinsi Kepri salah satu nya dengan cara menawarkan potensi unggulan kepada calon investor untuk membangun industri di Provinsi Kepulauan Riau. Namun indicator Jumlah Kelompok Klaster Industri jika dilihat dari perbandingan dengan target tahun 2019 sudah memenuhi target tahun 2019, yaitu 1 klaster. Secara lebih rinci kinerja program urusan perindustrian bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.32

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial										
	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	6	7	8	6	8	8	10	80,00	
2	Program Penataan Struktur Industri										
	Jumlah Industri Besar	Unit	776	781	785	779	553	554	795	69,69	
	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	26	26	26	39	66,67	
	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	2	1	1	2	1	1	6	16,67	
3	Program Pengembangan Industri Unggulan										
	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	36,50	37,00	37,50	37	36,12	37,57	38,50	97,58	
	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	129.270	131.150	133.060	137.396	121.026	133.060	136.970	97,15	
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	2.000	2.200	2.400	2.000	2.200	2.400	3.000	80,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.720	1.850	1.969	1.750	1.850	1.969	2.200	89,50	
	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11,60	11,85	12,10	11,6	11,85	12,1	12,38	97,74	
5	Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi										
	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	%	0	0	0	0,026	0,058	0,091	0	3642,19	

8. Transmigrasi

Urusan pilihan bidang transmigrasi terdiri dari 1 program yang dijabarkan dengan 2 indikator yaitu Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri dan Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata. Dilihat dari realisasi capaian tahun 2017-2019, ke dua indikator ini memiliki capaian yang stagnan tiap tahunnya. Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri realisasi capaian tahun 2017 sebesar 1471 KK dan 2019 masih tetap sama 1.471 KK; Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata realisasi capaian tahun 2017-2019 sebesar 2 kawasan.

Namun, jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, urusan transmigrasi masih belum menunjukkan kinerja yang baik. Dilihat dari 2 indikator yang di targetkan, masih ada 1 indikator yang akan tercapai dan 1 indikator masih perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras yaitu Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri, dengan persentase capaian sebesar 53,88% sampai dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Rencana Kawasan Transmigrasi baru di Kabupaten Natuna belum sesuai dengan kondisi sebenarnya (RKT dibuat kementerian). Sampai dengan saat ini Telah dilakukan koordinasi dengan kementerian untuk dilakukan perbaikan terhadap Rencana Kawasan Transmigrasi yang dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (RTRW) di Kab. Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci kinerja program urusan transmigrasi bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.33

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi										
	Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	2.730	53,88	
	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata	Kawasan	2	2	2	2	2	2	3	66,67	

D. Urusan Penunjang

1. Urusan Penunjang Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui 8 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 12 indikator program yaitu: (1) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD; (2) Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD; (3) Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD; (4) Persentase kegiatan prioritas yang didanai; (5) Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir; (6) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah; (7) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah; (8) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah; (9) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah; (10) Persentase kerjasama yang diimplementasikan; (11) Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan (12) Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2019, terdapat 4 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dari sebesar 80% menjadi 100%; Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD dari sebesar 84% menjadi 85%; Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dari sebesar 30,00% menjadi 33,00%; Persentase kegiatan prioritas yang didanai dari sebesar 80% menjadi 81%. Terdapat 1 indikator yang capaiannya menurun yaitu Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dari 100% menjadi 80%. Sementara itu sebanyak 7 indikator kinerjanya stabil, tidak mengalami perubahan dari tahun 2017.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 12 indikator program fungsi penunjang perencanaan pembangunan, sebanyak 8 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 4 indikator program akan mencapai target akhir RPJMD. Secara umum pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tidak mengalami permasalahan yang berarti, namun dari sisi kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan agar dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dapat mendorong pencapaian kinerja pada perangkat daerah yang lain.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.34

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

Laporan Kinerja Badan Pengembang Perencanaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Kinerja RPJMD sampai Tahun 2019											
No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program perencanaan Pembangunan Daerah										
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	93,00	96,00	100,00	80	96	100	100,00	100,00	
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	NA	84,00	85,00	NA	84	85	87,00	97,70	
	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	76,00	96,00	100,00	100	96	100	100,00	100,00	
	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	80,00	80,00	81,00	80	80	81	82,00	98,78	
	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>30,00	>31,00	>33,00	30,00	31,00	33	>36	91,66	
2	Program perencanaan Perekonomian										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
3	Program Perencanaan sosial budaya										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
4	Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
5	Program Perencanaan Pemerintahan										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
6	Program Kerjasama Pembangunan										
	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	42,00	60,00	80,00	100	60	80	100,00	80,00	
8	Program Pengendalian dan Evaluasi										
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	NA	100,00	100,00	NA	100	100	100,00	100,00	

2. Urusan Penunjang Keuangan

Urusan Penunjang keuangan diampu oleh 2 perangkat daerah yakni Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Urusan keuangan di laksanakan melalui 7 program dan 13 indikator yang meliputi indikator 1) Realisasi pendapatan asli daerah; 2) Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah; 3) Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih; 4) Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan; 5) Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi; 6) Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat; 7) Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor); 8) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT; 9) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat; 11) Persentase kepuasan pelayanan; 12) Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan; dan 13) Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama).

Dari ke 13 indikator tersebut, dilihat dari capaiannya sejak tahun 2017-2019 terdapat 9 indikator yang mengalami trend meningkat setiap tahunnya yakni indikator 1) Realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari 1.091 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 1.306 triliun rupiah di tahun 2019; 2) Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah yang memiliki capaian 33,59 % di tahun 2017 meningkat menjadi 35,19% di tahun 2019; 3) indikator Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang semula berupa Samsat Link ditahun 2017 menjadi e Samsat dan e payment di tahun 2019; 4) indikator Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat mengalami peningkatan dari 2,3 % di tahun 2017 menjadi 3% di tahun 2019; 5) indikator Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor meningkat dari 15 menit di tahun 2017 menjadi 10 menit di tahun 2019; 6) indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT mengalami peningkatan dari 7,18 skor di tahun 2017 menjadi 8 skor di tahun 2019; 7) indikator Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat mengalami peningkatan dari 88% menjadi 100% di tahun 2019; 8) indikator Persentase kepuasan pelayanan memiliki realisasi 82% di tahun 2017 menjadi 97% di tahun 2019 dan 9) indikator Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama) dari 41,95% menjadi 70 % di tahun 2019.

Kemudian indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat terdapat 2 indikator yakni indikator Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan memiliki realisasi 97,04% di tahun 2017 menurun menjadi 94,85% dan meningkat kembali menjadi 107,25%; indikator

Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan 71,43% di tahun 2017 kemudian menurun menjadi 68,93% di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 70% di tahun 2019.

Untuk indikator yang mengalami trend realisasi menurun meliputi Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih dengan realisasi 17,17% di tahun 2017 turun menjadi 12,75% di tahun 2019. Sedangkan indikator yang mengalami perkembangan dengan trend stagnan yakni Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota dengan capaian BB sejak tahun 2017-2019.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 6 indikator berstatus telah mencapai target akhir, 6 indikator berstatus akan mencapai target akhir RPJMD dan 1 indikator berstatus memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu indikator Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat dengan realisasi capaian sebesar 6%. Secara lebih rinci capaian urusan penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.35

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
B	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH										
1	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah										
a	Realisasi pendapatan asli daerah	Triliun Rupiah	1,213	1,224	1,330	1.091	1.229	1.306	1.624	80,42	
b	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	%	34,49	36,85	37,76	33,59	35,05	35,19	39,93	88,13	
c	Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	%	12,00	15,00	18,00	17,17	15	32	25,00	128,00	
2	Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah										
a	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	90,00	90,00	90,00	97,04	94,85	107,25	90,00	119,17	
3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi										
a	Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis layanan	Samsat Link	e Samsat	e Samsat	Samsat Link	E-Samsat dan e-payment	e Samsat dan e-payment	e Samsat dan e-payment	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
				dan e payment	dan e payment						
b	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	7,00	10,00	20,00	2,3	3	3	50,00	6,00	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik										
a	Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	Waktu (menit)	30	30	25	15	10	10	20	150,00	
b	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	Kategori (scoring)	Baik (7.50)	Baik (7.75)	Baik (8.00)	7,18	7,75	8	Baik (8.50)	94,12	
A	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
a	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	87,10	90,32	93,55	88	90	100	100,00	100,00	
b	Persentase kepuasan pelayanan	%	80,00	85,00	90,00	82	85	97	97,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah										
a	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	68,93	68,93	74,07	71,43	68,93	70	84,36	82,98	
b	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama)	%	40,00	55,56	71,11	41,95	55,56	70	100,00	70,00	
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota										
a	Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	80	

3. Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat

Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat memiliki 2 program yang dijabarkan kedalam 6 indikator yakni 1) Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan; 2) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan; 3) Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat; 4) Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik; 5) Indeks Kepuasan Pelayanan ASN; dan 6) Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi.

Dari 6 indikator tersebut jika dilihat perkembangan setiap tahunnya terdapat 1 indikator yang memiliki tren capaian meningkat, yaitu Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik mengalami peningkatan dari 92,7% ditahun 2017 menjadi 100% tahun 2019. selanjutnya terdapat 3 indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat yakni 1) Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan ; 2) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan ; dan 3) Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi 17,17% tahun 2017 menurun 13,68 tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat 31,2%. Terdapat 1 indikator yang menurun yaitu indikator Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat dari 15 kasus tahun 2017 menjadi 12 kasus tahun 2019. Disisi lain Indikator yang mengalami perkembangan cenderung stagnan adalah indikator Indeks Kepuasan Pelayanan ASN dengan nilai indeks B tahun 2019.

Dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan dengan persentase realisasi capaian 110,35%; indikator Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik dengan realisasi capaian 105,26%; dan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan ASN dengan realisasi capaian 100,00%.

Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD terdiri dari 2 indikator yakni indikator Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi capaian 77,36%; dan indikator Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi dengan realisasi capaian 85,83%. Kemudian terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai tarhet akhir RPJMD yaitu indikator Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat dengan realisasi capaian 50,00%

Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.36

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	54,00	58,00	60,00	55,87	55,13	58,02	75,00	77,36	
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	78,00	80,00	82,00	97,02	84,8	93,8	85,00	110,35	
	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	16 Kasus	14 Kasus	12 Kasus	15	13	12	8	50,00	
	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	90,00	92,00	93,00	92,7	100	100	95,00	105,26	
	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B	B	B	B	B	B (77.70)	B	100,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	14,07	19,64	25,21	17,17	13,68	31,2	36,35	85,83	

4. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 2 program dan 2 indikator, adapun perkembangan realisasi kinerja 5 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 1 indikator mengalami tren perkembangan meningkat yaitu indikator persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah dari NA pada tahun 2017 meningkat menjadi 5% pada tahun 2019. Kemudian ada 1 indikator yang mengalami tren penurunan yaitu indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder pada tahun 2017 sebanyak 59% menurun menjadi 55% pada tahun 2019.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD yakni indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dengan persentase realisasi capaian 78,57%. Kemudian masih ada 1 indikator yang berstatus masih jauh dari target akhir RPJMD yaitu indikator persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah dengan realisasi capaian 16,67%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.37

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan										
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	50,00	55,00	60,00	59	55	55	70,00	78,57	
1	Program Pengembangan Inovasi Daerah										
	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	NA	5,00	10,00	NA	0	5	30,00	16,67	

5. Urusan Penunjang Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan dilaksanakan melalui sebanyak 4 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 9 indikator program yaitu: (1) Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi; (2) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau; (3) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau; (4) Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai; (5) Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri; (6) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (7) Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (8) Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P, dan (9) Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2019, terdapat 1 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai dari 60% menjadi 90%. Terdapat pula 1 indikator program yang capaiannya menurun yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau, dari sebesar 100% menjadi hanya 71,43%.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 9 indikator program fungsi penunjang perencanaan pembangunan, sebanyak 8 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 1 indikator program akan mencapai target akhir RPJMD. Capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau masih lebih rendah dibandingkan target tahun 2019 sehingga perlu ada perbaikan kinerja dengan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fungsi penunjang pengawasan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.38

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.										
	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	3	3	3	3	3	100,00	
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00	100,00	100,00	100	100	71,43	100,00	71,43	
2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan										
	Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai	%	40,00	50,00	60,00	60	92	92	80,00	115,00	
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah										
	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	
	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	3	3	3	3	3	100,00	
	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Hijau	Hijau	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	100	
4	Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri										
	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	70,00	85,00	85,00	100	96	100	95,00	105,26	
	Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100	

6. Urusan Penunjang Sekretariat Daerah

Fungsi penunjang kesekretariatan daerah dilaksanakan melalui sebanyak 28 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 50 indikator program. Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2019, terdapat 26 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: (1) Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (2) Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota; (3) Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda; (4) persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani; (5) jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemrprov kepri; (6) Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi; (7) Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi; (8) Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target; (9) Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah; (10) Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (11) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement); (12) Skor Kepuasan Masyarakat; (13) Persentase Mubaligh yang tersertifikasi; (14) Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah; (15) Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana; (16) Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD; (17) Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (18) Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri; (19) Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja; (20) Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan; (21) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik; (22) Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian; (23) Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun; (24) Persentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan; (25) Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik; (26) Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri. Terdapat 3 indikator yang capaiannya menurun yaitu (1) Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan; (2) Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan; dan (3) Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 50 indikator program fungsi penunjang sekretariat daerah, sebanyak 24 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 17 indikator program akan mencapai target akhir RPJMD, dan 9 indikator program yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Sebanyak 9 indikator program yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu:

1. Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah, disebabkan oleh belum terbitnya PP sebagai juklak/juknis dari UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sehingga daerah belum dapat menyusun regulasi IUJK daerahnya. Peraturan Tentang IUJK yang berlaku sekarang telah membatalkan regulasi daerah terkait IUJK yang sudah ada
2. Persentase Mubaligh yang tersertifikasi
3. Persentase kegiatan dialog/seminar antar umat beragama yang difasilitasi
4. Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan
5. Jumlah BUMD baru yang terbentuk
6. Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri
7. Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian
8. Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi
9. Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fungsi penunjang sekretariat daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.39

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
A	BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN										
1	Program Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah										
	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	sangat Tinggi	sangat tinggi	Tinggi	100,00	
	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	94,21	100	100	100,00	100,00	
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan										
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	85,00	95,00	100,00	85	95	100	100,00	100,00	
	Persentase lokasi prioritas dan PKS yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	63,41	100,00	100,00	N/A	100	100	100,00	100,00	
B	BIRO HUKUM										
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										
	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Jumlah	6	7	7	10	6	4	34	188,24	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum										
	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
5	Program Pembinaan Hukum										
	Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	68,18	72,72	76,00	67	73	80	85,00	94,12	
6	Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum										
	persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani	%	50,00	30,00	40,00	57	48	120	60,00	200,00	
	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemrpov kepri	Kasus	NA	5	5	NA	4	10	20	70,00	
	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	NA	3	3	NA	1	3	3	100,00	
C	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
7	Program e-Government										
	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	2	3	5	2	3	5	7	71,43	
8	Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan										
	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 84,55 Keu 88,04	Fisik 97,04 Keu 95,97	Fisik 97,37 Keu 95,31	Fisik 100,00 Keu 95,00	98,47	
9	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan										
	Persentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
10	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi										

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah	Kab/Kota	1	3	4	1	3	3	7	42,86	
D	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA										
11	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	70,00	75,00	80,00	65,26	69,64	75,39	87,00	86,66	
12	Program e-procurement										
	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	NA	70,00	75,00	82,76	71,19	89,69	85,00	105,52	
E	BIRO UMUM										
13	Program Pelayanan KDH/WKDH yang di fasilitasi (2018-2021) / Gabungan 2 Program Tahun 2017: Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Program Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	2	100,00	
	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	2	100,00	
14	Program Dukungan Pelayanan Umum										
	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	NA	75	80	NA	75	79,94	90	88,82	
15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan sekretariat daerah										
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	90,00	90,00	90,00	100	90	90	90,00	100,00	
F	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
16	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan										
	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	Na	25,00	50,00	Na	25	50	100,00	50,00	
17	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat										
	Persentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
18	Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama										
	Persentase kegiatan dialog/seminar antar umat beragama yang difasilitasi	Kali	NA	0	0	0	0	0	2	0,00	
G	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN										
19	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan										
	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	rekomendasi	1	5	6	13	13	6	27	118,52	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	14	14	14	13	18	14	70	64,29	
	Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	NA	7	7	NA	7	7	28	50,00	
20	Program Peningkatan Kinerja BUMD										
	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	30,00	32,00	35,00	0	17,94	33,33	45,00	74,07	
	Jumlah BUMD baru yang terbentuk	BUMD	NA	NA	NA	0	0	0	1	0,00	
H	BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN PENGHUBUNG										
21	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDh/WKDh										
	Persentase Pelayanan KDh/WKDh Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
22	Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan Informasi										
	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	10,00	10,00	10,00	128	172	159	10,00	1590,00	
	Persentase Media Informasi Yang Digunakan	%	70,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
23	Program Fasilitas dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak										
	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	20	60,00	
	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan	Mou	10	10	10	8	6	10	50	48,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri										
I	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI										
24	Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah										
	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	84,00	87,00	90,00	116	90	72	100,00	72,00	
25	Program pembinaan dan pengembangan aparatur										
	Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	53,00	61,00	76,00	56	68,3	76	97,00	78,35	
	Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	53,00	61,00	76,00	67	68,3	80	97,00	82,47	
	Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan	%	99,00	99,00	99,00	99	99	99	99,00	100,00	
26	Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik										
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	65,00	74,00	84,00	74,83	77,42	85	100,00	85,00	
	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	4,00	23,00	46,00	4	4	46	100,00	46,00	
	Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	NA	57,00	71,00	NA	62,28	71	100,00	71,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
	Persentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan	%	78,00	85,00	95,00	78	88,88	95	100,00	95,00	
	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	NA	62,51	67,00	76,09	N/A	79,94	83,00	96,31	
27	Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih										
	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	63	67	70	64,18	N/A	65,83	75	87,77	
28	Program Kesejahteraan Anggota Korpri										
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi	Angka	11	NA	NA	0	0	0	20	0,00	
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional	Angka	2	NA	4	0	0	0	6	0,00	

7. Urusan penunjang Sekretariat DPRD

Urusan penunjang sekretariat DPRD memiliki 3 program yang dijabarkan kedalam 7 indikator yakni : 1) Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP; 2) Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP; 3) Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD; 4) Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan; 5) Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP; 6) Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau; dan 7) Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi. Dari ke-7 indikator tersebut jika dilihat perkembangan setiap tahunnya terdapat 3 Indikator yang capaiannya sudah 100% yaitu Indikator Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP; indikator Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP, indikator Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan; dan indikator Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP.

Selanjutnya terdapat 2 indikator yang capaiannya meningkat yaitu indikator Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 62 tahun 2017 menjadi 66 tahun 2019 dan indikator Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 183 MoU meningkat disbanding tahun sebelumnya sebesar 163 MoU. Terdapat 1 indikator yang mengalami perkembangan stagnan yaitu Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi tahun 2019 sebesar 135 orang.

Dilihat dari capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 4 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP dengan persentase realisasi capaian 104,17%; indikator Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP dengan persentase realisasi capaian 104,17%; indikator Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dengan persentase realisasi capaian 100,00%; dan indikator Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP dengan persentase realisasi capaian 104,17%. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD yaitu indikator Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. dengan persentase realisasi capaian 94,29%. Terdapat 2 Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai tarhet akhir RPJMD meliputi indikator Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase realisasi hanya 48,16%; dan Indiaktor Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi dengan persentase realisasi hanya 33,33%. Secara lebih rinci capaian indikator program RPJMD urusan penunjang secretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.40

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2019	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah										
	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	88,00	90,00	92,00	100	100	100	96,00	104,17	
	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	88,00	90,00	92,00	100	100	100	96,00	104,17	
	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	62,00	64,00	66,00	62	64	66	70,00	94,29	
	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan										
	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	88,00	90,00	92,00	100	100	100	96,00	104,17	
3	Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi										
	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan	MoU	-	-	-	-	163	183	380	48,16	

	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau										
	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali	-	95	95	-	135	135	405	33,33	

B. Permasalahan Masing-Masing Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan angka perhitungan data tahun 2018.
- 2) Cakupan penyediaan USB rendah, sehingga jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK menurun.
- 3) Masih banyaknya sekolah baru yang belum terakreditasi dan banyak sekolah yang sudah ada namun belum memenuhi syarat untuk mencapai akreditasi A dan B.
- 4) Penyusunan *Grand Design* Pendidikan Menengah dan SLB Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana, karena belum ada konsultan yang memenuhi persyaratan.
- 5) Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, sebagian karena anggaran tidak mencukupi, terjadinya duplikasi kegiatan, waktu tidak mencukupi, dan lahan tidak tersedia.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kesehatan adalah:

- 1) Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar akreditasi.
- 2) Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta kasus gizi buruk dan gizi kurang.
- 3) Kurangnya upaya-upaya preventif dan promotif pada pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan lingkungan yang sehat.
- 5) Belum maksimalnya penanggulangan kasus penyakit menular dan tidak menular.
- 6) Kurangnya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.
- 7) Belum optimalnya *universal health coverage* jaminan kesehatan nasional dan belum sepenuhnya terintegrasi antara jaminan kesehatan daerah ke JKN/KIS.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- 1) Proses penetapan Perda RTR KSP membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena banyak proses yang dilalui serta banyak pihak yang terlibat di dalamnya.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- 1) Untuk penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan lama kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau masih ada 476,85 ha. Setelah dilaksanakan identifikasi kawasan kumuh tahun 2019 terdapat penambahan luasan wilayah kumuh seluas 2.182,20 ha.
- 2) Kurangnya koordinasi dalam penanganan air minum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembangan pengelolaan air bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau masih dalam skala kecil.
- 3) Belum adanya *masterplan* penanganan persampahan sehingga penanganan persampahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau masih pada skala kecil
- 4) Penanganan drainase sudah optimal, hanya perlu dipetakan lagi penanganan drainase prioritas pada kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Kurangnya koordinasi dalam penanganan air limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembangan pengelolaan air limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau masih dalam skala kecil.
- 6) Terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana belum tersedia lahan dan gagal lelang.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- 1) Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pengawasan dalam penegakan perda dan perkara, Idealnya kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS agar tercapai target adalah 30 kali operasi/patroli dalam 1 tahun

- 2) Kurangnya anggaran untuk mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS. Jumlah Pegawai yang ingin mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPNS lebih kurang 20 orang di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Kurangnya anggaran untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan melakukan updating anggota yang ada di kab/kota. Jumlah anggota satlinmas yang seharusnya mendapatkan Pelatihan sebanyak 5.150 orang pada tahun 2019
- 4) Kurangnya anggaran sehingga tidak tercapainya target pemetaan rawan kebakaran. Target Pemetaan yang harus tercapai pada tahun 2019 adalah 5 kabupaten dan kota yang telah memiliki peta.
- 5) Belum tercapainya target jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan, disebabkan oleh: ketersediaan anggaran untuk pemulihan pasca bencana sangat besar, sementara anggaran yang tersedia kecil, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya sampai pada tahapan pemulihan pasca bencana, meliputi: penyusunan DED wilayah pasca bencana, dan dokumen inventarisasi bencana.

6) Urusan Sosial

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Sosial:

- 1) Ada perubahan kebijakan di Malaysia terkait dengan pemulangan tenaga kerja migran sejak PM Mahathir Mohamad berkuasa sejak tahun 2018. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Malaysia menanggung biaya pemulangan tenaga kerja migran sampai perbatasan antarnegara. Adapun ketentuan yang berlaku sejak 2018 sampai sekarang, biaya kepulangan tenaga kerja migran ke negara asal sepenuhnya ditanggung oleh pribadi, sehingga Pada tahun 2019, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri melalui konsulat jenderal RI ialah 4.457 orang sehingga capaiannya $4.457/22.000 = 20,26\%$.
- 2) Pengalihan P3D Lembaga Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Batam dan Rumah Bahagia Kab. Bintan tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan konflik kepentingan.

b. Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Tenaga Kerja:

- 1) Keterbatasan Balai Latihan Kerja dalam melakukan pelatihan dan uji Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- 2) Masih terbatasnya jenis pelatihan kewirausahaan maupun model pelatihan yang dikembangkan yang meliputi beberapa bagian yaitu: a) sistem seleksi peserta, b) materi dan metode pelatihan, c) pemagangan, d) pemodalan.
- 3) Belum sinkronnya data kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan kompetensi tertentu dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di BLK.
- 4) Adanya komposisi TPAK berdasarkan jenis kelamin yang tidak sebanding. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan jauh lebih rendah hanya sebesar 44,86 dari laki-laki sebesar 83,92 persen. Hal ini disebabkan masih minimnya peran kaum perempuan /kesadaran perempuan untuk masuk ke dunia kerja atau dunia usaha.
- 5) Tingginya Pengangguran khususnya tamatan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan yang belum *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Belum optimalnya program dan kegiatan responsif gender, belum tersedianya data pilah gender pada semua perangkat daerah, dan belum optimalnya kelembagaan PUG dan Anak.
- 2) Tingkat partisipasi angkatan kerja dan kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja masih rendah.
- 3) Masih rendahnya jabatan publik yang diemban oleh perempuan, ditandai rendahnya pejabat perempuan eselon II, III, IV dan rendahnya jumlah anggota DPRD perempuan.
- 4) Adanya kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kurang optimalnya penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5) Masih adanya kasus trafficking (perdagangan) perempuan dan anak sebagai akibat dari luasnya wilayah posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah tujuan dan transit perdagangan orang.
- 6) Belum optimalnya pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

3) Urusan Pangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pangan yaitu:

- 1) Produksi pangan masih belum optimal dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri.
- 2) Kurang optimalnya pemantauan harga dan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan.
- 3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara belum merata di kabupaten/kota.

4) Urusan Pertanian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pertanian yaitu:

- 1) Tidak ada permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pada tahun 2019.

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Lingkungan Hidup :

- 1) Semakin banyak kendaraan-kendaraan yang membuat kualitas udara di Kepri menurun
- 2) Terbatasnya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam pengelolaan limbah B3
- 3) Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan oleh gagal lelang dan nomenklatur program dan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan kementerian terkait.

6) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- 1) Ketersediaan jumlah blanko KTP elektronik yang masih terbatas sedangkan jumlah penduduk yang mengurus pindah datang dan yang melakukan pengurusan perubahan status serta perubahan lainnya sangat tinggi. Terdapat KTP elektronik yang belum tercetak sehingga penduduk diberikan Surat Keterangan (SUKET) yang hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan rawan rusak.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- 1) Beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Perda tentang kelembagaan masyarakat desa, sehingga pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan masih sangat rendah.

- 2) Terdapat beberapa kendala yaitu dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) masih didominasi intervensi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Selain itu belum optimalnya kemampuan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam mendayagunakan potensi desa.
- 3) Masih lemahnya dukungan lintas program/lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa, dan juga lemahnya kualitas SDM di Desa.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan penyebaran informasi TTG masih minim, serta dalam penggunaan TTG yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- 1) Ketersediaan jumlah blanko KTP elektronik yang masih terbatas sedangkan jumlah penduduk yang mengurus pindah datang dan yang melakukan pengurusan perubahan status serta perubahan lainnya sangat tinggi. KTP elektronik yang belum tercetak sehingga penduduk diberikan Surat Keterangan (SUKET) yang hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan rawan rusak.

9) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- 1) Beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Perda tentang kelembagaan masyarakat desa, sehingga pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan masih sangat rendah.
- 2) Terdapat beberapa kendala yaitu dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) masih didominasi intervensi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Selain itu belum optimalnya kemampuan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam mendayagunakan potensi desa.
- 3) Masih lemahnya dukungan lintas program/lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa, dan juga lemahnya kualitas SDM di Desa.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan penyebaran informasi TTG masih minim, serta dalam penggunaan TTG yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- 1) Tingginya pertumbuhan penduduk yang belum dapat dikendalikan dengan program KB.
- 2) Kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk mengikuti KB dan pelayanan KB yang belum optimal.
- 3) Masih adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*).

11) Urusan Perhubungan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perhubungan:

- 1) Belum tercapainya target pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (roro), dipengaruhi oleh tidak ada intervensi anggaran (kegiatan tidak ada) dana dibutuhkan untuk membangun pel roro sangat besar (>50 M)
- 2) Belum tercapainya target penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebabkan keterbatasan Anggaran APBD (ada kegiatan tetapi pagu tidak mencukupi untuk mencapai target) jumlah faskes yang seharusnya dilaksanakan tahun 2019 adalah 6.010 unit tetapi anggaran tersedia hanya 1.500 unit.
- 3) Belum tercapainya target penyediaan Prasarana lalu lintas, disebabkan keterbatasan Anggaran APBD (tidak ada kegiatan yang mendukung) jumlah prasarana yang seharusnya disediakan 7 unit terealisasi 0.
- 4) Belum tercapainya target penyediaan prasarana sisi darat perhubungan udara disebabkan Keterbatasan anggaran APBD. Jumlah prasarana sisi darat yang seharusnya disediakan pada tahun 2019 adalah 50% dari 1 paket yang ditargetkan, sedangkan realisasi 0.
- 5) Belum tercapainya target penyediaan Kapal Angkutan Laut disebabkan keterbatasan Anggaran APBD untuk membangun/ pengadaan Kapal. Jumlah kapal yang seharusnya disediakan untuk mencapai target adalah 2 unit sedang realisasi masih belum ada atau 0 unit.
- 6) Belum tercapainya target penyediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis, disebabkan jaringan trayek disesuaikan jumlah Armada yang tersedia. Jumlah jaringan trayek yang seharusnya disediakan untuk mencapai target adalah 2 trayek, sedangkan realisasi belum ada atau 0 trayek.

12) Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- 1) Kurangnya pemanfaatan fasilitas aplikasi PPID
- 2) Keamanan website yang masih belum diupgrade

- 3) Admin Perangkat Daerah belum terlatih dalam penyebarluasan informasi dan dokumen publik
- 4) Kurangnya kesadaran tiap Perangkat Daerah akan pentingnya peran PPID

13) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

- 1) Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan dan melaporkan hasil RAT.
- 2) Sampai saat ini Diskopukm Prov. Kepri masih menunggu Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait pembubaran koperasi
- 3) Rendahnya pemahaman Pelaku Usaha tentang manfaat sertifikasi produk.
- 4) Proses pengurusan sertifikasi yang masih menjadi beban bagi Pelaku Usaha, baik dari segi biaya maupun proses pengurusannya.

14) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Penanaman Modal :

- 1) Koordinasi yang belum maksimal antar OPD Teknis terkait waktu Pelayanan Perizinan, walaupun komponen ini masuk dalam kuadran pertahankan, namun didapati atribut ini kerap kali menjadi unsur pelayanan yang dipersepsikan kurang puas oleh pengguna layanan.

15) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1) Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan oleh permasalahan lahan (seperti surat hibah tanah tidak ada, dan tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan), kendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, kendala cuaca, dan kelalaian kontraktor.

16) Urusan Urusan Statistik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Statistik adalah:

- 1) Belum bersedianya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk open data.
- 2) Belum tersedianya regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri.
- 3) Belum memiliki SDM kompeten di bidang statistik sektoral.

17) Urusan Urusan Persandian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Persandian adalah:

- 1) Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan email sanapati untuk admin Perangkat Daerah.

18) Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kebudayaan :

- 1) Indikator Persentase bangunan yang berciri khas Melayu tidak tercapai dikarenakan adanya keterlambatan dan kendala di dalam penyusunan perda bangunan berciri khas melayu. Perda tersebut baru disahkan pada tanggal 08 agustus 2019 kemudian dilakukan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Kebudayaan menggunakan APBD-P namun masih kurangnya pemahaman baik dari Pemerintah maupun swasta terkait isi Perda bangunan berciri khas Melayu tersebut menjadikan kegiatan sosialisasi kurang maksimal.

19) Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perpustakaan:

- 1) Kesulitan OPD dalam mencari bahan pustaka terbaru maupun yang bersifat buku dalam bentuk trilogi maupun tetralogi.
- 2) Masih terbatasnya kualitas dan jenis kriteria bahan pustaka yang tersedia
- 3) Masih belum optimalnya sarana prasarana perpustakaan

20) Urusan Kearsipan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kearsipan adalah:

- 1) Pengelolaan arsip/dokumen masih belum optimal.
- 2) Terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsip/dokumen.
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip daerah.

2. Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan:

- 1) Penurunan produksi perikanan budidaya di tahun 2019 berbanding produksi tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan produksi

komoditas rumput laut di Kabupaten Natuna. Produksi rumput laut di Natuna dilakukan pada tahun 2018, namun tidak dilanjutkan kembali di tahun 2019 oleh sebagian besar pembudidaya rumput laut karena permasalahan pasar (pembeli) yang jauh dari lokasi, sehingga terjadi penurunan harga.

- 2) Dari 4 kawasan Konservasi Perairan yang ditargetkan terdapat 1 (satu) kawasan (Kabupaten Bintan) telah diusulkan oleh Pemprov. Kepri dan akan ditetapkan menjadi KKP Kabupaten Bintan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan 3 Kawasan dalam Proses penyelesaian.
- 3) Dokumen Peraturan Perundangan (RZWP3k) saat ini dalam tahap Draft Dokumen final yang akan disampaikan ke KKP untuk Tanggapan dan Saran.

2) Urusan Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pariwisata:

- 1) Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan kurangnya objek-objek wisata baru di Kepulauan Riau dan jadwal kepastian penyelenggaraan even yang masih sering berubah.
- 2) Tingkat Hunian di Kepulauan Riau tidak mencapai target yang telah ditetapkan walaupun wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan wisatawan (terutama Wisnus) lebih memilih untuk tinggal di rumah teman/ saudaranya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (passenger exit survey) yang menyebutkan bahwa wisatawan nusantara yang datang ke Kepulauan Riau 83,17 % menginap di rumah teman/ saudara, komersil lainnya 2.62 % dan hanya 11,80 % yang menginap di hotel.

3) Urusan Pertanian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pertanian :

- 1) Tidak tercapainya target kinerja Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar disebabkan oleh terjadinya peningkatan kejadian kasus penyakit helminthiasis (cacingan) dilapangan, terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan untuk melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit.

4) Urusan Kehutanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kehutanan yaitu kurangnya kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB.

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral:

- 1) Belum tercapainya target Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan, disebabkan oleh Adanya perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 77 tentang pengalihan kewenangan sektor Sumber Daya Air Tanah berada di Kementerian.
- 2) Kurangnya penyediaan Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah .
- 3) Kurangnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah, disebabkan terdapatnya izin-izin yang berakhir dan larangan ekspor sehingga berkurangnya pendapatan royalti.
- 4) Belum tercapainya Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik karena adanya perubahan Jadwal Pencapaian Progres.
- 5) Belum optimalnya Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*).

6) Urusan Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perdagangan :

- 1) Masih adanya jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), disebabkan Minat beli yang masih tinggi terhadap barang yang belum memenuhi standart ketentuan yang berlaku yang dikarenakan harga yang lebih murah dari barang yang sudah memenuhi standar.
- 2) Belum optimalnya nilai ekspor Non Migas, disebabkan oleh lesunya permintaan global, dampak dari perang dagang antara amerika dan china.
- 3) Belum optimalnya jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA Peningkatan jumlah pelaporan SKA naik disebabkan oleh tersosialisasinya Pelaporan SKA secara online yang diikuti oleh pelaku usaha.

7) Urusan Perindustrian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perindustrian yaitu kurangnya pertumbuhan industri besar, disebabkan permintaan terhadap produk industri berkurang sehingga tidak mendirikan perusahaan baru.

8) Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Transmigrasi :

- 1) Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) baru di Kabupaten Natuna belum sesuai dengan kondisi sebenarnya (RKT dibuat Kementerian).

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Perencanaan Pembangunan:

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perencana pembangunan daerah.
- 2) Kurang optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- 3) Belum optimalnya kerjasama antar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Luar Negeri.

2) Fungsi Keuangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Keuangan :

- 1) Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi Samsat masih jauh dari target yaitu hanya 15% dari target. Hal ini disebabkan masih rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembayaran melalui e- Samsat.
- 2) Masih ada OPD yang belum menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu.

3) Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :

- 1) Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai karena kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami perubahan jadwal, pengumuman hasil seleksinya yang baru diumumkan pada bulan Januari 2019
- 2) Masih adanya pejabat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang belum sesuai dengan ketentuan
- 3) Adanya penerapan e-disiplin menyebabkan terpantaunya perilaku PNS yang melanggar peraturan disiplin pegawai
- 4) Adanya penerapan e-kinerja sehingga perilaku kerja PNS dapat terpantau

- 5) Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran pada BKPSDM sehingga berkurang jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Program Peningkatan pada Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4) Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan:

- 1) Kurangnya kontribusi penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan daerah.
- 2) Kurang optimalnya implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

5) Fungsi Pengawasan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan yaitu belum tercapainya target Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau.

6) Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Sekretariat Daerah :

- 1) Beberapa Ranperda belum dapat disampaikan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah karena kekuranglengkapan administrasi dari Ranperda tersebut. Selain hal tersebut, Biro Hukum Setda Provinsi Kepri masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi penyusunan produk hukum yaitu Tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah, disebabkan oleh belum terbitnya PP sebagai Juklak/Juknis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sehingga daerah belum dapat menyusun regulasi IUJK daerahnya. Peraturan Tentang IUJK yang berlaku sekarang telah membatalkan regulasi daerah terkait IUJK yang sudah ada.
- 3) Kurangnya ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, disebabkan oleh:
 - a. tidak konsistennya beberapa OPD dengan jadwal pengadaan yang telah mereka rencanakan pada Rencana Umum Pengadaan,
 - b. Bergesernya jadwal pelaksanaan tender, yang berkaitan dengan anggaran kas tender pada OPD yang berakibat terlambatnya proses tender,
 - c. Belum adanya Tim teknis terkait pelaksanaan tender pada OPD,

- d. belum optimalnya OPD dalam memanfaatkan aplikasi KERIS BAJA dalam proses review dokumen persiapan pemilihan,
 - e. Sulitnya Koordinasi antara Pokja Pemilihan dengan OPD baik dengan PPK, PPTK maupun tim teknis,
 - f. Pelaksanaan tender cepat dan eprocuring hanya bisa diterapkan pada paket-paket tertentu,
 - g. Sulitnya mendapatkan data terkait progres pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa,
 - h. terbatasnya sumberdaya manusia Fungsional PBJ dan terbatasnya anggaran dalam proses move pelaksanaan pengadaan,
 - i. Pengelola Procurement clinic belum bersifat permanen dan belum dianggarkan.
- 4) Belum optimalnya Tingkat Kesehatan BUMD, disebabkan oleh:
- a) Tidak Lengkapnya Dokumen penilaian kinerja BUMD (PT.Pembangunan Kepri dan PT. Pelabuhan Kepri)
 - b) Tidak Terlaksananya penyusunan kajian ketidakefektian BUMD karena gagal lelang penyedia jasa konsultan pelaksana
 - c) Kurangnya Minat Pejabat Pemprov Kepri yang bersedia ikut Seleksi Komisaris BUMD
 - d) Tidak terlaksananya Pembahasan Ranperda Perubahan Perda pendirian BUMD di DPRD Provinsi Kepri
 - e) Kurangnya Kompetensi Direksi untuk pengembangan bisnis
 - f) Tidak terlaksananya Kajian Dalam Rangka Pendirian Bank Kepri
- 5) Belum tersusunnya Perda Perubahan SOTK sesuai dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, karena DPRD Kepri belum menerima Rekomendasi dari masing-masing Kementerian yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang mengajukan Rekomendasi untuk menaikkan Tipe PD atau bentuk PD yang baru
- 6) Belum optimalnya skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah.
- 7) Belum optimalnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri disebabkan belum terpenuhinya data-data yang menjadi pendukung RB pada 8 Area Perubahan.

7) Sekretariat DPRD

Permasalahan yang masih dihadapi adalah:

- 1) Belum Optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legeslasi dan penganggaran

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik karena trennya meningkat dan di tahun 2018 dan 2019 sudah mampu melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian peningkatan dan pencapaian target Pendapatan Daerah ini belum diikuti oleh pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017 sampai tahun 2019 masih berkisar di antara 90% - 99% dari target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
2. Capaian kinerja belanja daerah tahun 2017-2019 juga semakin meningkat dan mampu melampaui target pada tahun 2019, yaitu pada tahun 2017 sebesar 79,10%, pada tahun 2018 sebesar 95,13%, dan meningkat menjadi 102,14% di tahun 2019.
3. Capaian kinerja penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 sudah mampu melampaui target RPJMD, dengan persentase capaian sebesar 227,10%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018.
4. Capaian kinerja indikator tujuan belum begitu memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari indikator yang sudah mampu mencapai target baru ada enam (6) atau sebesar 33,33%. Sedangkan indikator yang diperkirakan akan tercapai targetnya di akhir periode juga ada enam (6) atau 33,33%. Yang perlu menjadi catatan adalah masih ada 6 indikator yang belum tersedia data.
5. Secara umum pencapaian kinerja indikator sasaran RPJMD pada tahun 2019 dibandingkan target akhir RPJMD tergolong cukup baik, sebanyak 36% kategori telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 40% kategori akan mencapai target, dan yang memerlukan upaya keras untuk mencapai target di akhir periode RPJMD ada 6%. Begitu juga dengan indikator yang belum tersedia datanya masih ada 6%.

6. Pencapaian kinerja indikator program RPJMD pada tahun 2019 dibandingkan target akhir RPJMD tergolong cukup baik, sebanyak 45% kategori telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 38% kategori akan mencapai target, dan 17% kategori perlu upaya keras.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2019, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya untuk menjaga konsistensi kinerja keuangan daerah, supaya target yang telah mampu tercapai bisa dipertahankan dalam sisa waktu periode RPJMD, khususnya adalah upaya untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah.
2. Pada indikator tujuan dan sasaran yang belum mampu mencapai target bahkan memerlukan upaya keras untuk mencapai target, diperlukan kerjasama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi upaya pencapaian target yang ada. Khususnya adalah indikator-indikator yang masih belum tersedia datanya, perlu ditentukan leading sektornya siapa dan perangkat daerah apa saja yang memberikan kontribusi perlu segera dipetakan mengingat periode perencanaan yang tinggal menyisakan tahun 2020 dan 2021.
3. indikator program yang capaiannya kinerjanya masih berstatus belum mampu mencapai target dan memerlukan upaya keras dalam pencapaian target akhir RPJMD, maka perangkat daerah pelaksana program perlu melakukan akselerasi (percepatan) dalam proses penganggaran sisa tahun penganggaran yang ada.